TARAWANG
Seks, Gender &
duksi Kekuasaan
Dr. Irwan Abdullah

Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan

Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan

Dr. Irwan Abdullah

Yogyakarta, 2001

Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan
Dr. Irwan Abdullah

Editor: Ana Samhuri
Editor Bahasa: Nurul Huda, SA.
Desain sampul: Novie Widarwanto
Pracetak: AS, Ayu Sunarti, Arianti, Risti N., Sulisyo N.

Diterbitkan Pertama Kali : Maret 2001
Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
222 hal + xvi; 1,2 cm
Gender - Kumpulan Artikel dan Penelitian

Penerbit dan Percetakan :
TARAWANG PRESS
Jl. Karangmiri 17, Giwangan, Yogyakarta 55163
Telp/Fax: 0274-415757
e-mail: untukind@indosat.net.id

ISBN No. 979 - 8681 - 44 - 4
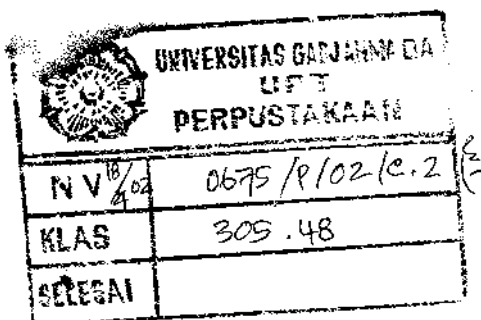
Pengantar Penerbit

DIAWALI dengan ide dan gagasan R.A. Kartini — antara lain lewat buku *Habis Gelap Terbitlah Terang*— perjuangan perempuan untuk persamaan hak sampai kini terus bergulir. Bahkan, belakangan ini, wacana itu menjadi semakin marak. Ini terjadi lantaran, dalam rentang waktu yang demikian panjang dan lama, perjuangan perempuan menuju persamaan hak itu belum juga menemukan titik hasil secara maksimal.

Pembicaraan tentang perempuan tersebut tidak saja demikian meluas dan dari berbagai macam perspektif. Namun juga dilakukan pula oleh laki-laki, pihak yang dituntut persamaan haknya oleh perempuan itu sendiri. Beberapa feminis laki-laki itu —bisa disebut antara lain— adalah Dr Arief Budiman, Dr Ariel Haryanto, Dr. Mansour Fakih dan juga Dr. Irwan Abdullah. Buku *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan* ini adalah tuangan gagasan Dr Irwan Abdullah yang dirangkum

dari makalah dan artikel yang dia tulis berdasarkan pengamatan dan penelitian yang dia lakukan. Memang, gagasan yang diungkap dalam buku ini bukan menawarkan sesuatu yang baru dari sisi orisinalitas ide, namun demikian lebih memposisikan diri sebagai penyegar bagi wacana yang telah diungkap sebelumnya.

Pembahasan Irwan Abdullah mengenai perempuan berangkat dari tiga kecenderungan yang telah ada, yakni: *pertama,* perempuan cenderung dilihat sebagai "kapital" dalam proses transformasi sosial ekonomi. Dalam hal ini, menurut Irwan, secara akademis, diskursus yang dibangun melalui seminar, diskusi dan penelitian didominasi oleh tema status dan peran perempuan dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan dan lain-lain. Pembicaraan mengenai hal itu mengarah kepada pengukuran tinggi-rendah atau baik-buruk peran perempuan dalam dominasi isu-isu lain di sekitar masalah kaum perempuan.

Kedua, pembahasan atau penelitian yang cenderung dijiwai oleh suatu gugatan tentang "absensi perempuan" dalam berbagai bidang seperti bidang kedokteran, hukum dan industri. Pengingkaran terhadap status dan peran perempuan dinilai sebagai persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan semata. Artinya, jarang ditemukan analisis yang lebih luas untuk melihat persoalan dalam konteks tertentu. Namun begitu, secara perlahan-lahan dalam bidang politik terjadi proses perubahan yang lebih memungkinkan kaum perempuan terlibat dalam berbagai kegiatan.

Sedangkan yang *ketiga,* kaum perempuan cenderung dilihat sebagai "korban' dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi-kondisi wanita

yang buruk dalam pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, menjadi mode pembicaraan. Kondisi seperti ini tidak dianalisis secara baik untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digunakan untuk menata kehidupan kaum perempuan. Di samping itu, bagian lain dari diskusi mengarah pada pembicaraan pelecehan seksual, perkosaan dan berbagai bentuk tindakan kekerasan yang merugikan kaum perempuan.

Dalam buku ini, ada dua arus pembicaraan yang hendak disampaikan oleh laki-laki kelahiran Aceh, dosen Antropologi Universitas Gadjah Mada yang memiliki perhatian cukup besar pada kajian dan penelitian gender ini, yaitu mengenai perempuan dalam wacana sosial dan perempuan dalam realitas ekonomi. Dua arus ini sepertinya hendak ditabrakkan dan dibenturkan lantaran pada kedua bagian ini terdapat kecenderungan perbedaan posisi dan kondisi perempuan sebagai bahan kajian.

Meski pembahasan penulis tetap berada pada basis hipotesa bahwa eksistensi perempuan selalu terpinggirkan dalam sistem kemasyarakatan yang masih belum beranjak dari *male dominated culture,* tetapi setidaknya dalam kajian tentang realitas ekonomi pedesaan, seperti terungkap dalam bagian kedua buku ini, akan ditemukan data mengenai perumusan eksistensi perempuan yang sedang berupaya menjadi "subyek ekonomi", bukan sekadar obyek.

Proses perumusan eksistensial seperti itu agaknya memang lebih sulit diwujudkan dalam medan komunikasi sosial yang berbasiskan pada modernitas yang dihegemoni oleh kapitalisme. Dalam "Rimba Lelaki dan Kematian Perempuan: Tubuh Perempuan dalam Iklan" Irwan Abdullah mengemukakan, perempuan sesungguhnya bukan sekadar menghadapi musuh lama (laki-

laki), tetapi musuh baru yang jauh lebih perkasa, yakni kapitalisme. Laki-laki bahkan telah dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk bersama-sama melestarikan struktur hubungan gender yang timpang. Dikemukakan, pelestarian ketimpangan hubungan itu tidak hanya menyebabkan perempuan semakin tersubordinasi, tetapi juga menyebabkan terjadinya subordinasi perempuan oleh perempuan sendiri.

"Ini tampak dari posisi yang ditempati perempuan dalam iklan di mana di satu sisi perempuan merupakan alat persuasi di dalam menegaskan citra sebuah produk dan di sisi lain perempuan merupakan konsumen yang mengkonsumsi produk kapitalisme. Dua posisi ini telah mentransformasikan tidak hanya kehidupan perempuan yang terlibat dalam iklan dan perempuan yang diacu dalam iklan, tetapi telah menata ulang keseluruhan hubungan dan tatanan sosial dalam suatu masyarakat, termasuk pola hubungan gender," demikian kata Irwan Abdullah.

Pada bagian lain, Irwan Abdullah mengemukakan, secara biologis perempuan dan laki-laki merupakan makhluk yang berbeda. Perbedaan ini mendapat artikulasi kultural yang menghasilkan anggapan, bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) perempuan ini secara jelas dimanfaatkan oleh laki-laki di dalam praktik seksual yang tidak sehat dan ini merupakan penegasan terhadap dominasi laki-laki. Suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial. Dominasi ini menjadi gambaran umum dalam berbagai praktik kehidupan yang melibatkan laki-laki dan perempuan.

Dalam pandangan Irwan Abdullah, pembicaraan mengenai perempuan telah mengalami pergeseran yang

cukup mendasar pada saat konsep "gender" digunakan sebagai perspektif. Gender lebih menunjuk kepada relasi di mana laki-laki dan wanita berinteraksi. Dengan cara ini, fokus kajian tidak hanya tertuju pada perempuan tetapi juga pada laki-laki yang secara langsung berpengaruh di dalam pembentukan realitas hidup perempuan. Pendekatan semacam ini telah memberikan nuansa baru, terutama dalam menjelaskan dominasi dan subordinasi atau hubungan-bubungan kekuasaan secara umum yang ternyata memberi pengaruh sangat penting dan mendasar dalam kehidupan perempuan secara luas. Lebih dari itu, pembaca dapat lebih lanjut mengorek soal posisi dan eksistensi perempuan dalam buku ini. Karena, buku ini memang lebih mengedepankan penyampaian masalah secara ilmiah dan filosofis, bukan secara prakmatis.

Sisi kajian keilmiahan ini pulalah yang menjadikan buku ini layak dipublikasikan tanpa adanya beban ketakutan mengenai aktualitas data dan kronologi peristiwa. Buku ini –dengan sendirinya—telah melakukan obyektivitas atas konteks ruang dan waktu yang menjadikannya relatif diterima di mana pun dan kapan pun.

Begitulah. Selamat menikmati.

Yogyakarta, Maret 2001
TARAWANG

Pengantar Penulis

SUATU pagi di tahun 1988, saya mengikuti tiga perempuan pedagang yang meninggalkan rumah mereka sejak jam tiga pagi. Dengan obor di tangan, mereka menerangi jalan untuk menembus desa yang masih gelap menuju pasar yang jaraknya enam belas kilometer ke arah timur. Sepanjang jalan mereka bercerita tentang apa saja yang baru terjadi—tentang anak-anak di rumah, keluarga, tetangga, tentang hasil panen yang gagal, tentang sakit, kematian, atau tentang suami yang tidak becus. Di pasar mereka bertemu dengan ratusan pedagang lain yang datang dari berbagai pelosok desa. Bersahut-sahutan mereka berbicara dari pagi sampai petang di sela-sela suara pembeli yang mereka layani. Saat luang di pasar mereka gunakan untuk berkerumun dan menggosip tentang apa saja yang dapat memberi kepuasan atau membagi rasa duka. Jam dua siang mereka mulai

meninggalkan pasar dan memulai perjalanan pulang.

Apa yang saya lihat pada saat itu, tidak kurang dari sebuah *hidden transcript* yang menegaskan respon dan gerakan kultural yang dilakukan oleh perempuan. Ber-dagang telah merupakan ranah kekuasaan yang mem-berikan mereka ruang untuk manuver, paling tidak untuk keluar dari ranah yang terdominasi oleh laki-laki: rumah dan pertanian tempat perempuan desa menghabiskan sebagian besar waktunya. Imbalan ekonomi dari kegiatan berdagang kecil-kecilan itu tidak memberikan arti yang besar karena jumlahnya pada saat itu hanya berkisar lima ratus sampai seribu rupiah sehari untuk waktu dan tenaga yang begitu besar. Namun demikian, berada di luar rumah dan di luar pertanian dalam beberapa jam sehari telah memberikan kepuasan yang lain bagi mereka. Dengan cara berdagang mereka menemukan jaringan dan kelompok yang memberikan ruang bagi ekspresi diri.

Gambaran ini menegaskan bahwa gerakan feminis itu ada pada tingkat yang paling rendah dan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Paling tidak, hal ini menegaskan perlunya pendekatan subyektif untuk dapat mendengar langsung pandangan kaum perempuan tentang tata kehidupan sosial. Diskusi yang biasanya kita bangun, sebaliknya, tidak dapat menghindari dirinya pada "bias laki-laki", baik yang disebabkan oleh sang peneliti adalah laki-laki atau terkontaminasi oleh sifat laki-laki maupun oleh kuatnya struktur patriarkhal yang membingkai wacana gender. Gender yang menunjuk pada konstruksi sosial atas laki-laki dan perempuan, khususnya dengan menitikberatkan pada "relasi", sesungguhnya merupakan entitas yang dinamis yang dapat mengalami redefinisi dan konseptualisasi

berdasarkan ruang dan waktu. Seting sosial seperti dunia perdagangan atau dunia apa pun tempat perempuan berkiprah merupakan salah satu ruang yang sangat perlu untuk dijelaskan. Namun demikian, realitas gender yang dinamis ini justru cenderung dimatikan pada suatu titik pemaknaan akibat perspektif yang digunakan yang cenderung menafikan variasi ruang dan perubahan seting waktu. Secara sederhana, misalnya, bagaimana "status" dan "peran" dapat dilihat secara aktual dan empiris yang memperlihatkan dinamikanya dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Struktur patriarkal yang mendominasi sesungguhnya tidak hanya menyebabkan atau mendikte keabsahan nilai dan praktik sosial, tetapi juga merupakan virus yang menjangkiti "cara berpikir" para peneliti yang menyebabkan gender dilihat sebagai sesuatu yang stagnan.

Sejalan dengan itu, ada dua hal yang penting untuk dilihat dalam analisis gender. Pertama, melihat perubahan dalam dimensi-dimensi nilai dan tindakan sosial yang diwujudkan oleh kelompok perempuan. Paling tidak, dengan cara ini dinamika hubungan gender pada berbagai tingkat dapat dilihat. Andaikata status dan peran menjadi titik tolak analisis gender, maka ranah itu harus ditempatkan dalam konteks ruang dan waktu yang dinamis, sehingga kedalaman pemahaman tentang perempuan dapat dicapai. Kedua, kajian-kajian tentang gender perlu menggunakan perspektif yang lebih terbuka dengan asumsi-asumsi yang cenderung melihat persoalan gender sebagai persoalan empiris yang kontekstual. Pendekatan kekuasaan, misalnya, harus lebih banyak digunakan dan diuji ketajamannya untuk memberikan nuansa bagi pemahaman persoalan perempuan dan gender. Pendekatan yang lebih beragam dan

terbuka akan memberikan pilihan-pilihan yang beragam bagi penataan sosial yang berwawasan gender.

Buku kecil ini merupakan respon langsung maupun tidak langsung terhadap kedua pendekatan tersebut yang tampak dari tulisan-tulisan yang dikumpulkan di sini. Satu hal yang perlu dicatat di sini menyangkut persoalan proses penulisan buku ini. Sebagai sebuah kumpulan karangan, buku ini menunjukan perkembangan historis si penulis, karena sebagian disusun pada masa awal keterlibatan sang penulis sebagai peneliti di Pusat Penelitian Kependudukan UGM dan sebagian lagi ditulis pada menit-menit terakhir sebelum buku ini dicetak. Untuk itu saya kira bias individu dan perkembangan pemikiran si penulis menjadi persoalan tersendiri yang dapat diamati dalam buku ini.

Mengingat sejarah penulisan tersebut, maka tulisan-tulisan yang termuat dalam buku ini tidaklah dimaksudkan sebagai suatu tulisan akademis dengan ketaatan-ketaatan pada prasyarat yang mengikutinya, tetapi merupakan catatan-catatan yang ditulis dalam ruang dan waktu yang berubah-ubah dan untuk kepentingan yang berbeda-beda pula. Untuk itu buku ini bukanlah buku yang ingin saya tulis, tetapi sebuah awal dari apa yang sama-sama kita pikirkan tentang isu gender dan pemberdayaan perempuan.

Dengan terbitnya buku ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan di Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM yang lebih dari sepuluh tahun (sejak 1987) telah menjadi kolega yang inspiratif. Agus Indiyanto dengan caranya sendiri telah membantu dalam penyiapan satu dua naskah, untuk itu saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga ingin saya sampaikan kepada Tri Marhaeni dan Abdul Wahid yang

telah ikut membuat catatan koreksi pada saat-saat terakhir penerbitan. Kawan-kawan dari Tarawang Press dan Yayasan Untuk Indonesia yang telah mempelopori proses penerbitannya. Untuk itu saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih. Semoga buku kecil ini memberi arti bagi pembaca.

Yogyakarta, September 2000
Irwan Abdullah

Daftar Isi

Pengantar Penerbit ✻ *v*
Pengantar Penulis ✻ *x*
Daftar Isi ✻ *xv*

Bagian 1. Pengantar Wacana ✻ *1*
Bab 1 Meminang Perempuan ✻ *3*
Bab 2 Rekonstruksi Gender terhadap Realitas Perempuan ✻ *21*

Bagian 2. Perempuan dalam Wacana Sosial ✻ *29*
Bab 3 Rimba Lelaki dan Kematian Perempuan: Tubuh Perempuan dalam Iklan ✻ *31*
Bab 4 Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan ✻ *47*
Bab 5 Tubuh, Kesehatan dan Reproduksi Gender ✻ *65*
Bab 6 Kesadaran Gender dan Hak Reproduksi Perempuan ✻ *85*

Bagian 3. Perempuan dalam Realitas Ekonomi * *101*

Bab 7 Reproduksi Ketimpangan Gender Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Ekonomi * *103*

Bab 8 Perempuan Bakul di Pedesaan Jawa * *123*

Bab 9 Perempuan ke Pasar, Studi tentang Perubahan Sosial Ekonomi Pedesaan * *149*

Bab 10 Antara Peran Produktif dan Reproduktif: Perempuan dalam Industri Rumah Tangga Kerajinan * *165*

Bagian 4. Epilog * *189*

Bab 11 Pembangunan, Supremasi Lelaki dan Dekonstruksi Peran Perempuan * *191*

Daftar Pustaka * *209*

Sumber Tulisan * *220*

Tentang Penulis * *222*

Pengantar Wacana

Bab Satu

Meminang Perempuan

MENGAPA sebagian kita memilih wanita atau perempuan sebagai pusat perhatian dalam penelitian? Apakah perempuan memang betul-betul bermasalah, sehingga perlu dipahami dan dipecahkan persoalannya? Kalau dianggap bermasalah, maka siapa yang mengatakan (berhak mengatakan) mereka bermasalah? Jangan-jangan, persoalan ini hanya muncul pada saat kita mulai mendirikan lembaga-lembaga yang bertugas mendefinisikan masalah perempuan, dari lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat, hingga kementrian urusan peranan wanita dengan segala kegiatannya? Simone de Beauvior bahkan pernah mempertanyakan, "Benarkah ada perempuan?" Pertanyaan ini mengingatkan kita pada pandangan-pandangan Foucault (1990), yang menganggap bahwa perempuan "ada" karena "kita" menghadirkannya, akibat suatu *discursive process* yang melibatkan

banyak agen.

Kalaulah laki-laki kemudian terlibat dalam berbagai pembicaraan, penelitian, dan penataan masalah perempuan, maka mengapa pula laki-laki harus terlibat (atau dilibatkan)? Tidakkah cukup perempuan saja? Pertanyaan-pertanyaan tersebut, kini saatnya untuk diajukan, dan kalau dapat, dijawab secara tuntas. Pentingnya pertanyaan semacam itu dilandasi oleh dua kebutuhan.

Pertama, pemahaman hakekat persoalan kaum perempuan. Sebagian kita merumuskannya sebagai "masalah penelitian", tetapi apakah rumusan itu sah adanya, atau sahih, masih perlu dipertanyakan, karena bias-bias yang melekat pada rumusan itu sendiri (bias laki-laki, bias kelas, atau bias etnis, dan seterusnya).

Kedua, perspektif yang cukup tajam dalam memahami hakekat persoalan di atas dan memecahkannya dalam bentuk "kebijakan sosial" atau paling tidak dalam bentuk "kebijaksanaan masyarakat". Dalam hal ini yang menjadi masalah bukan saja mengenai perspektif itu, yang memiliki bias sendiri sehingga memiliki sisi politis yang bersifat memarginalkan dimensi-dimensi persoalan yang dianggap bukan wilayah jajahannya, tetapi juga penggunaan sebuah perspektif perlu dilakukan dengan eksplisit agar dialog antarperspektif memungkinkan dihasilkannya transperspektif dalam kajian masalah perempuan.

Kedua persoalan di atas harus dilihat dalam konteks yang berubah, sesuatu yang paling awal harus menjadi bagian dari kesadaran peneliti. Jangan sampai kita merekam suatu masyarakat yang telah berubah dengan konsep-konsep yang kita definisikan pada abad yang lalu. (Apakah, misalnya, "rasa cinta" seorang ibu kepada anaknya masih perlu didefinisikan dari curahan waktu

yang dihabiskan bersama anaknya. Apakah kita kemudian boleh mengatakan bahwa seorang ibu tidak mencintai anaknya karena dia tidak pernah di rumah? Hal ini akan menyebabkan usaha penelitian menjadi usaha mencari "surga yang hilang"). Konteks sosial yang berubah, karenanya, harus dengan sadar dilibatkan dalam setiap usaha kita memahami dan memecahkan masalah kaum perempuan.

Kaum Perempuan dalam Arus Perubahan Zaman

Perubahan kontemporer dalam hidup kaum perempuan dimulai pada saat modernisme menjadi ideologi masyarakat, ketika nilai dan ukuran menjadi seorang perempuan didefinisikan oleh negara dan kapital.

Menjadi perempuan bagi negara adalah "memerankan panca tugas" yang sebelumnya tidak didefinisikan secara baku dan masih bersandar pada definisi yang menyebar berdasarkan etnis, agama, atau ciri-ciri lokal tertentu. (Hal ini tampak misalnya, dari istilah "perempuan muslim" yang sarat dengan beban nilai tertentu). Beban menjadi perempuan di era modern menjadi jauh lebih berat dibandingkan sebelumnya, karena berbagai muatan nilai harus diakomodasikan oleh kaum perempuan. Beban konsep "peran ganda", "multi peran", dan "peran perempuan dalam pembangunan" begitu berat dipikul, bukan hanya oleh perempuan, tetapi juga oleh suami dan anak-anak mereka. Kita tidak pernah bertanya pada suami, kesulitan apa yang dihadapi pada saat perempuan meninggalkan rumah untuk bekerja di pasar atau di Arab Saudi. Perhitungan yang banyak dibuat menyangkut sumbangan ekonomi yang dibawa perempuan, tidak dihitung atau diperbandingkan dengan

biaya sosial, psikologis, dan budaya yang harus dibayar pada saat perempuan tidak di rumah dan tidak di desa.

Bagi kaum kapitalis, menjadi perempuan adalah menjadi "produsen" sekaligus menjadi "konsumen" dengan ukuran-ukuran yang dikonstruksikannya, dari ukuran tubuh hingga gaya hidup (yang bisa diperoleh melalui makan, latihan kebugaran, obat-obatan, dan berbagai produk yang menjadi atribut modernitas). Ukuran-ukuran nilai yang dibangun ikut pula merubah pola hubungan sosial kaum perempuan dalam usaha untuk memenuhi tuntutan dan tuntunan baru. Hubungan relasional yang melibatkan kaum perempuan pun menjadi jauh lebih rumit (seperti negara, kapitalis, media, dan sebagainya yang menjadi bagian penting dalam analisis gender).

Dengan mempelajari proses transformasi masyarakat yang melibatkan pergeseran dari tradisionalisme ke modernisme dan pascamodernisme (lihat Giddens, 1994; Featherstone, 1990), ada sejumlah kondisi yang dapat dirumuskan:

1. Fakta bahwa sebagaian besar penduduk tidak hidup lagi dari pertanian dan mulai hidup di kota-kota dengan mode produksi yang berbeda (non-pertanian). Kaum perempuan mulai hidup dalam komunitas-komunitas kecil tidak hanya dalam pengertian ruang fisik, tetapi ruang sosial yang jauh lebih sempit akibat pendefinisian status dan kelas secara lebih tegas. Sifat-sifat komunal mengalami penyempitan sehingga menimbulkan diferensiasi nilai dan ukuran sebagai perempuan.
2. Ikatan-ikatan tradisional seperti hubungan antargenerasi dan perkawinan mengalami perubahan sehingga kultur kehilangan kontrol terhadap pemben-

tukan suatu tipe "perempuan" yang diidealkan oleh masyarakat. Otoritas tradisi dalam hal ini mulai melemah yang digantikan dengan rasionalitas yang kemudian menjadi pegangan dalam setiap pengambilan keputusan. Orang tua (akibat perubahan hubungan antar-generasi) mulai kehilangan otoritas tradisional dalam berhubungan dengan kaum perempuan sehingga kontrol hanya dapat dilakukan dengan instrumen kekuasaan modern yang lebih dapat dinegosiasikan. (Alasan-alasan rasional atas suatu tindakan menjadi kebutuhan dalam berbagai bentuk relasi sosial antara laki-laki dan perempuan).

3. Posisi mesin dan teknologi menjadi semakin penting dari waktu ke waktu yang cara kerjanya dan nilai-nilai yang melekat sangat mempengaruhi sistem kehidupan dan norma-norma yang terbentuk. Meskipun proses dehumanisasi telah menjadi suatu mode pembicaraan tentang dampak teknologi pada tahun 1980-an, proses "deperempuanisasi" hampir tidak terpikirkan. (Apakah proses semacam ini, misalnya, paralel dengan apa yang disebut Foucault sebagai *"the death of the subject"*, hal semacam ini juga menentukan bagaimana struktur hubungan gender diberi makna. Apakah kehadiran *handphone* (Philips) memang dapat menggantikan kehadiran suami dalam proses melahirkan anak yang mereka katakan sebagai "buah hati"?
4. Proses integrasi masyarakat ke suatu mode pembagian kerja internasional yang mempengaruhi bentuk-bentuk hubungan kerja dengan standar baru. Andaikata standar (kualitas) internasional tidak bisa dipengaruhi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), misalnya, maka kita akan berhadapan dengan satu

tipe marginalisasi (atau bentuk ketimpangan) yang berbeda dan karenanya kita tidak memiliki cukup alasan untuk menyalahkan struktur patriarki.

5. Empat kondisi di atas, yang menunjukkan pada suatu jenis sistem dan struktur sosial yang mulai dan akan terbentuk merupakan realitas obyektif yang meminta kepatuhan-kepatuhan peneliti dan pekerja sosial, khususnya dalam memahami, menjelaskan, dan memecahkan masalah kaum perempuan. Kondisi tersebut juga mengharuskan terjadinya penyesuaian dalam perspektif yang digunakan.

Representasi Perempuan dalam Penelitian

Penelitian dan pembahasan tentang perempuan selama ini terkonsentrasi ke dalam tiga kecenderungan. *Pertama,* perempuan cenderung dilihat sebagai "kapital" dalam proses transformasi sosial ekonomi. Hal ini menyebabkan munculnya usaha yang cukup kuat untuk membicarakan dan mendorong "partisipasi perempuan". Secara akademis, diskursus yang dibangun (melalui seminar, diskusi dan penelitian) didominasi oleh tema status dan peran perempuan dalam berbagai bidang, seperti industri, pertanian, ekonomi rumah tangga, pendidikan, dan lain-lain. Pembicaraan mengarah pada pengukuran tinggi-rendah atau baik-buruk peran perempuan dalam mendominasi isu-isu lain di seputar masalah kaum perempuan. Berbagai program pembangunan melibatkan institusi PKK. Keberadaan institusi ini menunjukkan dominasinya isu peranan kaum perempuan dalam program-program pemerintahan. Bahkan, sejumlah dana telah pula dialokasikan untuk kegiatan PKK.

Kedua, Penelitian cenderung dijiwai oleh suatu

gugatan tentang "absensi perempuan" dalam berbagai bidang, seperti bidang kedokteran, hukum, dan industri. Pengingkaran terhadap status dan peran perempuan dalam hal ini telah dinilai sebagai persoalan hubungan antara laki-laki dan perempuan semata, jarang ditemukan analisis yang lebih luas untuk melihat persoalan dalam konteks tertentu. Secara perlahan-lahan dalam bidang politik terjadi proses perubahan yang lebih memungkinkan kaum perempuan untuk terlibat dalam berbagai kegiatan.

Ketiga, kaum perempuan cenderung dilihat sebagai "korban" dari berbagai proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi-kondisi perempuan yang buruk, seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, telah menjadi mode pembicaraan. Meskipun demikian, kondisi ini tidak dianalisis secara baik untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat digunakan untuk menata kehidupan kaum perempuan. Bagian yang lain dari diskusi telah mengarah pada pembicaraan pelecehan seksual, perkosaan dan berbagai bentuk tindakan kekerasan yang merugikan yang dialami kaum perempuan. Secara praktis, banyak kegiatan advokasi telah dilakukan dalam bentuk pendampingan dalam berbagai interaksi sosial yang melibatkan kaum perempuan.

Jika ditinjau dari tema yang dibicarakan, perlu disimak apa yang ditemukan oleh Winati Wigna dari penelitiannya yang mencakup periode waktu 1969-1992. Dalam Pelita I hingga II dikatakan bahwa penelitian tentang kaum perempuan terfokus pada masalah kesehatan, khususnya menyangkut masalah KB, status gizi ibu hamil dan balita, dan penyakit yang diderita kaum perempuan. Sementara pada Pelita III, IV, dan V, masalah ekonomi menjadi tema konsentrasi penelitian,

khususnya menyangkut topik ketenagakerjaan, pendapatan, dan produktivitas perempuan dan laki-laki (Wigna' 1993: 4-5). Meskipun penelitian setelah tahun 1992 mulai menyebar ke berbagai topik, seperti isu lingkungan, hukum, dan sumber daya manusia, tapi perempuan masih menjadi titik pusat pembicaraan. Aspek gender, misalnya, yang menekankan pada hubungan relasional masih kurang sekali dianalisis secara tajam.

Gambaran penelitian yang kurang berkembang dapat dilacak dari kualitas proposal penelitian. Ribuan penelitian yang setiap tahun diajukan ke Dikti Depdikbud, misalnya, memiliki kualitas yang buruk. Winati Wigna menyebutkan tiga kelemahan utama dari proposal yang diteliti (mencakup tahun 1969-1992), yaitu teori, metode, dan rumusan masalah. Kelemahan itu juga masih dirasakan oleh tim Dewan Pakar Dikti hingga saat ini. Kelemahan teori merupakan kelemahan paling utama yang memperlihatkan bahwa sangat sulit mendapatkan proposal yang dilengkapi teori dan pemahaman teoritis yang baik. Kelemahan ini pula yang mempengaruhi kelemahan dalam pemilihan metode dan perumusan masalah.

Kondisi-kondisi yang memungkinkan kelemahan ini muncul sangat perlu dikaji untuk melihat bagaimana hakekat persoalan itu sendiri. Untuk itu kita perlu melihat pada sejarah berkembangnya penelitian tentang perempuan. Yang menarik, bahwa pada awalnya studi tentang perempuan di universitas lebih banyak dilakukan oleh laki-laki (Sadli, 1993: 4). Hal ini paling tidak dapat disebabkan oleh dua alasan.

Pertama, adalah fakta bahwa bidang penelitian masih merupakan *male-dominated field* sehingga gambaran yang ada di dalamnya tidak jauh berbeda dengan

gambaran yang ada dalam bidang-bidang lain yang didominasi laki-laki.

Kedua, studi tentang perempuan di universitas muncul lebih sebagai respon terhadap dana penelitian yang tersedia, sehingga topik kajian perempuan tidak selalu terkait dengan minat, tetapi lebih terkait dengan dana yang tersedia. Hal ini dalam arti terbatas dapat juga menjelaskan rendahnya mutu penelitian perempuan di universitas. Masalah perempuan bukan satu-satunya topik penelitian yang digeluti oleh sebagian besar peneliti sehingga tidak banyak kesempatan bagi peneliti untuk mendalami topik perempuan secara khusus (gambaran ini agak berbeda dengan rekan-rekan di LSM yang mencurahkan hampir sebagian besar waktunya untuk menekuni masalah perempuan).

Penjelasan masalah kualitas itu dapat juga diacu pada sejarah pendirian Pusat Studi Wanita (PSW) atau Kelompok Studi Wanita (KSW) itu sendiri. Saparinah Sadli (1993: 17-18) menunjukkan lima kondisi yang menyebabkan munculnya studi wanita dilingkungan universitas. *Pertama,* disebabkan oleh adanya sekelompok *ilmuwan perempuan* (cetak miring dari penulis) yang telah mempunyai pengalaman dengan studi "wanita dan pembangunan" dan membuat mata kuliah "wanita dan pembangunan" sebagai bagian dari kurikulum yang tersedia (misalnya di Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik di UI). *Kedua,* disebabkan oleh pertemuan-pertemuan informal yang membahas isu-isu perempuan dengan tinjauan psikologi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kuliah pilihan "psikologi wanita". *Ketiga,* disebabkan oleh adanya perempuan yang tergabung dalam lembaga tertentu seperti Lembaga Kependudukan UGM dan Lembaga Riset Unibraw dan Unhas yang secara aktif

berperan serta dalam pembentukan studi wanita di lingkungan universitasnya. *Keempat,* dengan adanya sejumlah ilmuwan perempuan yang pernah mengikuti kursus VENA (Vrouwen en Autinomie) di Leiden sebagai kerjasama FISIP UI dengan VENA Leiden University. *Kelima,* disebabkan oleh suatu perkembangan yang secara politis telah sangat mendukung berkembangnya studi wanita, yaitu ketentuan dalam GBHN tentang perlunya didirikan PSW. *Keenam,* karena dibukanya Program Kajian Wanita tingkat Pasca Sarjana, seperti di UI (November 1989).

Satu hal yang tidak disebutkan oleh Saparinah Sadli adalah berkembangnya masalah perempuan sebagai "tema primadona" bagi banyak lembaga donor. Tersedianya dana yang cukup besar dan banyak pada tahun 1980-an, misalnya, telah menyebabkan munculnya minat studi wanita di universitas dan di luar universitas. Namun demikian, jika melihat kembali enam kondisi yang dipaparkan di atas, maka rendahnya mutu penelitian perempuan sangat mungkin disebabkan oleh pembentukan PSW yang lebih bersifat politis dan tidak *match* dengan minat ilmuwan yang tersedia.

Menuju Suatu Perspektif Penelitian Perempuan

Pendekatan yang dilakukan selama ini cenderung mendekati kaum perempuan "dari luar", khususnya pada saat suatu indikator digunakan untuk "mengukur" tingkat tertentu dari aspek kualitatif atau kuantitatif kaum perempuan. Kecenderungan ini telah menyebabkan kita tidak banyak memahami sifat-sifat kaum perempuan berdasarkan kategori-sosial tertentu. Hal ini tampak dari kecenderungan kita melabel kaum perempuan

sebagai "satu" kategori sosial. Pergeseran-pergeseran masa kini menegaskan bahwa kategori kaum perempuan harus dilihat dari diferensiasi dan sifat-sifat khas yang begitu bervariasi. (Hal ini pula kemudian menyebabkan kita "gagal" dalam menata kehidupan sosial yang lebih "menerima" kaum perempuan sebagai bagian yang terintegrasi).

Penelitian selama ini juga secara dominan menempatkan perempuan pada titik pusat pembicaraan (seperti perempuan dalam pembangunan, perempuan dalam industri, atau peranan perempuan dalam ekonomi rumah tangga). Kecenderungan ini telah menghilangkan banyak relasi yang perlu digambarkan karena persoalan kaum perempuan tidak hanya perlu dilihat dalam kaitannya dengan laki-laki (gender), tetapi juga perlu dikaji dalam kaitannya dengan struktur dan sistem sosial yang ada dalam suatu masyarakat, baik bersifat lokal maupun global. Hal ini telah menyebabkan kita tidak memahami banyak hakekat hubungan gender, kapan suatu hubungan "dapat" disebut timpang dan bagaimana suatu hubungan dapat dikatakan setara. Kemudian, hubungan-hubungan tersebut dapat dikaitkan dengan faktor atau unsur apa saja, karena selama ini struktur patriarki selalu kita salahkan (apakah struktur patriarki sama sekali tidak ada gunanya? Kita tidak dapat menjawabnya dengan baik karena hakekat hubungan gender tidak kita pahami). Dalam penataannya kemudian terjadi berbagai implikasi (kebijakan), seperti, usaha melakukan emansipasi dengan "meminta laki-laki berperan ganda". Apakah hal ini yang memang "paling perlu" dilakukan? Bukankah peran ganda laki-laki hanya dapat dilakukan jika struktur sosialnya memungkinkan?

Kelemahan lain yang mendasar adalah *gap* penelitian dan kebijakan yang masih sangat lebar sehingga ide-ide yang dikembangkan di lapangan dalam banyak hal hampir tidak dapat menjadi masukan kebijakan. Secara institusional tidak ada struktur mediasi yang dapat menjembatani sehingga ide-ide perubahan tidak dapat dipaksa untuk diimplementasikan.

Sejalan dengan persoalan yang dipaparkan di atas, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan dalam upaya pemahaman masalah perempuan yang lebih dalam dan memiliki implikasi meluas dalam penataan kehidupan kaum perempuan dan masyarakat secara umum (lihat Olesen, 1994).

1. Pendekatan subyektif. Pendekatan ini didasari oleh asumsi bahwa kaum perempuan merupakan kelompok yang sadar dan memahami posisi kultural dan strukturalnya dalam masyarakat. Sejalan dengan itu pendekatan subyektif berusaha memahami "pandangan dari dalam" (*inside view*), "alasan" yang mendasari suatu praktik sosial yang diwujudkan oleh perempuan. Dalam kasus penolakan perempuan atas promosi jabatan, misalnya, harus dipahami "alasan" atau faktor subyektif yang mendasari, tanpa berprasangka bahwa perempuan itu melakukan kesalahan karena dia menolak. Dalam hal ini tidak ada penilaian positif atau negatif yang diberikan pihak luar. Pendekatan subyektif juga berusaha membangun konsep, nilai, dan ukuran yang didefinisikan oleh perempuan sendiri. Ukuran-ukuran inilah (yang telah dikembangkan) yang kemudian digunakan untuk "mengukur" posisi kaum perempuan. Adalah tidak *fair* menggunakan konsep Barat untuk mengukur kehidupan, misalnya, perempuan Timur.

2. Pendekatan relasional, melihat kontrol laki-laki dalam struktur sosial, struktur & percakapan. Pendekatan ini menekankan pada proses pembentukan kelas atau status yang didasarkan oleh hubungan-hubungan yang terbentuk. Untuk itu, kepentingan-kepentingan berbagai pihak dalam proses interaksi menjadi unsur penting dalam analisis. Analisis tidak semata-mata menyangkut hubungan perempuan dengan laki-laki, tetapi juga proses interaktif antara perempuan dengan berbagai agen sosial dan pemerintah. Mengapa, misalnya negara cenderung menomorduakan perempuan dalam berbagai parameter? Usaha menjawab pertanyaan semacam ini akan mengarahkan penelitian pada usaha memahami sistem organisasi negara sehingga hakekat dari hubungan relasional yang menyebabkan perempuan tersubordinasi akan dipahami. Hasil semacam ini akan mengarah pada perubahan pola organisasi negara sehingga lebih mengakui dan menghormati kedudukan perempuan.
3. Pendekatan struktural yang melihat berbagai bentuk interaksi dalam kaitannya dengan sejarah pembentukan suatu struktur. Bagaimana, misalnya, sejarah pembentukan PKK merupakan institusi yang dibentuk di bawah bayang-bayang struktur patriarki. Analisis semacam ini memungkinkan kita menguji akar dari suatu gerakan sosial atau organisasi untuk melihat ideologi yang mendasarinya.
4. Pendekatan kebijakan sosial yang mencoba menerjemahkan fenomena ke dalam konsep dan indikator kebijakan. Pertanyaan pokok yang harus diperhatikan dalam melakukan pendekatan ini adalah: apakah suatu penelitian (feminis) memiliki implikasi ke-

bijakan, bagaimana kebijakan itu dapat diimplementasikan, dan apakah suatu kebijakan mampu merubah keadaan yang dipersoalkan.

Keempat pendekatan tersebut dapat dilakukan untuk menganalisis berbagai pertanyaan penelitian yang muncul sejalan dengan perubahan konteks masyarakat. Topik-topik yang menyangkut perubahan perilaku mobilitas perempuan, seperti orientasi tempat dan pendefinisian batas-batas kultural kaum migran yang jauh dari kampung halaman dapat dilihat dari pengalaman subyektif. Subyektivitas juga dapat dinilai dari cara mereka merepresentasikan masa lalu (sebagai perempuan murahan). Dengan cara yang sama, usaha mencari sistem referensi dalam tindakan kaum perempuan dan perubahan-perubahan konsepsi terhadap berbagai praktek sosial perlu dilakukan. Dengan cara-cara ini pula otoritas subyektif perempuan dalam suatu konteks relasional dan struktural dapat dipahami.

Laki-Laki dalam Studi Perempuan

Istilah studi perempuan yang merupakan terjemahan dari *women studies* mengandung pengertian bahwa perempuanlah yang menjadi peneliti, namun demikian, perkembangannya kemudian justru menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam penelitian cukup besar. Apakah laki-laki perlu terlibat? Pertanyaan semacam itu harus dijawab dengan melihat pada konsep "pengamat partisipan", ketika secara umum pengamat akan memiliki bias-bias karena ia sendiri merupakan partisipan di dalamnya (perempuan yang meneliti perempuan). Hal ini sesungguhnya memunculkan *cultural*

blindness yang akan menghilangkan dimensi penelitian. Namun demikian, dengan cara yang sama dapat juga dikatakan bahwa laki-laki juga memiliki bias karena ia memiliki kepentingan sendiri sebagai laki-laki yang berasal dari *male-dominated community.* Kesadaran tentang posisi sosial yang ditempati oleh peneliti dan posisi ilmiah yang harus diambil peneliti merupakan bagian yang sangat penting di sini.

Sejalan dengan posisi semacam itu dapat dikatakan bahwa kaum perempuan lebih terikat secara emosional dengan berbagai persoalan yang dikaji, yang hal ini telah mengurangi ketajaman kaum perempuan dalam analisis gender. Meskipun dalam proses subyektifitas, perempuan dapat menempatkan dirinya secara lebih baik, tetapi perempuan cenderung tidak sensitif dengan hubungan relasional di luar laki-laki. Dalam analisis kekerasan terhadap perempuan, misalnya, kaum perempuan sendiri cenderung diabaikan sebagai pelaku dari tindakan kekerasan. Oleh karena itu, persoalan perempuan dan peneliti laki-laki yang tidak dibina dengan baik yang menyebabkan tidak terjadinya saling meminjam perspektif dan *point of view* dalam penelitian tentang perempuan. Proses semacam ini dapat dilakukan jika tersedia lembaga yang tangguh dalam studi wanita.

Berdasarkan penjelasan ini, kita perlu bergerak lebih jauh, bukan perempuan yang pelu diberdayakan, tetapi lembaga penelitian (seperti PSW)lah yang perlu diberdayakan agar diperoleh pemahaman dan pemecahan masalah perempuan yang mendalam dan memiliki implikasi kebijakan. Hanya dengan cara ini nasib kaum perempuan dapat diperbaiki ●

Perempuan dalam Wacana Sosial

Bab Dua

Rekonstruksi Gender terhadap Realitas Perempuan

TIDAK Salah jika orang mengatakan bahwa gambaran perempuan yang ideal, sesungguhnya adalah perempuan yang menjadi ibu rumah tangga, dan juga mereka menjadi isteri yang baik. Banyak studi menggambarkan ekspresi semacam ini yang diberikan oleh perempuan, yang menegaskan proses pemberian definisi perempuan sendiri dalam konteks tertentu. Definisi semacam itu adalah definisi yang sangat umum, yang cenderung diberikan oleh sebagian besar orang yang pernah ditanyai tentang sosok perempuan ideal.

Pada saat yang sama, tetangga atau anggota keluarga dari orang-orang yang membangun sosok ideal semacam itu, telah terlibat dalam berbagai proses sosial yang tidak menunjukkan sosok ideal itu lagi. Begitu banyak perempuan desa yang bekerja dalam bidang industri di desa mereka sendiri, tidak sedikit mereka yang sejak

dulu melakukan mobilitas ke luar desa untuk bekerja di industri-industri sekitar, dan tidak terhitung berapa besar jumlah mereka yang keluar desa untuk berdagang di pasar-pasar sekitar. Sebagian perempuan yang lain menjadi pembantu rumah tangga, bekerja sebagai buruh, atau melakukan berbagai pekerjaan kasar di kota karena satu dan lain alasan (BPS, 1992).

Ciri mobilitas perempuan yang begitu tinggi kemudian ditandai dengan mobilitas internasional. Mereka tidak hanya ke kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga ke berbagai negara. Sebagian perempuan desa menjadi TKI yang dikirim ke Arab Saudi, sebagian ke Hongkong, tidak terhitung berapa yang ke Singapura dan Malaysia. Mobilitas perempuan ke daerah Semenanjung merupakan fenomena penting karena proses itu telah berlangsung begitu lama yang mengakar dalam sejarah hubungan Indonesia dengan Malaysia. Tidak begitu jelas berapa jumlah mereka yang tergolong pekerja ilegal yang tidak melalui prosedur resmi saat masuk ke negara tetangga.

Di layar televisi kita melihat perempuan yang penuh gaya, seperti Starlet yang "makin gaya" dari hari ke hari. Perempuan menjadi komoditi dalam mendukung lajunya proses pembentukan peradaban modern. Banyak perempuan sukses dalam bidang ilmu pengetahuan, bisnis dan politik, yang dapat menunjukkan perkembangan penting dalam dunia perempuan.

Siapakah perempuan kita sesungguhnya? Sering dikatakan bahwa ciri paling dominan dari perempuan adalah keterikatan mereka dengan rumah dan keluarga atau dengan lokalitas tertentu karena perempuanlah yang bertanggung jawab dalam bidang domestik. Jika melihat pada perilaku mobilitas perempuan desa, perempuan-perempuan di layar TV, atau perempuan-perempuan yang

sukses, definisi semacam ini perlu dipikirkan kembali.

Apakah sosok perempuan ideal itu seperti Kartini, mbak Tutut, Nike Ardila, Yu Menik, Dewi Motik, Yati Pesek, atau seperti perempuan-perempuan yang kita lihat di layar TV: Perempuan yang pintar, lincah, cantik, seksi, dan sehat? Perbaikan kedudukan dan peran perempuan akankah mengarah kepada apa yang dimiliki oleh orang-orang semacam itu?

Dari Perempuan ke Gender

Pembicaraan mengenai perempuan telah mengalami pergeseran yang cukup mendasar pada saat konsep "gender" digunakan sebagai perspektif. Gender lebih menunjuk kepada relasi di mana laki-laki dan perempuan berinteraksi[1]. Dengan cara ini fokus kajian tidak hanya tertuju pada perempuan tetapi juga pada laki-laki yang secara langsung berpengaruh di dalam pembentukan realitas hidup perempuan. Pendekatan semacam ini telah memberikan nuansa baru, terutama dalam menjelaskan dominasi dan subordinasi atau hubungan-hubungan kekuasaan secara umum yang ternyata memberi pengaruh sangat penting dalam kehidupan perempuan secara luas.

Konsep "perempuan" yang sebelumnya digunakan, cenderung mengisolasi perempuan dari laki-laki sehingga yang diperhatikan lebih kepada "sistem" di mana perempuan mengambil peran. Kecenderungan ini memang telah mengindikasikan perkembangan keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Namun,

[1] Meskipun demikian wanita hanya dapat memasuki sebagian kecil lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang dapat dimasuki oleh pria (lihat Nasikun, 1990).

kecenderungan semacam ini tidak menjelaskan kepada kita perkembangan kualitatif yang terjadi dalam kehidupan perempuan. Penggunaan konsep gender, yang sekaligus merupakan pendekatan dalam melihat kehidupan perempuan, telah memberikan informasi tentang tingkat perkembangan kualitatif yang terjadi.

Namun, para ahli gender terlibat begitu dalam dengan penjelasan-penjelasan dominasi, konflik, dan hegemoni di dalam hubungan laki-laki dengan perempuan. Kecenderungan ini kemudian menunjukkan isolasi-isolasi yang terjadi pada saat perspektif gender ini digunakan dalam mendekati persoalan perempuan[2]. Menanggapi kecenderungan ini Faruk HT menulis: "Mereka menjadi kehilangan kemampuannya untuk melihat kehidupan dalam konteks yang lebih luas dan menyeluruh, dalam mempertimbangkan hubungan antara gender dengan formasi dan pembagian sosial yang lain, hubungan antara gender dengan pandangan dunia suatu masyarakat, dan bahkan hubungan antara perspektif tersebut dengan perspektif yang bahkan jauh lebih luas, yang bersifat esensial dan ekstensial, yang meliputi persoalan *sangkan paraning dumadi* umat manusia secara universal."[3]

Kita membutuhkan sudut pandang alternatif dalam melihat perempuan. Bagaimana kita dapat menjelaskan

---

[2] Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat juga didorong oleh tekanan ekonomi pasar yang mengubah tatanan sosial ekonomi, terutama menyangkut nilai barang dan uang dalam suatu masyarakat.

[3] Perempuan semakin terlibat dalam pekerjaan fisik tidak layak dikerjakan oleh perempuan, seperti buruh angkut di pasar-pasar, buruh pembangunan jalan, buruh jahit (lihat Annisa: Tabloid Opini dan Refleksi Kaum Perempuan, 1993; Ken Suratiah dan Suhatmin Hardyastuti, 1990; Partini, Dewi H. Susilawati, dan Bambang Handoyo, 1990).

kehidupan para perempuan TKW yang dibicarakan pada awal tulisan ini. Atau bagaimana kita dapat mengungkapkan keadaan ibu rumah tangga yang tidak terlibat dalam bidang publik, apakah mereka menikmatinya atau mereka mengeluh. Kita tidak memiliki gambaran yang jelas, seperti juga kita tidak tahu apakah seorang perempuan merasa beruntung atau dirugikan dalam keterlibatannya sebagai perempuan karier. Banyak dimensi yang perlu dijelaskan sehingga begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh perempuan. Di kulit belakang *Dunia Wanita* yang ditulis La Rose, antara lain disebutkan:

> Masalah yang dihadapi kaum wanita kian hari semakin banyak semakin sulit, semakin rumit dan semakin kompleks, karena wanita harus ada di mana-mana, di pabrik, di kantor, di dalam organisasi sosial, bahkan di posisi penting pemerintahan; sementara letak dasar wanita paripurna harus tetap di dalam rumah tangga, di samping suami, di jangkauan anak-anak tercinta, di lingkungan keluarga, di ajang pergaulan sesama manusia. Justru di situ letak masalah, kian hari kian banyak persoalan yang dihadapi, wanita cenderung kian lalai pada fitrahnya (BPS, 1975; BPS, 1989; BPS, 1992).

Menjadi sangat rumit pada saat kita mengharapkan perempuan memainkan berbagai peran sekaligus. Perempuan ideal kemudian menjadi *superwoman* yang memiliki kapasitas yang dapat mengisi bidang domestik dengan sempurna dan bidang publik dengan baik. Posisi laki-laki di sini tampak cenderung tidak digugat, seolah-olah tidak ada yang perlu disalahkan dengan posisi laki-laki pada gugus yang dominan selama ini.

Dominasi Struktur Patriarkhal

Melihat kenyataan tentang mobilitas perempuan yang sesungguhnya bukan merupakan fenomena baru, kita perlu memikirkan kembali keabsahan wacana tentang perempuan sebagai makhluk yang lemah, pasif, dan mempunyai orientasi lokal. Perempuan dalam berbagai kasus lebih mobil dibandingkan laki-laki, lebih aktif dalam berbagai aktivitas, dan terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan. Subordinasi perempuan jangan-jangan hanya merupakan retorika karena kesalahan representasi bahwa perempuan tersubordinasi dalam suatu struktur yang patriarkhal.

Sejalan dengan ini kita dapat juga melihat kesalahan yang terjadi dalam wacana yang dibangun oleh kaum feminis (Illich, 1982; Molo, 1993). Kaum feminispun cenderung tidak dapat memahami perempuan, meskipun mereka berusaha mewakili kaum perempuan. Kaum feminis yang memiliki *"kesadaran sejati"* yang berusaha mentransformasikan *"kesadaran semu"* para perempuan kebanyakan, sesungguhnya telah menjadi laki-laki[4] Mereka berkaca pada kekuatan-kekuatan mereka sendiri yang merupakan kekuatan "segelintir" orang yang memiliki kapital sosial dan kapital ekonomi untuk menjadi perempuan seperti yang diinginkan oleh mereka sendiri.

[4]Pembagian struktur yang menempatkan perempuan dalam bidang domestik dan laki-laki dalam bidang publik sesungguhnya merupakan struktur yang membedakan wilayah kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena bidang publik dianggap sebagai bidang yang lebih penting didalam keseluruhan proses sosial maka perempuan cenderung terubordinasi karena ia menempati bidang yang kurang penting. Statistik resmi yang tidak menghitung keterlibatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi.

Wacana "perempuan yang lemah" begitu dominan dalam kehidupan sehari-hari dan hal ini telah direproduksi demikian intensif dalam proses subordinasi perempuan, termasuk oleh kaum feminis. Dominasi dan subordinasi memang merupakan proses penting bahwa hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan ditegaskan terus menerus (Oppenheimer, 1977; West dan Zimmerman, 1991, Illich, 1982). Namun di sini kecenderungan kita menempatkan perempuan sebagai pihak yang tersubordinasi menyebabkan kita kehilangan "dimensi lain" dalam menjelaskan realitas kehidupan perempuan. Dominasi dan subordinasi sesungguhnya adalah proses konstruksi (aktif) yang berlangsung terus-menerus, sehingga seharusnya bukan status dominan atau subordinat yang perlu dibicarakan, melainkan proses-proses yang menyebabkan perlu adanya dominasi. Mengapa laki-laki merasa perlu dominan.

Dalam struktur yang hegemonik sekalipun, sesungguhnya perempuan melakukan pilihan bagi hidupnya. Perempuan bukan pihak yang menerima begitu saja kenyataan hidup (Vucht, 1991; Rosaldo, 1974). Struktur yang hegemonik tidak lahir begitu saja, tetapi melalui proses yang juga tidak hanya melibatkan laki-laki dan perempuan, melainkan juga berbagai faktor lain di luar laki-laki dan perempuan, yang juga terikat pada suatu struktur kepentingan. Dalam pembentukan hegemoni telah terjadi interaksi, negosiasi, dan pengambilan keputusan yang kemudian menempatkan perempuan pada struktur hubungan tertentu. Di sini dapat saja dikatakan bahwa perempuan dikalahkan dalam struktur yang hegemonik tersebut, namun yang penting mengapa perempuan mau dikalahkan atau mengapa perempuan mengalah? Bukankah "mengalah" belum tentu berarti "kalah"?

Pada saat kita membicarakan dimensi semacam ini sesungguhnya kita mulai membicarakan perspektif, bahwa kita berdiri memandang realitas kehidupan perempuan. Dalam sudut pandang ini, apakah kita sudah berdiri pada sudut pandangan yang tepat atau apakah kita sudah melihat dari beberapa sudut pandang? Kecenderungan yang dapat diamati bahwa perspektif perempuan sendiri tidak digunakan dalam menjelaskan "apa maunya" perempuan itu, sehingga kita tidak mengetahui secara mendalam keinginan-keinginan perempuan. Menarik untuk dikutip keluhan yang pernah ditulis Marlyn Monroe dalam sebuah memoirnya:

> Waspadalah terhadap kemasyhuran, waspadalah terhadap pujian yang disampaikan orang atas permainan di film. Saya adalah wanita yang paling malang di atas bumi ini. Karena saya tidak dapat menjadi seorang ibu, saya rindu pada rumah tangga yang bahagia. Kehidupan bersuami-isteri itulah lambang kebahagiaan seorang wanita. Bahkan, kebahagiaan bagi segenap umat manusia. Bekerja sebagai artis bagi wanita ibarat barang dagangan yang murah. Ia tidak mempunyai nilai yang luhur. Meski ia mendapatkan kejayaan dan kemasyhuran yang gemilang (MacCormack, 1980).

Ungkapan perasaan Monroe hanya merupakan satu sisi dari bagaimana perempuan memandang dirinya dan memandang hidupnya yang dapat menegaskan kepada kita perlunya melihat perspektif perempuan dalam menjelaskan realitas perempuan itu sendiri.

Kesalahan utama yang dilakukan oleh politisi, peneliti, dan kaum feminis adalah mereproduksi struktur patriarkhal dengan menekankan wacana ketimpangan gender, perempuan sebagai makhluk yang lemah, keter-

Bab Tiga

Rimba Lelaki dan Kematian Perempuan: Tubuh Perempuan dalam Iklan

... saya kepinginnya tidak diperhatikan dengan cara seperti ni.
Saya ingin diperhatikan karena prestasi saya
(Tamara Bleszynski, dalam Bintang, No. 282, Juli, 1996, hlm.vi).

Potret Perempuan dalam Iklan

PEREMPUAN sesungguhnya bukan hanya menghadapi musuh lama (laki-laki), tetapi musuh baru yang jauh lebih perkasa, yakni kapitalisme. Laki-laki bahkan telah dimanfaatkan oleh kapitalisme untuk bersama-sama melestarikan struktur hubungan gender yang timpang. Pelestarian ketimpangan hubungan itu tidak hanya menyebabkan perempuan semakin tersubordinasi, tetapi juga menyebabkan terjadinya subordinasi perempuan oleh

perempuan sendiri. Hal ini tampak dari posisi yang ditempati perempuan dalam iklan di mana di satu sisi perempuan merupakan alat persuasi di dalam menegaskan citra sebuah produk dan di sisi lain perempuan merupakan konsumen yang mengkonsumsi produk kapitalisme (Fine & Leopold, 1993: 208). Dua posisi ini telah mentransformasikan tidak hanya kehidupan perempuan yang terlibat dalam iklan dan perempuan yang diacu dalam iklan, tetapi telah menata ulang keseluruhan hubungan dan tatanan sosial dalam suatu masyarakat, termasuk pola hubungan gender.

Iklan sebagai ruang gerak baru bagi perempuan telah memungkinkan perempuan untuk mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri. Keseluruhan konsep perempuan kemudian mengalami transformasi dari perempuan sebagai orang yang terlibat dalam kegiatan domestik, sebagai pekerja keluarga, atau sebagai masyarakat *second class* menjadi perempuan yang lebih otonom dan penuh kebebasan. *Economic capital* yang dimiliki perempuan menentukan hubungan-hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki dan antar perempuan sendiri. Dunia iklan bagi perempuan telah menjadi basis politik emansipasi (Giddens, 1984) dalam usaha perempuan ke luar dari ikatan-ikatan tradisional dan masa lalu. Namun demikian, dunia iklan berorientasi pada kelompok tertentu sehingga kelompok (perempuan) yang tidak memiliki akses mengalami subordinasi.

Keberadaan perempuan dalam iklan ini sesungguhnya juga menggelisahkan perempuan lain, karena produk yang ditawarkan oleh sebuah iklan telah membangkitkan fantasi begitu banyak perempuan lain terhadap produk mengingat perempuan merupakan kelompok pembelanja terbesar (Courtney & Whipple, 1983: 69).

Kegelisahan berawal dari kondisi ekonomi yang bervariasi antarorang yang menyebabkan terjadinya proses konsumsi simbolik secara meluas. Kelompok yang tidak memiliki kapital ekonomi dan yang tidak dapat mengkonversikan kapital sosial dan kapital kebudayaan menjadi kapital ekonomi tidak terlibat dalam proses konsumsi real. Proses konsumsi simbolik yang diakibatkan oleh iklan merupakan sesuatu yang membahayakan pada saat akumulasi hasrat (*desire*) terhadap suatu produk mencapai tingkat yang tak terkendalikan sementara kapital tidak tersedia dengan cukup. Pemanfaatan fasilitas kredit pun tidak dapat dilakukan oleh kelompok yang tidak memiliki akses. Kelompok yang tidak memiliki kekuatan kendali diri karenanya akan menjadi kelompok masyarakat mengambang (*floating mass*).

Kehadiran perempuan dalam iklan juga telah mentransformasikan tatanan kehidupan secara meluas: nilai tentang gaya dan cara berpakaian yang lebih bervariasi, seperti nilai *sexiness* dari sebuah pakaian yang diiklankan; nilai hubungan laki-laki dan perempuan yang lebih terbuka (seperti tampak dalam berbagai iklan penyegar mulut); atau nilai kemewahan dalam gaya hidup (seperti hadirnya berbagai perangkat modernitas, dari mobil, *handphone,* hingga cincin berlian *De Beers*), yang semua itu menegaskan nilai autentik kehadiran seseorang.

Implikasi di atas muncul berkaitan dengan kecenderungan iklan memotret aspek tertentu dari perempuan, yakni bentuk tubuh, keindahannya, dan kesegaran tubuh. Selain merupakan faktor penting dalam seleksi sosial, keterlibatan perempuan dalam dunia periklanan juga menjadi faktor dominan dalam sosialisasi nilai, khususnya nilai tentang "kewanitaan". Untuk itu pendapat

Deborah Lupton menarik dicatat pada saat ia mengatakan bahwa iklan-iklan pada dasarnya menggunakan tubuh perempuan untuk membangkitkan daya tarik erotik terhadap suatu produk (Lupton, 1994: 36). Bagaimana kecenderungan ini dapat diinterpretasikan, apa hubungan keterlibatan perempuan tersebut dengan proses emansipasi, dan apakah hal itu merupakan suatu kelanjutan dari suatu bentuk penindasan? Masalah-masalah ini akan dibicarakan dalam tulisan ini. Sebelum sampai ke sana, terlebih dahulu dipaparkan tentang mengapa tubuh menjadi domain yang penting untuk dibicarakan. Dan mengapa penekanan pada penampilan tubuh seperti *sexiness,* merupakan hal yang ditonjolkan dalam "memotret" perempuan.

Menuju Tubuh Ideal, Suatu *Hysteria*

Meskipun konsep pengelolaan tubuh bukanlah merupakan hal yang baru dalam kehidupan perempuan, tetapi intensitas dan kompleksitas pengelolaan tubuh merupakan gejala penting sejak akhir tahun 1980-an. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan pasar di mana Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari proses perkembangan global. Integrasi Indonesia ke dalam struktur ekonomi global yang dapat dilihat dari berbagai kebijaksanaan deregulasi dan kebijaksanaan integrasi ekonomi seperti GATT, WTO, APEC telah menciptakan suatu kondisi dan kesadaran tentang Indonesia sebagai bagian dari sistem (ekonomi) global. Munculnya pusat perbelanjaan di berbagai tempat, yang seringkali melibatkan modal asing, telah memungkinkan diperolehnya berbagai produk global di dalam negeri. Kecen-

derungan ini dengan mudah diamati dalam bidang pengelolaan tubuh dengan masuknya berbagai produk dan praktik pengelolaan, seperti berbagai produk kosmetika dan alat senam kebugaran.

Dalam salah satu iklan di media cetak tertulis: "Satu-satunya di Indonesia. Cara perawatan kulit tercanggih di Jepang, Eropa dan Amerika kini di Meicy." *Meicy International Skin Care Centre* merupakan pusat perawatan kulit yang mengiklankan produknya dalam berbagai media cetak. Lebih lanjut tertulis, "Apabila anda melihat seseorang muda kembali tiba-tiba, jangan tanyakan rahasia itu kepadanya, karena jawabnya ada di tangan kami". Berbagai agen menawarkan berbagai produk pengelolaan tubuh dalam berbagai media. Iklan yang dipasang oleh *LSC Beauty Center,* misalnya, menawarkan cara-cara *menanggulangi kelainan kulit,* menyediakan pelayanan *facial care, body slimming, baby skin renewal,* dan lain-lain.

Pengelolaan tubuh menjadi demikian rinci dewasa ini. Dari perawatan rambut, alis, mata, bulu mata, hidung, bibir, mulut, kulit, kuku, lengan, perut, buah dada, pinggul, betis, kaki, dan bahkan bulu kaki. Berbagai produk dan praktik dikenakan dalam mengelola bagian tertentu untuk mendapatkan bentuk atau penampilan yang diinginkan. Berbagai kemungkinan yang disediakan di dalam pengelolaan tubuh meliputi: menghilangkan lemak, menurunkan berat badan, menghilangkan reumatik, merampingkan tubuh atau pinggang, memperindah bentuk pinggul dan pantat, mengatasi kebotakan, menyuburkan dan menyehatkan alis mata, mengatasi varises, menghilangkan jerawat dan noda hitam (*fleckles*), serta menyehatkan dan meremajakan kulit. Semua bentuk dan jenis perawatan tersebut dapat diperoleh

dengan mudah dan semakin mudah dari waktu ke waktu.

Pusat-pusat kebugaran (*fitness centres*) telah menjadi agen yang menegaskan ukuran-ukuran tubuh ideal. Secara meluas latihan kebugaran telah menjadi *hysteria* yang melanda berbagai lapisan, baik dengan keterlibatan di pusat-pusat kebugaran, yang melakukan senam dalam kelompok terbatas, maupun yang mempraktikan secara individual. Di ANTV setiap pagi ditayangkan berbagai jenis senam kebugaran untuk berbagai kepentingan. Banyak orang yang secara sadar menjalankan diet dengan cara membatasi makan atau berhati-hati dalam memilih jenis makanan untuk menjaga kesehatan (Turner, 1984). Pusat-pusat perawatan tubuh, seperti *Marie France Bodyline* dan *Impressions Body Care Centre,* atau perawatan kulit, seperti *Meicy International Skin Care Centre,* telah menjadi bisnis yang cukup besar yang menunjukkan betapa permintaan terhadap pelayanan kesehatan dan kecantikan sedang menuju ke satu titik puncak. Tidak terhitung jumlah obat yang diproduksi untuk mengikis lemak, seperti *Newshape,* suatu kapsul yang dapat mempercepat pembakaran lemak atau *Body Specific,* krim *three in one* yang berfungsi melangsingkan, mengencangkan, sekaligus melembabkan kulit. Tidak terhitung berapa jumlah krim lain yang tersedia di pasar yang berfungsi untuk meremajakan kulit, menghilangkan noda-noda hitam, menghilangkan bekas luka, dan mengatasi sengatan sinar matahari, hingga menghilangkan bau badan. Dewasa ini produk-produk seperti *slimming tea* yang dikenal secara meluas menunjukkan betapa pengelolaan tubuh telah diintegrasikan dalam kehidupan rutin. Ada berbagai jenis obat yang berfungsi untuk meningkatkan vitalitas dan daya tahan tubuh,

bahkan ada obat khusus untuk para eksekutif yang terbuat dari gandum, tablet berwarna hijau yang diberi nama *Pines Wheat Grass.*

Secara umum dapat dilihat bahwa masyarakat semakin *concern* terhadap perawatan kesehatan, pembentukan, dan penampilan tubuh. Bentuk tubuh merupakan syarat atau faktor dominan di dalam berbagai pertukaran sosial. Penerimaan sosial dan batas-batas hubungan sosial dipengaruhi oleh bentuk tubuh seseorang, yang itu menjadi ukuran menarik tidaknya seseorang. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa cantik bukanlah syarat terpenting, laki-laki masa kini lebih menyukai perempuan seksi (*Jawa Pos,* 16 mei 1994). Keindahan tubuh, seksual dan sensual dapat diperoleh dengan latihan, perawatan bagian-bagian tubuh secara teratur, dan menggunakan berbagai produk yang tersedia. Besarnya perhatian masyarakat dan alasan-alasan yang mendasari kecenderungan perawatan tubuh merupakan masalah yang menarik. Hal ini terutama menyangkut alasan-alasan tentang meningkatnya kesadaran individu di dalam perawatan kesehatan dan kecantikan. Usaha-usaha pengendalian, pengaturan, dan penertiban tubuh menjadi bagian dari gejala sosial yang dikuatkan keberadaannya oleh institusi-institusi pendukung. Fakta ini sangat menarik diperhatikan, terutama menyangkut bagaimana kedudukan perempuan dalam kecenderungan estetisasi tubuh tersebut. Apakah perempuan menjadi lebih terhormat sejalan dengan "mencantiknya", atau itu menandakan suatu cara pengelolaan kekuasaan yang lebih canggih dalam subordinasi perempuan?

Pengelolaan dan pengendalian tubuh bagaimanapun sangat terikat pada ukuran-ukuran nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Tubuh juga dianggap para ahli

sebagai alat yang penting di dalam identifikasi sosial (Giddens 1984; Turner 1984). Bukan hanya keberadaan seseorang di suatu tempat ditentukan oleh ada tidaknya tubuh di tempat itu, tetapi juga ciri-ciri tubuh dapat menjadi alat penting di mana dalam menjelaskan "keberadaan" seseorang. Oleh karena itu, seseorang merasa perlu mendapatkan bentuk atau penampilan tertentu dari tubuh untuk tampil dalam berbagai kegiatan sosial. Kecenderungan perawatan (seperti pengendalian berat badan dan ketuaan) merupakan tanda penting dari perubahan di dalam pendefinisian diri dan kehidupan secara mendasar.

Sejalan dengan makna tubuh ini, Deborah Lupton mengatakan bahwa tubuh merupakan metafor bagi organisasi dan kegelisahan sosial, yang merupakan bidang utama dari kegiatan kebudayaan dan politik (Lupton 1994). Bentuk-bentuk organisasi yang berusaha mengatur, mengendalikan, dan menertibkan tubuh selain bersifat kebudayaan juga bersifat politis. Perangkat nilai dan kelembagaan dibutuhkan untuk mengatur, mengendalikan, mendisiplinkan, dan menertibkan tubuh sehingga tubuh di satu pihak bertingkah laku sesuai dengan batasan-batasan dan di pihak lain tubuh dirawat untuk menghasilkan kesehatan, bentuk dan penampilan tertentu. Dalam aspek yang pertama pemerintah dan institusi-institusi yang mengatur masalah moral memiliki kepentingan di dalam penertiban tubuh sehingga pendidikan, militer, penjara, atau undang-undang dibentuk untuk mengendalikan gerak-gerik tubuh. Aspek yang kedua lebih merupakan konstruksi sosial ekonomi yang sangat terkait kepada metode konsumsi dan ekspresi penduduk yang sangat dipengaruhi oleh institusi-institusi pasar.

Usaha mengelola tubuh yang ideal menjadi de-

mam masyarakat yang tidak hanya mempengaruhi praktek merawat tubuh, tetapi mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap potret perempuan. Perempuan diharapkan tampil dengan ukuran-ukuran (tubuh) yang diidealkan secara sosial yang karenanya menunjukkan tekanan-tekanan sosial yang intensif terhadap keberadaan perempuan. Nilai-nilai dan ukuran-ukuran telah ditetapkan dan setiap orang, tidak terkecuali perempuan, siap melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan karena dimungkinkan secara sosial dan keabsahannya tidak dipertanyakan.

Dominasi Kapitalisme atas Lelaki dan Perempuan

Keberadaan perempuan seperti yang terlihat dalam iklan tampaknya ditentukan oleh serangkaian hubungan yang rumit. Tubuh yang merupakan bagian paling private dari seorang perempuan telah menjadi milik publik yang tampak dari cara tubuh perempuan ditampilkan. Iklan yang menonjolkan bentuk, penampilan, dan keindahan tubuh ditayangkan ke rumah-rumah dan ke berbagai tempat publik di mana proses belajar berlangsung. Pada saat terjadi pergeseran dari dunia private ke publik terjadi pula pergeseran citra tentang perempuan, namun yang menarik adalah proses ini tidak menyebabkan terbentuknya potret perempuan yang baru, tetapi lebih merupakan "penegasan kembali" potret lama di mana perempuan merupakan obyek seks (Abdullah, 1996). Seksisme karenanya menjadi semakin menguat. Secara umum perempuan lebih sering ditampilkan sebagai "ibu", sementara laki-laki ditampilkan sebagai figur yang bebas (bukan sebagai "ayah"). Apa yang digambarkan Courtney & Whipple dapat menegas-

kan kecenderungan semacam ini:

> *Like the adult female, the girl in commercials plays a stereotyped role. Girls are portrayed as more passive than boys. They are shown learning house hold tasks and ways to become beautiful. They are not shown learning how to become independent and autonomous (Courtney & Whipple, 1983: 23).*

Di sini memang terjadi pergeseran dalam menampilkan *image* perempuan dari obyek seks ke sifat glamor dan kebebasan, namun ini lebih disebabkan oleh kepentingan produk di mana sifat perempuan yang ditampilkan disesuaikan dengan produk yang ingin diiklankan, bukan usaha langsung untuk memotret kebebasan dan kemampuan perempuan. Oleh karena itu, iklan telah menjadi penghambat dalam perkembangan peran perempuan (Fine & Leopold, 1993: 210), khususnya karena ia melestarikan citra perempuan sebagai obyek seks, ibu dan istri yang baik, atau orang yang melayani kepentingan umum.

Dalam hal ini perempuan sesungguhnya disubordinasikan oleh sebuah sistem dan struktur yang kokoh, yang antara lain dibangun oleh kapitalisme. Kapitalisme sebagai sebuah sistem telah membentuk struktur-struktur di mana perempuan ditempatkan pada posisi yang lemah. Dalam struktur yang berisi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam produksi sebuah iklan, subyek tidak memiliki kekuatan. Kepentingan pasar menjadi suatu ideologi dalam keseluruhan proses produksi iklan di mana setiap orang tunduk pada kepentingan-kepentingan pasar, khususnya dalam meningkatkan daya saing suatu produk. Dalam hubungan semacam ini terjadi pembentukan etos dan etika kerja yang menjadi

motor penggerak dan rambu-rambu di dalam proses produksi sebuah iklan. Laki-laki maupun perempuan sama-sama tersubordinasi oleh sistem yang telah terbentuk tanpa bisa digugat. Hanya saja, perempuan di sini merupakan komoditi yang memiliki kemungkinan yang luas untuk digunakan dalam proses distribusi barang bukan karena sifat-sifat kewanitaan mereka, tetapi karena struktur berpikir dan tata nilai yang ada dalam masyarakat yang telah melihat perempuan sebagai obyek (Mac Cormack, 1980; Lorber 1991; Moore, 1994).

Penempatan laki-laki sebagai "subyek" dan perempuan sebagai "obyek" merupakan pemosisian yang dilestarikan dalam berbagai bentuk wacana. Wacana yang dibangun oleh para artis sendiri menarik untuk disimak karena dapat memperlihatkan bagaimana perspektif "designer" dalam mempersepsikan perempuan, laki-laki, dan masyarakat. Untuk itu saya ingin mengutip apa yang dikatakan Harry Topan, produser sinetron Kembalinya Si Manis Jembatan Ancol (KSMJA), dalam tabloid *Bintang*:

> "Sekarang, saya berkutat menyelesaikan 104 episode, durasi 30 menit. Tapi, saya tidak mau sekadar ada. Harus ada peningkatan kualitas ... Konsep Diah sebagai setan cantik, seksi semakin diperkuat ... Mereka tampil menonjol dengan pakaian yang mereka kenakan. Saya berpikir sederhana, orang menonton televisi untuk mendapatkan hiburan dan melihat keindahan ... Dengan konsep KSMJA sekarang ini, siapa saja bisa menonton, dari ibu-ibu yang pada dasarnya senang ditakuti, anak-anak kecil yang suka komedinya, juga lelaki yang senang menyaksikan kecantikan dan keseksian Diah dan Suci" (*Bintang*, No. 281, Juli 1996, hlm. vi).

Kutipan ini memperlihatkan bagaimana konsep "seksi" ditonjolkan dalam pembicaraan publik, khususnya dalam menegaskan apa yang disukai oleh lelaki. *Sexiness* telah menjadi konsep yang sangat dominan pada saat orang membicarakan perempuan. Mengapa konsep "kualitas" di mata Harry Topan (mungkin juga di mata kita) berkaitan dengan komodifikasi (tubuh) perempuan. Penekanan semacam ini, sayangnya, bukan hanya ditegaskan oleh laki-laki, tetapi juga oleh perempuan. Persaingan Kiki Fatmala dengan Diah Permatasari, misalnya, telah menyebabkan pelebaran wilayah normatif. Hal ini bisa dilihat dari apa yang dikatakan Diah Permatasari:

> Si Manis selalu mengenakan pakaian mini yang seksi. Saya tahu, yang menonton Si Manis nggak cuma ibu-ibu, tapi juga banyak lelaki. Saya tahu, mereka mungkin tidak terlalu peduli dengan cerita atau kelucuan. Bisa jadi, mereka lebih konsentrasi menatap keseksian tubuh saya ... Selama keseksian itu bisa menghibur dan menyenangkan orang lain kenapa tidak (Bintang, No. 281, Juli 1996, hlm. ix).

Kalaulah dikatakan bahwa iklan bersifat eksploitatif karena memotret perempuan dari bentuk luarnya (tubuh), hal itu banyak disebabkan oleh sikap perempuan sendiri. Perempuan dalam banyak kasus melonggarkan batas-batas moral dalam berkompetisi di antara mereka sendiri. Arena sosial sesungguhnya tidak hanya merupakan arena subordinasi perempuan oleh laki-laki tetapi juga arena konflik antar kaum perempuan.

Kompetisi yang muncul di kalangan perempuan memang disebabkan oleh sistem dan struktur yang kapitalistik di mana konsep uang, harga, dan kompetisi telah

begitu kuat merasuk ke dalam alam bawah sadar masyarakat yang kemudian merupakan kekuatan simbolik yang mendorong perempuan untuk terlibat dalam berbagai pertukaran sosial yang mengharuskannya mengorbankan sisi-sisi terpenting dari keberadaannya sebagai perempuan.

Penutup: Kematian Perempuan

Proses dominasi kapitalisme telah menegaskan dua hal. *Pertama,* terjadinya apa yang dikatakan Fuocault sebagai *the death of the subject.* Dalam hal ini perempuan sebagai subyek telah mati, di mana ia tidak lagi dapat mengendalikan dirinya sendiri, tetapi telah dikendalikan oleh ideologi dan kepentingan pasar. Bagi Irigaray bahkan perempuan dianggap *"not knowing what she wants"* (Rojek & Turner, 1993: 95). Kepentingan-kepentingan pasar pun telah menjadi kekuatan yang dominan di dalam kehidupan sosial yang tampak dari kecenderungan orientasi ke kebudayaan konsumen, di mana aktivitas konsumsi menjadi panglima kehidupan. Dan perempuan sesungguhnya merupakan produk dari kehidupan sosial tersebut sehingga ia tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan dan harapan-harapan umum yang ingin melihat perempuan sebagai obyek. Perempuan sesungguhnya tidak punya kesempatan untuk memilih karena pilihan-pilihan selalu telah ditentukan sebelumnya dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih menguntungkan pihak "lain".

Kedua, kemungkinan-kemungkinan yang diberikan dalam dunia iklan sesungguhnya juga merupakan basis politik emansipasi. Namun demikian, basis ini

tidak cukup kuat untuk melakukan emansipasi perempuan terhadap laki-laki dan struktur patriarkhal. Kelompok perempuan yang secara aktif terlibat dalam dunia publik hanya mampu melakukan emansipasi terbatas untuk kelompoknya sendiri, dengan cara mensubordinasi kelompok perempuan lain yang tidak memiliki akses dan kapital kebudayaan (seperti tubuh) yang menjadi prasyarat keterlibatan sosial. Gerakan emansipasi perempuan karenanya harus mengarah pada pemberdayaan perempuan untuk merubah sistem dan struktur patriarkhal, bukan untuk melawan lelaki.

Kecenderungan memotret perempuan dari tubuhnya telah menjauhkan kita dari realitas, karena yang dipresentasikan dari seorang perempuan hanyalah citra, bukan sesuatu yang riil. Kecenderungan semacam ini telah pula menegaskan dimensi estetika dari subyek yang menyebabkan terabaikannya dimensi etika yang jauh lebih produktif. Iklan telah menegaskan sifat-sifat estetika dengan menghadirkan keindahan, kelembutan, keseksian, kecantikan, yang semua itu direkam dari bentuk dan penampilan tubuh perempuan. Perempuan sebagai subyek yang memiliki potensi intelektual, yang memiliki kapasitas individual yang beragam di dalam dirinya, tidak mendapatkan perhatian. Keluhan Tamara Bleszynski di atas menunjukkan suatu *longing* (kerinduan) untuk dinilai dan ditempatkan sesuai dengan "prestasi" dan kapasitasnya sebagai manusia. Dan kerinduan itu (seperti umumnya sebuah kerinduan) hampir tidak pernah terwujudkan. Hanya perubahan sistem, seperti lembaga-lembaga yang mengarah kepada pengaturan hak dan kewajiban yang adil, yang mampu mewujudkan keinginan Tamara dan jutaan perempuan lain. Apalagi perubahan sistem tidak akan datang dari dalam karena

kepentingan-kepentingan akan mereproduksi struktur hubungan gender yang hegemonis. Laki-laki atau perempuan dengan sifat laki-laki sebagai pelaku di dalamnya.

Jika kita kemudian berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan, maka bukanlah pemukulan, perkosaan, atau beban fisik yang dialami perempuan yang perlu diperhatikan. Keseluruhan wacana publik yang dibangun oleh berbagai agen sosial adalah kekuatan dahsyat yang melahirkan berbagai bentuk kekerasan itu karena ia telah membangun sebuah dunia yang gelap di mana hantu-hantu (laki-laki dan perempuan) siap memangsa kaum perempuan ●

Bab Empat
Seks, Gender dan Reproduksi Kekuasaan

Representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their own point of view, which they confuse with absolute truth (Simone de Beauvoir, cf. Firestone, 1972: 156).

Perempuan dan Seks

BERBAGAI bentuk ketimpangan di dalam praktik seksual terjadi secara meluas dari pemaksaan hubungan seksual, praktik menjual perempuan kepada orang lain, hingga perilaku *jajan* laki-laki yang secara langsung menunjukkan betapa perempuan tidak mendapatkan hak monogami yang seharusnya diperoleh. Kita belum lupa pada kasus Yudhi yang divonis satu tahun karena menjual istrinya, Rini Sundari, dengan tarif minimal 300 ribu rupiah sekali pakai. Hasil "penjualan" itu digunakan Yudhi untuk berfoya-foya. Hal itu belum cukup karena Yudhi juga kemudian ringan tangan, memukuli istrinya yang mendatangkan uang itu (lihat *Gatra*, 4 Maret 1995). Begitu banyak cerita serupa ditulis di media massa,

begitu banyak film di TV atau bioskop yang menceritakan kisah-kisah perkosaan atau kisah-kisah yang berhubungan dengan seksualitas yang mengganggu kehidupan para perempuan, begitu banyak pula wacana yang hadir dalam kehidupan sehari-hari yang mereproduksi tatanan-tatanan sosial tempat perempuan merupakan "obyek seks".

Dalam berbagai rubrik majalah, perempuan mengeluh terhadap tindakan suaminya dalam melakukan hubungan seks ketika sang suami sering memaksa meskipun istri sedang tidak siap melakukannya. Belum lagi keluhan tentang hubungan seks yang tidak dapat dinikmati oleh perempuan. Dalam berbagai hal perempuan juga tidak mendapatkan haknya sebagai satu-satunya orang yang digauli oleh suami mereka karena perselingkuhan yang dilakukan oleh suami. Demikian pula praktik *jajan* yang dalam berbagai laporan dinilai sebagai kebiasaan laki-laki. Hotman Siahaan dan Tjahjo Purnomo pada tahun 1988, misalnya, melaporkan bahwa presentase laki-laki yang menyeleweng jauh lebih besar daripada perempuan. Kalau dilihat hubungan seks sebelum nikah, presentase laki-laki yang melakukannya sekitar 72 persen, dibandingkan perempuan sebesar 19,2 persen (*Suara Karya,* 19 Mei 1995). Sejak remaja laki-laki lebih *permisif* dan lebih terbuka terhadap praktik seks. Berdasarkan penelitian di Bali dan Yogyakarta, Helly Sucipto dan Faturochman menunjukkan bahwa 18,1 persen remaja laki-laki pernah melakukan hubungan seks, dibandingkan dengan 1,7 persen remaja putri (Sutjipto dan Faturochman, 1989: 69). Itu pun belum cukup, laki-laki masih menuntut keperawanan pada saat ia menikahi seorang perempuan.

Gambaran hubungan laki-laki dan perempuan ini

telah menjadi realitas sosial yang terbentuk secara historis oleh berbagai proses sosial, yang kemudian menjadi suatu susunan kekuasaan tempat perempuan berada pada posisi yang tersubordinasi di dalam kehidupan seksual (Firestone, 1972). Perempuan di sini tampak harus memenuhi segala macam standar yang ditentukan oleh laki-laki (atau oleh struktur yang menguntungkan laki-laki). Nilai standar itu merupakan realitas obyektif yang meminta kepatuhan-kepatuhan sehingga menjadi praktik yang terus-menerus berulang di dalam kehidupan sosial.

Kepatuhan-kepatuhan sosial perempuan tidak terlepas dari ideologi *nature* dan *culture* atau obyek dan subyek yang perempuan ditempatkan sebagai obyek dalam dunia laki-laki (*culture*) (Mac Cormack, 1980; Rosaldo, 1983). Dari sini dapat diinterpretasikan bahwa laki-laki telah menegaskan dan melestarikan kekuasaannya melalui berbagai instrumen, termasuk melalui seks. Seks memang telah menjadi wilayah penting tempat hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan dipraktikkan dan diuji (Foucault, 1990). Persoalannya kemudian adalah, mengapa laki-laki harus mensubordinasi perempuan dan mengapa ia "takut" bahwa perempuan akan merebut kekuasaan itu? Apakah hal ini berkaitan dengan apa yang dikatakan Simone de Beauvoir bahwa laki-laki yang membangun dunia sehingga ia ingin menjaganya dari gangguan perempuan. Akan tetapi, mengapa perempuan dianggap sebagai pihak yang potensial untuk mengganggu kekuasaan itu? Sebelum sampai kepada jawaban pertanyaan tersebut, terlebih dahulu akan dibicarakan posisi perempuan sebagai obyek dalam berbagai pertukaran sosial tempat laki-laki mempraktikkan kekuasaannya.

Perempuan Sebagai Obyek Pertukaran Sosial

Setiap wacana yang dibangun cenderung mereproduksi ketimpangan, yang menegaskan kembali hak-hak perempuan yang paling nyata, yang dipelajari bukan hanya dari sistem nilai yang ada, tetapi yang dipelajari dari praktik-praktik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Proses pemaknaan berlangsung pada saat interaksi terjadi dalam kehidupan seksual, setiap orang belajar dari praktik-praktik yang umum dilakukan dan mendapatkan pengesahan sosial (Berger, 1979; Solomon, 1988). Dalam proses eksternalisasi, manusia memberi arti dan interpretasi terhadap perbedaan biologis laki-laki dan perempuan yang kemudian melahirkan suatu struktur yang bias *gender* dengan pembagian-pembagian hak dan kewajiban secara seksual. Hal ini kemudian menjadi realitas obyektif yang memiliki daya paksa terhadap manusia yang semula menciptakannya. Demikian pula kemudian, kata Peter Berger (1991: 19), setiap orang diperkenalkan pada makna-makna budaya, belajar ikut serta dalam tugas-tugas yang sudah ditetapkan dan menerima peran-peran selain menerima identitas-identitas yang membentuk struktur sosialnya.

Secara biologis perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang berbeda. Perbedaan itu mendapatkan artikulasi kultural yang menghasilkan anggapan bahwa perempuan merupakan makhluk yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Kelemahan (biologis) perempuan secara jelas dimanfaatkan oleh laki-laki di dalam praktik seksual yang tidak sehat dan ini sesungguhnya merupakan penegasan terhadap dominasi lelaki, suatu hubungan kekuasaan yang tersusun secara sosial. Dominasi semacam ini menjadi gambaran umum dalam berbagai praktik kehidupan yang melibatkan laki-laki dan

perempuan. Mien Sugandi, Menteri Urusan Peranan Wanita, karenanya pantas untuk gelisah ketika menemukan kecenderungan bahwa ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan direproduksi di dalam berbagai media. "Saya benci sekali dengan sinetron-sinetron kita yang tidak bermutu sama sekali yang semuanya memojokkan peran wanita," kata Menteri (*Angkatan Bersenjata*, 18 mei 1995). Perempuan dalam wacana semacam itu hanya dijadikan komoditi yang mati, ditempatkan di pihak yang salah, dan selalu menjadi masalah yang meresahkan masyarakat.

Imaji tentang seks yang menjadi bagian dari perempuan dibangun dan dikuatkan oleh film-film, iklan, media cetak, dan melalui pembicaraan-pembicaraan publik yang menegaskan bahwa tubuh dan seks menjadi bagian yang paling menarik pada perempuan (Abdullah, 1995 b). Praktik-praktik yang dikenakan terhadap tubuh perempuan, seperti tindakan perkosaan dan pemaksaan dalam hubungan seks, karenanya dapat dianggap sebagai proses pelestarian struktur dominasi gender.

Di satu sisi praktik-praktik seks merupakan ekspresi dari suatu sistem nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Di lain sisi, seksualitas sangat terikat pada sistem nilai itu, karena sistem nilai merupakan sumber normatif yang mengatur tata kehidupan. Nilai juga merupakan serangkaian alat ukur yang menentukan yang boleh dan yang tidak boleh. Jika dikaji berbagai nilai tentang hubungan laki-laki dan perempuan dalam hal seksualitas, dengan mudah dapat dilihat betapa diskriminasi seksual itu menjadi gejala yang umum. Julia Suryakusuma menggambarkannya dengan jelas sebagai berikut:

> Perempuan harus perawan, laki-laki dianjurkan untuk mencari pengalaman; laki-laki dianggap lebih dominan dorongan seksualnya, perempuan lebih pasif dan reseptif. Karenanya, dalam perkawinan pun, kelazimannya laki-laki yang meminang, bukan perempuan. Laki-laki yang dianggap poligam, jadi *lumrah* kalau ia menyeleweng, kalau perempuan dianggap aib karena ia berusaha meniru kecenderungan poligamis laki-laki, dan kemudian dipandang terlalu mengancam. (Suryakusuma, 1991:6).

Nilai semacam ini merupakan etika kehidupan secara umum yang kemudian mengatur tingkah laku individu dan mempengaruhi ekspresi-ekspresi simbolis yang bias *gender*.

Ekspresi simbolis yang bias tidak hanya dapat ditemukan dalam praktik-praktik perkosaan atau kekerasan seksual yang merupakan ekspresi simbolis dari hubungan kekuasaan, tetapi juga dalam bentuk-bentuk sugestif yang dapat dilihat dalam film, iklan, atau karya-karya seni. Dalam masyarakat kita hampir tidak ada lukisan lelaki telanjang, sebaliknya lukisan perempuan telanjang dengan mudah ditemukan. Perempuan dipotret sebagai makhluk penggoda, sebagaimana diajarkan, bahwa rusaknya lelaki (seperti yang terjadi pada Adam) disebabkan oleh godaan perempuan (hawa). (Padanan yang lain hanya bisa ditemukan pada "godaan setan"). Pendek kata, aspek seksual dan sensual dari perempuan ditampilkan dalam berbagai bentuk. Tari-tarian yang erotis atau penampilan perempuan yang menggairahkan dalam majalah perempuan merupakan bentuk-bentuk wacana yang menegaskan serangkaian nilai tersebut.

Nilai seksualitas yang disebarluaskan melalui berbagai saluran ini kemudian menjadi rambu-rambu yang

dipelajari dan mempengaruhi kehidupan sosial. Keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial lain telah berperan aktif dalam proses enkulturasi nilai-nilai semacam ini dan juga dalam proses sosialisasi individu. Keluarga dan lembaga sosial yang seharusnya berbasis pada suatu sistem nilai dan ideologi (agama dan budaya) tidak berperan di dalam proses enkulturasi nilai-nilai hubungan laki-laki dan perempuan yang sejajar. Institusi ini bahkan cenderung mereproduksi sistem nilai yang ada, terutama dalam mensosialisasikan status *gender*, dengan memberikan atribut yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki atau dengan membuat aturan-aturan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 1995). Usaha mengubah tatanan nilai semacam ini sama sekali bukan usaha yang mudah karena ia merupakan bagian dari proses konstruksi yang merupakan realitas historis, yang berakar pada sistem kosmologi suatu masyarakat.

Sistem kosmologi merupakan sistem pandangan dunia yang mempengaruhi keseluruhan orientasi hidup manusia. Berger dan Luckmann (1979) menyebut sistem pandangan dunia ini sebagai *universe of meaning* (semesta makna), yang sangat menentukan bagaimana kita memandang seksualitas. Bentuk-bentuk ekspresi simbolis seksualitas tidak lain merupakan suatu produk dari suatu sistem pandangan dunia. Feodalisme, misalnya, merupakan suatu ideologi yang sangat mempengaruhi bentuk-bentuk tindakan yang dikenakan terhadap perempuan dan juga mempengaruhi tipe hubungan laki-laki dan perempuan. Keberadaan suatu ideologi dapat dilihat pada konsep-konsep yang sangat umum digunakan seperti "perempuan yang lemah", "*swarga nunut neraka katut*", atau konsep "*kanca wingking*". Dalam naskah Rukmini-Tatwa, misalnya, terdapat konsep-kon-

sep yang mereproduksi ketimpangan gender, seperti "*kenya setata*", "*tankahanan jara*", atau "*kinasihaning swami*", yang menunjuk kepada pelayanan perempuan terhadap suami atau sistem patriaki (*Yogya Post*, 7 Oktober 1990). Konsep-konsep semacam itu merupakan produk suatu ideologi yang mempengaruhi batas-batas gerak seseorang dalam kehidupannya. Perempuan di sini merupakan pengikut dan orang yang melayani kepentingan-kepentingan lelaki.

Hubungan obyek dengan subyek di sini, seperti juga *nature* dan *culture*, merupakan hubungan yang obyeknya ditaklukkan oleh subyek (Rosaldo, 1983; Moore, 1994). Jauh hari Levi-Strauss telah menegaskan bahwa perempuan merupakan tanda komunikasi. Perempuan dalam hal ini merupakan alat dalam proses pertukaran sosial sehingga penguasaan subyek terhadap obyek merupakan indikator dari besar kecilnya kekuasaan (Levi-Strauss, 1976). Dalam banyak masyarakat sederhana, kekuasaan laki-laki dinilai berdasarkan berapa jumlah perempuan yang dapat dikuasai. Justifikasi terhadap praktik semacam ini menunjukkan adanya sistem dan struktur tertentu yang mendukung berlakunya praktik-praktik yang bias *gender*. Dengan demikian, sistem pertukaran telah terkontaminasi dengan nilai-nilai yang menguntungkan laki-laki dengan mensyaratkan perempuan sebagai obyek demi berlakunya sistem tersebut.

Seks dan Reproduksi Kekuasaan Lelaki

Bias gender tidak hanya merupakan realitas obyektif yang memiliki daya paksa, tetapi juga merupakan apa yang dikatakan Foucault sebagai fakta diskursif, "*the way in which sex is put into discourse*" (Foucault, 1990:

11). Dalam kenyataannya meskipun merupakan sesuatu yang tabu secara normatif, seks tetap merupakan tema pembicaraan penting yang bahkan direproduksi dalam berbagai bentuk wacana. Untuk itu, menarik untuk dikaji siapa yang membicarakan seks dan sudut pandang apa yang digunakan pada saat orang membicarakannya. Seks kemudian dapat dilihat sangat berorientasi kepada golongan yang menyebabkan seks menjadi alat di dalam penegasan kekuasaan laki-laki yang digunakan secara berbeda antara satu kelompok orang dengan kelompok yang berbeda.

Seks merupakan sarana reproduksi, sekaligus sumber kesenangan, dan sesungguhnya juga merupakan pusat keberadaan manusia (Suryakusuma, 1991: 8) karena seks menegaskan hubungan-hubungan kekuasaan pelakunya. Seks tidak hanya untuk fungsi prokreatif, tetapi juga rekreatif yang memenuhi fungsi kesenangan dan kenikmatan yang merupakan gaya hidup hedonistik yang tumbuh sepuluh tahun terakhir ini. Kelas menengah ini telah memberikan pemaknaan baru dalam berbagai aspek kehidupan dan juga telah memberikan inspirasi kepada kelompok masyarakat lain di dalam pembentukan suatu etos konsumeristik yang berorientasi pada pemuasan kesenangan. Kelas menengah kita yang tumbuh demikian pesat sepuluh tahun belakangan ini telah mentransformasikan masyarakat ke arah yang berorientasi kepada pasar, dengan mengejar kepentingan dan kepuasan pribadi. Di dalam gerakan kebudayaan *leisure class* semacam ini, perempuan merupakan suatu produk yang dikonsumsi, yang merupakan pemuas kebutuhan (lelaki) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses negosiasi dan kontrak sosial. Situasi semacam ini semakin mereproduksi bias *gender* karena restrukturasi

dalam sektor produktif tidak terjadi secara mendasar sehingga kontrol sektor produktif masih berada di tangan laki-laki.

Praktik seks karenanya juga menunjukkan ciri-ciri pelaku seks dan hubungan-hubungan kekuasaan dalam hubungan seksual itu sendiri. Untuk ini, Masri Singarimbun mengatakan bahwa "kehidupan seks yang pada dasarnya dimaksudkan untuk melanjutkan keturunan, lalu dimanipulasi manusia. Melalui lembaga, terkadang fungsinya menjadi status sosial, misalnya beristri tiga atau empat untuk gengsi. Atau fungsinya menjadi pemuas naluri dasar di luar perkawinan, pemuas nafsu seks semata dan kehamilan dicegah. Seks malah menjadi industri penting dengan dalih meningkatkan kesempatan kerja dan menyukseskan proyek turisme" (Singarimbun, 1992: 111).

Berbagai praktik seks yang terdapat di dalam masyarakat kita dapat menjadi alat untuk mengukur perkembangan masyarakat itu sendiri dan kemajuan-kemajuan di dalam hubungan laki-laki dan perempuan. Julia Suryakusuma mengatakan bahwa seksualitas adalah cermin nilai-nilai masyarakat, adat, agama, lembaga-lembaga besar seperti negara, dan hubungan-hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan (Suryakusuma, 1991: 3). Dalam berbagai praktik seksual, dominasi laki-laki bukan tanpa perlawanan yang menunjukkan adanya negosiasi kekuasaan. Kasus Yoti yang diperkosa di ujung timur negeri menarik untuk disimak.

> Yang banyak di situ cuma kapal bekas yang keadaannya sudah rusak. Di sana adik iparnya ditarik Mesakh ke pantai, ke salah satu kapal bekas. Mesakh memaksa Yoti untuk menuruti hawa nafsunya. "Kalau tidak mau, saya pukul," Mesakh mengancam. Ternya-

ta Yoti tak takut pada ancaman abang iparnya itu. Ia berusaha memberontak dan melepaskan diri dari genggaman tangan Mesakh yang sangat kuat, tetapi lama kelamaan tenaga Yoti terkuras juga sehingga Mesakh leluasa memenuhi hawa nafsunya (*Gatra*, 4 Maret 1995).

Dalam kasus ini, seperti banyak kasus yang kita ikuti di berbagai media, kelemahan fisik perempuan telah menjadi arena praktik kekuasaan laki-laki. Hal ini bertolak belakang dengan ideologi melindungi yang lemah, meskipun wacana "perempuan makhluk yang lemah" direproduksi terus menerus, bukan untuk dibantu melainkan untuk dimanfaatkan. Dapat dicatat di sini bahwa kepentingan memperkosa jauh lebih besar dibandingkan dengan kepentingan melindungi perempuan.

Perkosaan tidak dapat dipisahkan dari berbagai persoalan kehidupan yang terjadi sehari-hari. Tindakan ini telah berkaitan langsung dengan kemarahan sosial yang diekspresikan oleh seseorang atau sekelompok orang. Di sini memperkosa merupakan cara alternatif untuk mengekspresikan kemarahan sehingga juga merupakan ekspresi penegasan kekuasaan dan ketidakkuasaan seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus Acan, kemarahan ditimpakan kepada perempuan yang ada di rumah Acan, dengan memperkosa mereka. Perkosaan di sini bukan menjadi tujuan, tetapi alternatif bagi kemarahan yang ingin diekspresikan dan juga alat untuk memperoleh kemenangan (kepuasan politik individu).

Serangkaian kasus lain dapat saja ditambahkan untuk melihat betapa perempuan di sini telah menjadi korban dari konflik antar lelaki. Dengan demikian angka perkosaan yang meningkat dapat merupakan tanda dari dekadensi hubungan sosial dan pencarian kekuasaan

yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi tingkat perkosaan, karenanya, bukan hanya menunjukkan moral pelaku yang semakin buruk, tetapi lebih merupakan tanda dari konflik sosial yang semakin tajam antar orang atau antar kelompok orang (Wouters, 1992).

Kemarahan sosial bersumber pada banyak faktor. Jurang yang melebar antar golongan sosial merupakan sumber konflik, terutama pada saat mekanisme hubungan antar golongan itu tidak tersedia. Kecenderungan di dalam materialisasi kehidupan secara meluas telah mengubah bentuk-bentuk hubungan sosial. Benda telah menjadi wakil di dalam hubungan sosial antar orang sejalan dengan berkurangnya hubungan *face to face* (Simmel, 1991). Prinsip-prinsip ekonomi yang membentuk etos hidup sangat mempengaruhi etika kehidupan sosial secara umum. Hubungan yang lebih bersifat kontrak sosial yang dilandasi prinsip dan kepentingan ekonomi menyebabkan kekakuan-kekakuan, yang ini menghilangkan dimensi rasa dan empati di dalam hubungan antar orang dan antar golongan.

Perkosaan dapat terjadi begitu saja karena satu dan lain penyebab. Orang mengatakan bahwa ada dorongan bawah sadar yang tidak dapat dikendalikan, mengikuti jalan berpikir Freud, yang kemudian menjadi kekuatan di dalam memunculkan tindakan perkosaan. Bukankah dorongan bawah sadar ini sesungguhnya juga merupakan ekspresi dari suatu situasi tentang ketidakberesan individu atau masyarakat yang kemudian muncul secara tidak sadar di dalam tindakan seseorang? Oleh karena itu, tindakan semacam perkosaan itu bukanlah tindakan yang berdiri sendiri dan muncul begitu saja. Tindakan ini lebih merupakan produk dari proses ke-

hidupan yang berlangsung sehari-hari, yang karenanya menunjukkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum. Tingginya tingkat perkosaan meminta kita untuk menganalisis secara lebih rinci berbagai faktor yang mengkondisikan tindakan itu.

Yoti yang diperkosa, Rini Sundari yang dijual oleh suaminya, tenaga kerja yang dilecehkan kewanitaannya oleh aparat perusahaan, pemaksaan dalam hubungan seks, maupun lelaki yang menuntut selaput dara yang utuh dalam perkawinan dapat dipandang sebagai instrumen dalam pembentukan sistem pandangan dunia yang menempatkan perempuan pada posisi tertuduh atau pada posisi yang tersubordinasi dalam keseluruhan representasi sosial (Firestone, 1972), laki-laki adalah penguasa. Seks karenanya bukan sekedar pusat keberadaan manusia, tetapi merupakan inti dari peradaban yang keberadaannya sangat menentukan tatanan dan struktur yang mengatur hubungan-hubungan antar manusia. Seks di sini merupakan tanda yang paling konkret dari ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan, baik terjadi di rumah maupun di luar rumah.

Seks, *Go Public*

Seks dewasa ini telah berpindah dari rumah (sebagai urusan privat) ke pabrik-pabrik dan ke jalan-jalan (sebagai urusan publik). Semula dibicarakan dan dikerjakan di rumah karena seks merupakan sesuatu yang tabu dalam sistem normatif timur. Kecenderungan dewasa ini menunjukkan bahwa seks telah menjadi pembicaraan dan pekerjaan publik karena dibicarakan dan dikerjakan di pabrik-pabrik (dalam kasus pelecehan seksual) dan di

jalan-jalan (dalam kasus perkosaan). Seks sebagai komoditas publik (profan) telah dihadirkan kembali oleh instrumen kapitalisme (TV dan berbagai bentuk media) ke rumah-rumah, dengan memperlihatkan kehidupan seks dari suatu rumah atau unsur seksualitas tertentu sehingga kehidupan pribadi menjadi kehidupan publik. Dalam kerangka pergeseran ini, masalah seks telah mengikuti kemana pun perempuan pergi.

Perkembangan dalam keterlibatan perempuan di luar rumah tidak dengan sendirinya dapat diinterpretasikan sebagai suatu kemajuan. Pelecehan seksual yang terjadi di tempat-tempat kerja menunjukkan betapa laki-laki telah mengimbangi perkembangan itu dengan membangun dunia yang tidak aman dan tidak nyaman bagi perempuan (lihat Abdullah *et. al.,* 1996). Peningkatan TPAK perempuan dari tahun ke tahun diikuti pula dengan berbagai persoalan yang memprotes keterlibatan itu, dari alasan anak yang semakin nakal karena ditinggal oleh ibunya (Berninghausen dan Kerstan, 1992) hingga berbagai bentuk anjuran bagi perempuan untuk kembali ke perannya semula sebagai ibu (La Rose, 1985).

Sejak tahun 1981 pemerintah Indonesia telah membuka peluang bagi perempuan untuk bekerja di Timur Tengah. Pada Februari 1984 diperkirakan 15.564 perempuan bekerja di Arab Saudi (Anchalee, 1985: 28). Saat ini telah pula banyak perempuan Indonesia yang bekerja di Jepang, Hongkong, dan Korea, selain di negara tetangga. Perkembangan semacam ini juga harus dilihat sebagai bentuk reproduksi kekuasaan laki-laki. Kepergian perempuan tentu disebabkan oleh berbagai tekanan yang diciptakan oleh laki-laki atau struktur yang berpihak pada laki-laki. Mobilitas perempuan telah dipengaruhi oleh berbagai perubahan ekonomi pedesaan yang me-

nunjukkan bahwa pembangunan pertanian telah menyebabkan perempuan meninggalkan desa-desa mereka (Hansen, 1981; Hart, 1989; Hüsken, 1989). Perempuan di sini merupakan korban dari sistem dan struktur yang diciptakan (sengaja atau tidak) oleh laki-laki untuk laki-laki. Kalaupun dikatakan bahwa kepergian kaum perempuan ke luar negeri (seperti juga ke kota-kota menjadi pekerja) disebabkan oleh keputusannya untuk keluar dari tekanan sosial yang diciptakan laki-laki, para perempuan tersebut akan terperangkap dalam sistem patriarki yang lain. Sebanyak 99 persen perempuan yang bekerja di Arab Saudi (Anchalee, 1985), misalnya, bekerja sebagai pembantu rumah tangga, yang merupakan posisi subordinat. Begitu banyak kasus yang memperlihatkan bahwa para pembantu itu mengalami serangkaian pelecehan.

Perluasan seks dari dunia domestik ke dunia publik menunjukkan bahwa seks merupakan simbol kekuasaan yang memiliki implikasi yang sangat luas. Kedudukan dan perkembangan peran perempuan harus dilihat dengan cara merunut dan menganalisis bagaimana seks dan seksualitas menempatkan perempuan sebagai obyek dari keperkasaan lelaki atau sebagai tempat persembunyiannya lelaki dalam mempertahankan kekuasaannya. Pendapat Carole Sheffield tentang terorisme seksual menarik disimak. Terorisme, katanya, merupakan sebuah sistem yang dengan sistem itu laki-laki menimbulkan ketakutan. Dengan ketakutan itulah laki-laki menguasai perempuan (lihat Singarimbun, 1992: 103). Kekuasaan itu merupakan suatu sistem yang dibangun dengan ketakutan, kekhawatiran, atau dengan kejahatan. Oleh karena itu, pergeseran keterlibatan perempuan ke bidang publik atau, mungkin, keterlibatan

laki-laki ke bidang domestik, menurut hemat saya tidak menunjukkan peningkatan kualitas hidup perempuan karena kekhawatiran, ketakutan, dan kejahatan yang baru sedang menanti di sana.

Penutup: Bukan Melawan Lelaki

Gambaran dunia yang diberikan oleh Simone de Beauvoir sebagai milik lelaki tidaklah berlebihan. Perempuan tidak mendapat tempat di dalamnya. Dalam berbagai perkembangan yang memperlihatkan peluang perempuan semakin terbuka luas, sesungguhnya merupakan perkembangan semu karena hubungan yang timpang mengalami reproduksi dalam dunia baru yang dimasuki perempuan. Kegelisahan atau ketakutan merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena dunia yang dimasuki perempuan sesungguhnya merupakan dunia laki-laki dengan rambu-rambu yang telah dibentuk untuk kepentingan laki-laki. Seks merupakan instrumen dalam pelestarian dunia laki-laki itu, perempuan harus tunduk pada aturan main yang telah ditetapkan.

Usaha-usaha perbaikan kehidupan perempuan, perlu dicatat, bukan usaha memerangi lelaki, tetapi usaha mengubah sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki sebagai subyek dan perempuan sebagai obyek. Perubahan hanya mungkin dilakukan dengan menyusun dan struktur baru yang bertumpu pada sistem nilai dan ideologi yang lebih egaliter. Usaha meningkatkan status dan peran perempuan sama sekali tidak produktif jika berperang melawan laki-laki karena laki-laki sendiri telah tersubordinasi dalam sistem dan struktur yang bias gender, yang tidak hanya direproduksi oleh laki-laki, te-

tapi juga oleh perempuan sendiri.

Praktik kekuasaan yang diperlihatkan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan sesungguhnya merupakan usaha laki-laki mencari sosok dirinya sendiri, suatu sosok yang labil yang membutuhkan penegasan-penegasan untuk merasa aman. Kehilangan kekuasaan berarti akan kehilangan muka, yang menyebabkan lelaki kehilangan makna kehidupan yang sesungguhnya karena manusia hidup tidak lain untuk mencari makna kehidupan (Berger, 1990). Praktik seks yang menyimpang, tempat lelaki mencari makna kehidupan itu, merupakan ekspresi dari animalitas, yang di satu sisi menunjukkan sifat asli lelaki dan di lain sisi menunjukkan cara pengelolaan kehidupan yang sangat modern. Dengan kata lain, laki-laki telah mengelola "kebinatangannya" dengan cara yang sangat berbudaya, dengan menciptakan sistem dan struktur kelembagaan modern seperti keluarga, perkawinan, dan perusahaan ●

Bab Lima

Tubuh, Kesehatan dan Reproduksi Gender

Pendahuluan

DALAM kehidupan sehari-hari, kita sangat terbiasa melihat usaha-usaha aktif untuk melemahkan kedudukan dan membatasi peran perempuan. Secara fisik, perempuan dilemahkan dengan membiarkan perempuan melakukan hal-hal yang berat secara fisik yang dapat menyiksa tubuhnya. Perempuan didera dalam berbagai pekerjaan, seperti sebagai buruh dalam pembuatan jalan, buruh angkut, buruh seks, buruh rumah tangga, yang semuanya tanpa penghargaan (ekonomi dan sosial) yang jelas dan pantas. Di sini tampak bahwa sama sekali tidak ada konsistensi dalam memperlakukan perempuan. Disatu pihak kita menganggap perempuan sebagai makhluk yang lemah; di pihak lain kita membiarkan (dalam banyak kasus memaksa) mereka mendera tubuh untuk

melakukan pekerjaan fisik yang berat. Tubuh mereka menjadi arena eksploitasi.

Dengan kemajuan masyarakat akhir abad dua puluh ini, bukan berarti bentuk-bentuk eksploitasi itu menghilang. Kita justru dapat mengamati perluasan bidang eksploitasi dalam bentuk yang sangat canggih. Di dalam media dapat diamati betapa tubuh perempuan menjadi obyek manipulasi realitas. Iklan-iklan menggunakan tubuh perempuan sebagai alat untuk membangkitkan gairah konsumen terhadap suatu barang. Manajemen tubuh perempuan telah menjadi bisnis yang besar di dalam era akhir kapitalisme (meminjam istilah Jameson) sekarang ini. Pusat kebugaran (*fitness centre*) dan pusat-pusat perawatan kesehatan tubuh merupakan tanda dari perkembangan pengelolaan tubuh perempuan dan perkembangan hubungan *gender* dalam kehidupan sosial.

Berdasarkan gejala tersebut saya akan memperlihatkan dalam tulisan ini bahwa perbaikan kedudukan perempuan tidak terjadi seperti yang dibayangkan. Yang terjadi hanyalah perpindahan "arena bermain" yang sangat mempengaruhi proses tawar menawar kekuasaan perempuan. Kenyataan ini akan saya tunjukkan pada dua bidang penjelasan. *Pertama,* dalam arus pembentukan masyarakat konsumen di mana perempuan menjadi faktor yang lemah. *Kedua,* posisi perempuan juga cukup lemah di dalam struktur kelembagaan kesehatan. Sebelum sampai ke situ, izinkan saya memaparkan secara singkat tentang *the body* (meliputi tubuh dan seluruh bagiannya) sebagai konstruksi sosial yang sangat terikat pada struktur sosial di mana perubahan tolok ukur kedudukan perempuan terjadi.

Sejarah dan Biografi Tubuh

Adalah Foucault, seorang teoretisi berkebangsaan Perancis, yang membangkitkan kembali minat ahli ilmu sosial untuk meneliti tubuh sebagai bidang kajian yang cukup penting. Bukan saja dalam pengertian pemahaman sejarah dan manajemen setiap bagian tubuh, melainkan juga bagaimana rezim medis telah menemukan arena legitimasi kekuasaannya melalui tubuh manusia. Munculnya minat ini juga merupakan tanda melemahnya pengaruh asumsi biologis yang menegaskan bahwa tubuh merupakan fenomena biologis yang tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu sosial. Asumsi semacam itu semakin tampak melesat karena setiap bagian tubuh memiliki biografinya sendiri-sendiri, memiliki sejarah kehidupan yang meliputi berbagai episode perubahan dan tindakan-tindakan yang pernah diambil untuk mengendalikan, mengatur, dan bahkan menertibkan setiap gerak-gerik tubuh. Dengan kata lain, tubuh dibentuk, dikendalikan, dan bahkan ditemukan oleh masyarakat. Di mata Foucault dan Goffman, sangat jelas bahwa arti penting tubuh ditentukan oleh struktur sosial yang ada di luar jangkauan individu (Shilling, 1993: 71).

Cara-cara yang ditempuh oleh individu dalam pengaturan tubuh terkait langsung dengan kontrol sosial. Secara Sosial, tubuh tidak terlepas dari pengaturan, pemonitoran secara tetap, penertiban dan pengendalian, seperti di penjara dan sekolah militer (Lupton, 1994: 23). Pendek kata, pengaturan tubuh sangat tergantung pada ruang dan waktu. Pengawasan tentang tubuh juga menjadi tanggung jawab keluarga, termasuk tindakan merawat anak, latihan fisik, penyiapan makanan, vaksinasi, dan menjaga kebersihan (Lupton, 1994). Dari sini ter-

kesan bahwa tubuh manusia harus dipahami sebagai konstruksi sosial yang berubah dan berbeda berdasarkan perbedaan ruang dan waktu.

Manajemen dan pengendalian tubuh karenanya sangat terikat pada ukuran-ukuran atau standar nilai yang ada di dalam suatu masyarakat. Dalam batas-batas apa kita dapat membicarakan tentang tubuh dan apa saja yang dilakukan seseorang yang menyangkut tubuhnya merupakan dua hal yang sangat penting di dalam kerangka tersebut. Oleh karena itu, tubuh dianggap para ahli sebagai alat yang penting dalam identifikasi sosial (Giddens, 1984; Turner, 1984). Bukan hanya keberadaan kita di suatu tempat ditentukan oleh ada tidaknya tubuh kita di tempat itu, tetapi juga ciri-ciri tubuh dapat menjadi alat penting di dalam menjelaskan "keberadaan" seseorang.

Arti yang lebih penting dari tubuh ditunjukkan oleh Lupton pada saat ia mengatakan bahwa tubuh merupakan metafor bagi organisasi dan kegelisahan sosial, yang merupakan bidang utama dari kegiatan kebudayaan dan politik (Lupton, 1994). Bentuk-bentuk organisasi yang berusaha mengatur, mengendalikan, dan menertibkan tubuh selain bersifat kebudayaan juga bersifat politis. Gejala AIDS dan pornografi merupakan contoh penting tentang bagaimana sesungguhnya tubuh perlu dikelola sedemikian rupa, yang ini dikuatkan oleh nilai dan norma-norma. Kasus semacam ini menegaskan bahwa perangkat nilai dan kelembagaan dibutuhkan untuk mengatur, mengendalikan, mendisiplinkan, dan menertibkan tubuh sehingga di satu pihak tubuh bertingkah laku sesuai dengan batasan-batasan dan di pihak lain agar tubuh dirawat untuk menghasilkan kesehatan, bentuk, dan penampilan tertentu. Dalam aspek yang

pertama pemerintah memiliki kepentingan di dalam penertiban tubuh sehingga pendidikan, militer, penjara, atau undang-undang dibentuk termasuk untuk mengendalikan gerak-gerik tubuh. Aspek yang kedua lebih merupakan konstruksi sosial ekonomi yang sangat terkait dengan mode konsumsi dan ekspresi penduduk. Meskipun demikian, kedua aspek tersebut tidak dapat dipisahkan di dalam hubungannya dengan tatanan sosial dan orientasi nilai yang ada dan perubahannya.

Kegelisahan sosial masyarakat di dalam perawatan kesehatan tubuh di dalam pembentukan bagian-bagian tubuh atau di dalam memperindah penampilan juga merupakan persoalan yang penting yang usaha-usaha ke arah itu telah menggerakkan dan mendikte kehidupan penduduk sehari-hari. Kecenderungan perhatian yang besar terhadap tubuh berkaitan dengan perubahan-perubahan dalam teknologi makanan yang memungkinkan orang memperoleh makanan kurang atau tanpa lemak, makanan yang lebih steril, dan berbagai jenis makanan alternatif, seperti makanan tanpa gula (lihat Turner, 1991). Kemudahan-kemudahan ini telah memungkinkan proses "menampilkan diri" di dalam hubungan sosial lebih leluasa. Shilling melihat perubahan ini berkaitan dengan pembentukan kebudayaan konsumen:

> *... the body in consumer culture has become increasingly central and has helped promote the performing self which treats the body as a machine to be finely tuned, cared for, reconstructed and carefully presented through such measures as reguler physical exercise, personal health programmes, high-fibre diets and coloured-coded dressing (Shilling, 1993: 35).*

Di dalam representasi diri, perempuan harus jeli melihat berbagai potensi tubuhnya, yang itu dapat menjadi kapital kebudayaan (*cultural capital*) penting di dalam pembentukan nilai (ekonomi dan politik) tambah di dalam pertukaran sosial.

Dengan memperhatikan aspek-aspek yang mengitari tubuh, Lupton mengajukan tiga *level* analisis tubuh (Lupton, 1994: 21-22). *Pertama,* tubuh individual, yang dipahami sebagai pengalaman hidup tubuh yang meliputi bagaimana setiap kita memandang tubuh dan perbedaannya dengan tubuh orang lain. Di sinilah tubuh menjadi alat penting yang dapat membedakan seseorang dengan orang lain. Perlakuan atas tubuh yang berbeda menyebabkan tubuh seseorang memiliki biografi, kisah kehidupannya sendiri-sendiri yang menyangkut perlakuan yang pernah dikenakan terhadap tubuh, baik dari sudut kesehatan, pembentukan, maupun penampilan dari bagian-bagian tubuh.

Kedua, tubuh sosial, yang menyangkut kegunaan simbolis dan representasional dari tubuh di dalam mengkonseptualisasikan alam, masyarakat, dan kebudayaan. Di dalam wacana, tubuh sosial biasanya mengacu pada istilah "masyarakat yang sakit", "kaki gunung", atau - kepala negara". Pengaturan, pengendalian, dan penertiban tubuh juga merupakan gejala sosial yang terlihat pada nilai dan norma masyarakat. Cara berbicara yang sopan, cara berjalan yang baik, atau cara makan dan minum semuanya berdasarkan pada pengaturan sosial yang telah baku. Kelainan di dalam mengendalikan tubuh dapat saja menyebabkan konflik sosial atau ketidakteraturan sosial. Tangan, misalnya, harus dijaga penggunaannya dan ia harus dikendalikan agar tidak memegang hal-hal yang tidak perlu atau yang tidak pantas ber-

dasarkan ukuran nilai yang berlaku.

Ketiga, aspek bio-politik dari tubuh, yang berkaitan dengan kebijaksanaan negara di dalam mengendalikan, mengatur, dan mengamati tingkah laku tubuh pada level individu dan kelompok dalam rangka menunjang stabilitas sosial. Contoh yang paling jelas di sini adalah tidak hanya kebijaksanaan Posyandu untuk meningkatkan gizi (pertumbuhan tubuh) balita, tetapi juga usaha menahan tokoh demonstran untuk mengatasi pengaruh keberadaannya di suatu tempat. Perhatian pemerintah terhadap seksualitas dan AIDS merupakan contoh nyata dari bentuk pengaturan tubuh. Pengaturan, pengawasan, dan penertiban tubuh juga dilakukan melalui agen-agen formal, seperti di sekolah, di dalam penjara, di dalam rumah sakit, di dalam asrama militer, atau di dalam suaka.

Ketiga level analisis tersebut berkaitan langsung dengan dua pendekatan yang diajukan Foucault, yakni pandangan substantif terhadap tubuh termasuk institusi yang mengatur tubuh dan pandangan epistemologis yang melihat bahwa keberadaan tubuh diproduksi oleh wacana (Foucault, 1990). Imaji tentang tubuh selain dibangun dan dikuatkan oleh film-film, iklan, televisi, dan media cetak, juga dibangun melalui pembicaraan-pembicaraan publik yang menunjukkan tubuh (seks) menjadi mode pembicaraan yang penting. Di dalam posisi semacam ini, pembicaraan tentang tubuh selalu menyangkut ideologi gender, terutama kecenderungan menjadikan jenis kelamin tertentu sebagai obyek di dalam hal ini telah menjadi obyek di dalam manajemen tubuh, baik oleh masyarakat, rezim medis, negara, dan oleh perempuan sendiri.

Dari sini dapat dilihat bagaimana kedudukan

perempuan telah dibingkai oleh tatanan yang terpusat pada laki-laki sehingga lembaga-lembaga yang ada cenderung menegaskan posisi tersebut (lihat Solomon, 1988). Perkosaan, pemukulan, atau teror yang melemahkan tubuh perempuan dapat dianggap sebagai proses reproduksi (pelestarian) struktur laki-laki yang dominan. Kejadian semacam itu mengharuskan laki-laki, suami, kakak laki-laki, dan ayah untuk memproteksi perempuan. Mereka seolah-olah bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan perempuan.

Tubuh dan Kesehatan

Di dalam kehidupan sehari-hari metafor mekanis sering digunakan dalam wacana tentang tubuh (*the body*). Proses kerja tubuh dikaitkan langsung dengan proses kerja mesin yang membutuhkan baterei atau energi, sistem pembakaran yang cepat panas atau lambat panas. Konsep jantung sebagai "pompa" yang dapat meninggikan atau menurunkan tekanan darah merupakan contoh metafor mekanis yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sosial (Lupton, 1994: 59). Istilah "sakit hati" merupakan contoh lain yang menunjukkan bagaimana metafor mekanis digunakan untuk menunjukkan aspek psikis, bukan aspek fisik dari tubuh. Karena asumsi metafor mekanis semacam ini, maka bagian tubuh yang rusak dapat diperbaiki dan diganti. Adanya cangkok jantung, cangkok mata, pemasangan alat bantu pendengaran, atau bedah plastik merupakan contoh yang paling nyata tentang metafor mekanis. Pada saat bagian tertentu dari tubuh mengalami perubahan, kelainan atau sakit, maka berbagai tindakan dilakukan untuk meng-

atasi gangguan-gangguan tersebut. Pada saat seperti inilah tubuh atau bagian-bagian tubuh memiliki sejarah hidupnya atau biografi.

Banyak orang berusaha menempuh berbagai cara untuk memperpanjang usia: merawat kesehatan dengan baik, mempertinggi kepekaan terhadap berbagai kelainan yang dirasakan dalam tubuh, dan mengantisipasi dengan cepat gangguan-gangguan yang dirasakan. Jika seseorang menderita penyakit tertentu, betapapun parahnya, ia masih berusaha menemukan berbagai obat yang dapat menyembuhkannya. Yang tidak percaya pada dokter dapat ke dukun, yang tidak mau dioperasi bisa mencari tabib yang bisa menyembuhkan penyakit tanpa harus mengoperasi.

Selain kesadaran terhadap perawatan kesehatan yang semakin baik, berbagai fasilitas kesehatan, baik yang tradisional maupun modern, berkembang dengan pesat. Munculnya praktik-praktik yang dibuka oleh dukun, tabib, "orang pinter" atau apapun nama mereka, yang semuanya terlibat dalam usaha perawatan dan penyembuhan kesehatan merupakan tanda penting tentang permintaan pelayanan yang begitu besar. Demikian pula usaha mengatasi kematian. Berbagai fasilitas kedokteran dikembangkan dan diperbaiki agar perawatan darurat dapat segera diberikan sehingga seseorang tidak terlambat ditolong. Kematian, kata Berger, adalah suatu gambaran yang esensial dari kondisi manusia yang mengharuskan manusia untuk mengembangkan cara pemecahannya sehingga melupakan kematian berarti mengingkari satu dari sedikit parameter mengenai tubuh di dalam sistem sosial (Berger, 1990). Kematian yang disebabkan oleh kekurangan fasilitas atau kesalahan di dalam perawatan kesehatan berusaha ditekan sedemikian rupa de-

ngan cara meningkatkan kemampuan fasilitas kesehatan.

Meskipun demikian, sangat ironis, bahwa mengatasi sakit dan kematian itu sama sekali bertolak belakang dengan fakta-fakta yang menunjukkan begitu banyak orang berusaha menyakiti orang lain atau membunuh. Hal ini bertentangan dengan usaha-usaha individu dan kelembagaan yang berusaha memperbaiki kesehatan tubuh dan mengatasi kematian. Di dalam resiko sakit dan kematian itu, perempuan merupakan kelompok yang memiliki resiko sangat tinggi. Tindakan kekerasan yang paling sering dihadapi perempuan adalah kekerasan domestik, pemukulan oleh suami. Sekedar untuk perenungan, Heise (1993) mencatat apa yang dialami perempuan Amerika Serikat. Sebanyak 30 persen perempuan di AS pernah dipukul suami mereka paling tidak sekali seumur hidup. Sebanyak 50 persen laki-laki pernah menempeleng istrinya minimal tiga kali setahun. Di Lima (Peru), 33 persen pasien perempuan yang dirawat Unit Gawat Darurat adalah karena dipukul oleh pasangan mereka. Saya tidak tahu berapa persen dari perempuan Indonesia yang pernah ditempeleng suami mereka. Atau tak jelas berapa banyak laki-laki yang tega mengasari anak perempuan, adik perempuan, istri, atau ibunya sendiri.

Sejak bayi, seorang perempuan telah mengalami perlakuan kurang adil. Bayi laki-laki dalam banyak kasus lebih diharapkan. Ada pula kelompok masyarakat yang membunuh bayi perempuan karena ia akan mendatangkan biaya ekonomi yang cukup besar pada saat perkawinan. Setelah kawin, seorang perempuan memiliki kemungkinan untuk mendapat perlakuan tidak pantas, menerima pemukulan atau perlakuan kasar suami, yang pada gilirannya menyebabkan ia semakin

tergantung pada saudara laki-lakinya atau pada ayahnya. Struktur masyarakat telah terpusat pada laki-laki di mana hubungan kekuasaan berlangsung satu arah. Perempuan tidak memiliki sumber kekuatan untuk melakukan tawar-menawar kekuasaan. Lembaga-lembaga yang terbentuk juga tidak memberi peluang yang besar bagi perempuan. Lembaga-lembaga itu cenderung menguatkan ketergantungan perempuan pada laki-laki.

Dalam hal ini menarik untuk dilihat bagaimana kedudukan perempuan di dalam institusi medis. Berkaitan dengan pembicaraan mengenai tubuh: bagaimana lembaga-lembaga kesehatan menjadikan tubuh sebagai alat legitimasi kekuasaan norma-norma dan praktik-praktik kesehatan yang dibangun. Foucault (1990) telah menjelaskan bagaimana pendidikan kesehatan sesungguhnya melegitimasikan praktik-praktik ideologis dan sosial dengan membuat penegasan bagaimana individu harus mengatur tubuhnya, termasuk jenis makanan yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh tubuh atau sifat dan frekuensi kegiatan fisik untuk tubuh. Kontrol dan penertiban individu semacam ini dianggap Lupton (1994) sebagai "etika kerja baru". Pengaturan kesehatan tubuh telah mengatur dan membatasi gerak dan jadwal individu. Dokter telah menjadi bagian yang penting di dalam menguatkan kekuasaan rezim kesehatan. Foucault menggambarkannya dengan menarik pada saat ia mengatakan bahwa para dokter:

> *... set itself up as the supreme authority in matters of hygienic necessity, taking up the old fears of ve~eral affliction and combining them with the new themes of asepsis, and the great evolutionist myths with the recent institutions of public health; it claimed to ensure the physical vigor and the moral cleanliness*

of the social body; it promised to eliminate defective individuals, degenerate and basterdized populations. In the name of a biological and historical urgency, it justified the racisms of the state, which at the time were on the horizon ...(Foucault, 1990: 54).

Kekuasaan dokter yang besar menyebabkan aspek yang paling rahasiapun dari tubuh tidak dapat ditutupi lagi. Perempuan di depan rezim medis tidak berdaya untuk menyembunyikan rahasia tubuhnya, yang ini terjadi dalam dua bentuk. *Pertama,* seorang perempuan mau tidak mau, misalnya, harus menceritakan seluruh proses kehamilan, perubahan-perubahan organ tubuh, bagian-bagian yang sakit atau dirasakan tidak sehat. *Kedua,* perempuan tidak berdaya menolak untuk menunjukkan bagian-bagian tubuhnya atau merelakan bagian tubuh tertentu untuk diperiksa, meskipun ia tidak tahu persis kepentingan tindakan itu dalam perawatan kesehatannya. Kita memiliki pengetahuan yang terbatas tentang apa-apa yang harus diperiksa dan perlu tidaknya memeriksa bagian tubuh tertentu untuk suatu penyakit. Ini merupakan contoh penting bahwa tubuh dapat menjadi arena di mana hubungan kekuasaan dapat diamati dan dapat dijelaskan.

Kapasitas tubuh perempuan untuk melahirkan dan menyusui anak atau perubahan-perubahan tubuh yang diakibatkan oleh menstruasi, kehamilan, dan menopause dianggap ciri-ciri kelemahan perempuan. Di dalam struktur sosial yang bersifat patriarkhal ciri-ciri tersebut dijadikan alasan yang kuat untuk menghalangi keterlibatan perempuan dalam bidang publik dan ekonomi (Lupton, 1994: 131). Struktur yang berorientasi pada laki-laki semacam ini dikuatkan oleh berbagai wacana di dalam kehidupan sosial. Media mempresen-

tasikan dan menguatkan keberadaan struktur tersebut, yang tampak dalam musik dengan lirik lagu "perempuan yang ditinggal", sandiwara radio atau teater, juga pidato-pidato. Seringkali kita mendengar pidato seseorang (laki-laki) yang sukses, yang tidak lupa menyebutkan kalimat seperti: *Last but not least,* terima kasih juga ditujukan kepada istri saya yang dengan setia mendampingi dan mengurus anak-anak kami, pengertiannya yang dalam telah memungkinkan saya berhasil ...". Kalimat semacam itu menunjukkan betapa intensifnya proses reproduksi keluarga dan perempuan di mana perempuan dikuatkan posisinya terus menerus sebagai "ibu rumah tangga".

Tubuh: Lokalisasi Kebebasan Perempuan

Di dalam kehidupan sosial dapat dilihat dengan jelas bagaimana manajemen tubuh telah menjadi satu gejala yang sangat penting dewasa ini. Pusat kebugaran (*fitness centre*) merupakan contoh paling jelas yang merupakan pusat pengelolaan ukuran-ukuran tubuh yang ideal secara sosial. Mengecilkan perut, melangsingkan tubuh, atau membentuk bagian tertentu dari tubuh. Tidak terhitung berapa banyaknya kelompok-kelompok kecil yang melakukan latihan kebugaran secara teratur. Secara umum dapat dilihat bahwa perhatian terhadap perawatan kesehatan, pembentukan tubuh, dan penampilan semakin besar. Antara ketiganya tidak dapat dipisahkan begitu saja. Kesehatan tubuh, misalnya, telah mengalami perluasan makna yang termasuk penampilan. Demikian pula bentuk tubuh, tubuh yang terlalu gemuk tidak memenuhi syarat kesehatan. Tubuh yang awet

muda, sehat, dan indah merupakan ukuran yang ideal. Oleh karena itu, berbagai fasilitas yang melayani usaha-usaha membentuk atau mendapatkan tubuh yang ideal berkembang dengan pesat. Kecenderungan ini juga menjelaskan bahwa perawatan tubuh yang bagian dalam lebih didasari oleh keinginan untuk mendapatkan kesehatan dan keindahan tubuh bagian luar.

Bentuk tubuh telah menjadi syarat atau faktor dominan di dalam berbagai pertukaran sosial. Tubuh juga menjadi alat ukur penting dalam penerimaan tenaga kerja perempuan, yang dipengaruhi oleh faktor ideologis. Selain harus memiliki kualitas, seorang perempuan juga harus menarik untuk dapat diterima bekerja (Abdullah, 1995). Penerimaan sosial dan batas-batas hubungan sosial secara meluas dipengaruhi oleh bentuk tubuh seseorang, yang itu menjadi standar ukuran menarik tidaknya seseorang. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwa cantik bukanlah syarat terpenting, laki-laki masa kini lebih menyukai wanita seksi (*Jawa Pos*, 16 Mei 1994). Keindahan tubuh, seksual, dan sensual dapat diperoleh dengan latihan, perawatan bagian-bagian tubuh secara teratur, dan menggunakan berbagai produk yang tersedia. Besarnya perhatian masyarakat dan alasan-alasan yang mendasari kecenderungan perawatan tubuh merupakan masalah yang menarik. Hal ini terutama menyangkut alasan-alasan tentang meningkatnya kesadaran individu di dalam perawatan kesehatan sehingga menciptakan permintaan yang cukup besar terhadap bentuk-bentuk praktik dan fasilitas kesehatan. Usaha-usaha mengendalikan, mengatur, dan menertibkan tubuh menjadi bagian dari gejala sosial yang dikuatkan keberadaannya dengan institusi-institusi pendukung. Fakta ini sangat menarik diperhatikan, terutama me-

nyangkut apa sesungguhnya yang terjadi di dalam masyarakat kita. Perubahan nilai dan alat ukur merupakan penjelasan yang sangat sentral untuk menggambarkan kecenderungan dewasa ini. Kalau itu benar, maka kita sedang berada dalam era yang sangat penting karena tatanan baru di dalam kehidupan sosial sedang dibentuk.

Apa yang terlihat dalam media massa dapat memberikan wawasan yang lebih lengkap mengenai kecenderungan ini. Tubuh perempuan di dalam media massa menjadi alat yang sangat penting di dalam berbagai proses sosial dan ekonomi. Tubuh, misalnya, digunakan dalam iklan untuk menjual berbagai komoditi, seperti mobil, minuman, barang-barang olah raga, dalam usaha memberikan daya tarik erotik pada suatu produk (Lupton, 1994;36). Daya tarik erotik menjadi kuat untuk membangkitkan faktor perangsang yang cukup kuat untuk membangkitkan minat orang terhadap suatu produk.

Dalam proses ini perempuan menjadi korban. Di satu sisi, mereka menjadi alat di dalam proses distribusi produk dan gaya hidup. Perempuan dieksploitasi sedemikian rupa, dengan cara membentuk dan menonjolkan bagian tertentu dari tubuh, untuk membangun imaji yang sesuai dengan produk yang dipasarkan. Perempuan, misalnya, diidentikkan dengan kenikmatan minuman, keindahan mebel, kelincahan suatu merk mobil. Desain pakaian disesuaikan dengan bentuk alami tubuh, seperti pakaian bermode ketat (yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh), atau terbelah pada bagian bawah untuk menimbulkan daya tarik erotik, dan terbelah pada bagian atas untuk menunjukkan keindahan alami. Dalam proses semacam ini iklan telah menghambat perubahan peranan perempuan dengan terus memotret perempuan

sebagai obyek seks (Fine dan Leopold, 1993: 209). Di sisi lain, perempuan menjadi obyek pasar dari produk kapitalisme. Mereka menjadi konsumen utama, atau paling tidak menjadi saluran masuknya barang-barang dan gaya hidup modern. Majalah perempuan atau televisi merupakan media yang penting di dalam proses distribusi barang dan gaya hidup modern. Dari sudut pandang ini juga jelas bahwa benda-benda dan praktik-praktik perawatan kesehatan dikonsumsi oleh perempuan sebagai bagian dari proses estetisasi kehidupan, suatu mode konsumsi yang didasari oleh nilai simbolis suatu produk.

Wacana tubuh di dalam berbagai bentuk, dalam surat kabar, majalah, televisi, film, radio, atau pembicaraan-pembicaraan publik, telah menguatkan posisi tubuh sebagai "arena bermain" yang penting dalam penegasan hubungan kekuasaan perempuan dan laki-laki. Mengapa tubuh perempuan perlu tampak awet muda, cantik, menarik, dan menggairahkan? Apakah laki-laki merawat tubuh juga untuk tampak tampan, menawan, atau menggairahkan? Hal ini perlu diteliti secara rinci untuk melihat perbedaan atau kesamaan orientasi laki-laki dan perempuan di dalam pengelolaan tubuh. Pemahaman tersebut akan memungkinkan kita mengevaluasi hubungan *gender* yang tampak dari bagaimana pengelolaan tubuh dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Melihat kecenderungan perawatan tubuh, paling tidak ada tiga alasan yang dapat menjadi dasar penjelasan. *Pertama,* karena alasan ekonomis. Bagi sebagian orang tubuh merupakan aset ekonomi yang memiliki nilai jual. Merawat tubuh atau memperindah tubuh sama artinya dengan memberikan nilai tambah kepada tubuh yang dapat mempertinggi nilai jual tubuh. Tamara

Blezynski, supermodel blasteran Polandia-Sunda, atau Naomi Campbell, top model dunia berkulit hitam itu, merawat tubuh dengan teliti, dengan menggunakan barang-barang pilihan. Usaha-usaha merawat tubuh sama halnya dengan usaha membentuk suatu *cultural capital* (meminjam konsep Bourdieu) yang kemudian untuk dikonversikan ke dalam bentuk *economic capital.* Dalam hal ini, semakin indah atau ideal bentuk tubuh, semakin tinggi nilai tukar (ekonomis) yang diperoleh.

Kedua, penolakan terhadap ketuaan dan nasib. Ketakutan tampil jelek dan tua hampir identik dengan trauma kematian, sehingga muncul kecenderungan orang untuk melakukan tawar-menawar terhadap nasib tubuhnya. Secara alami, semakin tua usia, bagian-bagian tubuh pun mulai menua dan keriput. Organ-organ tubuh pun dengan sendirinya akan melemah dan berfungsi tidak sekuat sebelumnya. Sekarang ini muncul kecenderungan untuk menolak "nasib" tua atau kematian sekalipun, dengan cara memilih bentuk-bentuk latihan fisik yang dapat menjaga berfungsinya organ tubuh dengan baik; dengan cara mengatur irama hidup seharian dan pemilihan makanan yang berguna untuk tubuh; dan melakukan perawatan kesehatan secara teratur dan memilih obat-obatan yang dapat menjaga tubuh tetap sehat. Kematian atau ketuaan bertentangan dengan ideologi manusia sebagai makhluk pencari makna dalam kehidupannya. Ketuaan dan kematian (atau kekurangan secara fisik) menyebabkan manusia tidak bermakna atau berkurang penghargaan terhadap dirinya.

Ketiga, keterlibatan perempuan yang intensif dalam perawatan kesehatan, pembentukan, dan penampilan tubuh dapat dipandang sebagai bentuk pelarian dan rutinitas. Bertambahnya jumlah perempuan dari berba-

gai kelas sosial melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tubuhnya merupakan tanda bahwa perempuan semakin tidak mempunyai "arena" ekspresi diri yang produktif di dalam bidang publik dan ekonomi. Kecenderungan ini berkaitan dengan proses marginalisasi di satu pihak dan di lain pihak karena perubahan-perubahan struktur rumah tangga dengan anak sedikit dan keberadaan pembantu yang "membatasi" kegiatan perempuan. Kegiatan yang melingkar-lingkar di seputar tubuh tidak lain merupakan refleksi dari pergeseran arena kekuasaan secara meluas dapat dilihat pada bagaimana tubuh dikelola dan pada implikasi yang ditimbulkan dalam pengelolaan tubuh dalam masyarakat.

Penutup

Dalam tulisan ini telah digambarkan dimensi-dimensi tubuh dan kaitannya dengan kedudukan perempuan di dalam struktur sosial dan perubahan-perubahannya. Tubuh perempuan secara nyata merupakan arena di mana laki-laki memperkuat posisinya dan menegaskan kembali kekuasaannya (terutama pada saat stabilitas dominasi laki-laki terganggu). Tindakan-tindakan kasar terhadap tubuh perempuan, termasuk pemukulan dan perkosaan, merupakan tanda penting dari usaha aktif laki-laki untuk melemahkan perempuan.

Yang penting di dalam proses ini bahwa berbagai instrumen lain (dalam berbagai jenis dan bentuk wacana) ikut mendukung dan menguatkan struktur patriarkhal tersebut. Instrumen-instrumen tersebut telah berperan aktif di dalam pengendalian, pengawasan, dan penertiban tubuh perempuan. Sejak kecil seorang anak perem-

puan sudah diharuskan untuk mengatur tingkah laku tubuhnya (dari perilaku makan, cara berbicara, tertawa, cara berjalan, dan sebagainya) yang berbeda dengan anak laki-laki. Produksi dan reproduksi posisi perempuan sebagai "ibu rumah tangga" begitu intensif sehingga perempuan menjadi pasif terhadap dunia luar rumah tangga.

Perkembangan di dalam pengelolaan tubuh, yang meliputi kesehatan, bentuk, dan penampilan, tidak menunjukkan suatu kemajuan di dalam kedudukan perempuan karena perkembangan itu memperlihatkan pembentukan etos konsumtif dalam kehidupan perempuan. Secara struktural, perkembangan tersebut tidak memperkuat basis tawar-menawar kekuasaan perempuan. Sebaliknya, perkembangan di dalam pengelolaan tubuh justru memperkuat ideologi gender dengan mereproduksi ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan di mana tubuh mengambil bagian penting dalam proses identifikasi sosial ●

Bab Enam

Kesadaran Gender dan Hak Reproduksi

SUBORDINASI perempuan merupakan fakta yang akut dalam dunia kesehatan yang ditandai oleh dominasi yang berlapis antara dokter—yang hampir selalu dicitrakan sebagai laki-laki—dengan perawat—yang dicitrakan sebagai perempuan—atau antara paramedis dengan pasien yang secara struktural menunjukkan hubungan yang tidak seimbang. Institusi kedokteran hampir total didominasi oleh laki-laki yang tentu saja mempengaruhi cara perempuan (pasien) ditempatkan. Berbagai tahap dalam kesehatan kaum perempuan tidak hanya mengharuskan mereka berhadapan, demi normalisasi kehidupan sosial, dengan institusi kesehatan dalam berbagai bentuk, tetapi juga berhadapan dengan serangkaian nilai yang kontradiktif, entah itu dirasakan atau tidak. Konsep "aurat", misalnya, tidak berlaku sebagaimana dalam

kehidupan sosial pada saat seorang perempuan mendaftarkan dirinya untuk diperiksa di sebuah rumah sakit atau klinik. Tanpa ada negosiasi seorang perempuan telah melepaskan pakaiannya untuk suatu pemeriksaan.

Dalam berbagai tahap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh perempuan juga melibatkan berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung ikut dalam menentukan "nasib" kaum perempuan. Hak-hak reproduksi perempuan dipengaruhi, atau kadang-kadang ditentukan oleh pihak-pihak tersebut yang mencakup sistem jaringan yang luas. Keberadaan institusi kesehatan yang begitu berkuasa bahkan ditegaskan oleh berbagai pihak tersebut, seperti pemerintah, pasar, agama, dan berbagai lembaga sosial lainnya seperti sekolah.

Gambaran kekuasaan institusi kesehatan yang didukung oleh berbagai institusi di luarnya telah menyebabkan selain persoalan-persoalan umum yang dihadapi saat kebutuhan pelayanan kesehatan terjadi, tetapi juga menyebabkan munculnya berbagai persoalan yang spesifik perempuan dalam berbagai tahap kesehatan yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Hak Reproduksi Kaum Perempuan

Persoalan reproduksi tidak hanya mencakup alat dan proses reproduksi, tetapi juga terkait langsung dengan hubungan-hubungan sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan. Hubungan dua jenis kelamin ini dibingkai oleh berbagai nilai dan norma yang dibentuk dan dilestarikan oleh berbagai pihak dengan berbagai kepentingan. Kepentingan-kepentingan ini kemudian telah menyebabkan sifat timpang atau seimbang terbentuk. Hubungan suami istri, misalnya, telah dinilai sebagai

hubungan yang timpang, khususnya pada tahap pengambilan keputusan dalam berbagai aspek. Perempuan tidak bebas, misalnya, menolak hubungan seks yang dapat membahayakan dirinya sekalipun. Berbagai laporan menunjukkan lemahnya *bargaining position* perempuan dalam hubungan seks yang tampak dari berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi. Berbagai perkosaan yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi fenomena penting lima tahun belakangan ini, baik dari sudut keluasan cakupan maupun intensitasnya, merefleksikan kedudukan perempuan yang lemah dalam struktur sosial. Budaya dan adat secara umum melegitimasi struktur hubungan gender yang timpang.

Berbagai fakta memperlihatkan ketimpangan-ketimpangan yang terjadi secara meluas. Data tentang perkosaan yang secara jelas memperlihatkan bentuk ketimpangan itu memprediksikan bahwa perkosaan terhadap perempuan terjadi lima menit sekali. Namun demikian, hanya 13.175 kasus yang dilaporkan ke kepolisian dalam delapan tahun, 1986-1994 (cf. Abar dan Subardjono, 1998:1). Tidak terhitung berapa jumlah pelecehan (*sexual harrasment*) yang terjadi dalam setiap menit di Indonesia. Dari laporan media cetak tampak bahwa tindakan pelecehan itu telah melibatkan berbagai lapisan masyarakat baik sebagai korban maupun pelaku. Kasus semacam itu merupakan tanda penting dari ketimpangan hubungan gender di Indonesia.

Kasus yang pernah diungkapkan oleh Yulfita Raharjo dapat memberikan kesan bagaimana ketimpangan dalam hubungan seks terjadi. Seorang ibu bercerita pada Yulfita Raharjo sebagai berikut:

> Sudah delapan tahun kami tidak saling berbicara. Pada mulanya kami sering bertengkar ketika saya

> ketahui ia suka selingkuh, suka main cewek.... Ia juga pemarah dan suka memukul, apalagi jika tidak diikuti kemauannya. Memang hidup seperti neraka, tetapi... apakah kehidupan saya akan jauh lebih baik jika saya meninggalkannya. Saya tidak mempunyai kepandaian apa-apa. Apalagi berpisah dengan anak-anak rasanya tidak kuat. Sebab itu, saya tahan saja karena kalau sampai cerai, saya sendiri yang rugi. Tidak ada yang tahu keadaan saya ini karena kalau keluar rumah, saya tetap istrinya. Aneh ya, tidak saling berbicara selama delapan tahun, tetapi masih mempunyai anak di bawah usia delapan tahun. Meskipun tidak saling berbicara, saya masih menjalankan tugas sebagai istri... (Raharjo, 1996: 264).

Dalam kehidupan seks yang timpang semacam ini risiko praktik seks yang kurang aman sangat mungkin dihadapi oleh kaum perempuan. Kasus di atas merupakan gambaran yang sangat mungkin terjadi secara meluas di Indonesia mengingat struktur hubungan gender yang sangat timpang dalam berbagai bentuk (Abdullah, 1997). Hak-hak seksual dan reproduksi perempuan tidak dihormati oleh suami dan masyarakat sehingga perempuan tidak memiliki pilihan dalam pembuatan keputusan reproduktif. Situasi ini dapat dihubungkan dengan hasil penelitian Hotman Siahaan dan Tjahjo Purnomo yang menunjukkan 82,1 persen laki-laki (95 orang dari total yang diwawancarai di Surabaya) yang sudah menikah melakukan penyelewengan seksual, sementara perempuan hanya 6,3 persen (Siahaan & Purnomo, 1998: 73). Penyelewengan seks yang dilakukan oleh laki-laki di sini memiliki risiko yang besar bagi kesehatan reproduksi istrinya.

Ketidakamanan dalam hubungan seks juga tampak dalam persoalan penggunaan kondom yang cenderung dihindari sehingga perempuan menghadapi risiko yang sangat besar dalam hubungan seks. Penelitian Efo Suarmiarta, dkk (1992) menunjukkan bahwa 68,3 persen pengemudi truk Denpasar-Surabaya berhubungan seks dengan pelacur tanpa menggunakan kondom. Gambaran ini sesungguhnya merupakan wakil dari berbagai studi yang memperlihatkan hal yang hampir sama. Jika pelacuran dalam berbagai bentuknya dikonsumsi tanpa mematuhi standar kesehatan maka risiko kesehatan merupakan hal yang sangat pelik. Gevin Jones dkk, misalnya, mengambil angka jumlah pelacur yang tersedia di Departemen Sosial yang menyebutkan 71,281 orang pada tahun 1995 (Jones, 1995). Meskipun angka ini disebutkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun, satu hal perlu disadari bahwa angka ini masih terlalu rendah.

Gejala seksualitas dapat dilihat dari ramainya bursa seks di Indonesia pada tahun 1990-an. Selain prostitusi dalam bentuk yang formal, banyak sekali praktik seks yang berlangsung secara tertutup. Laporan-laporan penelitian dan media cetak banyak membantu memberikan gambaran tentang praktik seks secara meluas, meskipun sulit diperoleh data yang lengkap. Pada tahun 1990, misalnya, terungkap fenomena siswi dan mahasiswi sebagai penghibur di berbagai kota. Mereka dipanggil ke hotel-hotel dengan tarif berkisar 50 ribu sampai 150 ribu rupiah (*Matra,* Agustus, 1990). Kehidupan seksual yang mengagetkan terjadi di kalangan remaja yang menunjukkan kecenderungan terjadinya *premarital intercourse.* Pusat penelitian kependudukan UGM pernah melakukan penelitian menyangkut seks remaja usia 14-24 tahun. Sebanyak 26,35 persen kelompok usia ini di Manado,

misalnya, telah terlibat hubungan seks di luar nikah. Bahkan kehamilan di luar nikah dari jumlah itu mencapai 91,6 persen (*Republika,* 29 Juni 1993). Penelitian ini kemudian diikuti oleh penelitian-penelitian lain di berbagai kehamilan di luar nikah.

Praktik semacam ini memberi andil bagi penambahan kasus AIDS dan HIV di Indonesia. Insiden AIDS dan HIV mengalami perkembangan yang hingga bulan pebruari 1997 mencapai 517 kasus (Singarimbun, 1997: 4), pada bulan Agustus 1998 menjadi 706 kasus. Angka tersebut mencakup 512 orang HIV dan 104 penderita AIDS (Tabel 1). Sejumlah 101 telah meninggal dari angka-angka tersebut.

Tabel 1.
Penderita AIDS dan HIV di Indonesia 1998

	HIV	AIDS	Jumlah
Male	228	159	447
Female	202	35	237
Unknown	22	0	22
Total	512	104	706

Source: *Support*, Vol. 4, No. 33, August 1998

Risiko tertularnya STD (*Sexual Transmitted Disease*) dan HIV/AIDS semakin hari semakin membesar mengingat berbagai praktik seks yang berisiko berlangsung terus. Pelacuran terselubung merupakan bahaya yang jauh lebih besar di negara seperti Indonesia mengingat kontrol normatif yang begitu ketat. Pelacuran terselubung yang hadir dalam berbagai bentuk dan terjadi di berbagai usia dan kelompok sosial tidak dapat dideteksi sehingga masalah yang dihadapi tidak dapat dipecahkan

dengan baik. Seorang perempuan yang mengalami peristiwa menyedihkan dalam penyakit kelamin bercerita:

> Suamiku meninggal karena HIV/AIDS dan bayiku lahir satu minggu sebelum suamiku meninggal. Saat itu aku tidak mau tahu apakah aku terinfeksi HIV/AIDS atau tidak... hanya satu virus AIDS saja, aku tidak bisa kuliah seperti biasa, keluarga tidak mau makan bersama denganku dan tidak boleh merangkul bayiku dan mencium pipinya. Saat inilah baru kurasakan bahwa hidupku tidak ada arti lagi disini. Semua harapan dan cita-citaku hilang semua...

Pengetahuan yang terbatas tentang apa itu HIV/AIDS dan bagaimana proses penularannya serta akibat-akibat yang ditimbulkan telah menjadi faktor penting dalam kesehatan reproduksi. Dalam suatu hubungan seks di luar nikah atau pasangan resmi selain usaha menghindari tertularnya penyakit, juga menghindari terjadinya kehamilan. Data dari *Demographic and Health Survey* (1991) menunjukkan bahwa 26 persen pasangan usia subur tidak ingin mempunyai anak lagi. Jika di antara 26 persen pasangan usia subur itu hamil maka kehamilan itu merupakan kehamilan yang tidak dikehendaki. Berdasarkan data tahun 1994 kelahiran yang tidak diinginkan mencapai 8 persen, meskipun angka sesungguhnya jauh lebih besar. Besarnya angka kehamilan yang tidak diinginkan ini tampak dari banyaknya kasus "pembuangan" anak yang terjadi tahun-tahun belakangan ini. Hampir setiap hari sepanjang tahun 1996/1997 ditemukan bayi di tempat sampah, di pinggir jalan, di WC umum, di sungai, di depan rumah, ada juga yang sengaja ditinggalkan di klinik atau rumah sakit. Banyak juga pemberitaan tentang aborsi yang

gagal yang kemudian menyebabkan kematian anak atau ibu. Fakta ini memperkuat perkiraan tingginya angka *unwanted pregnancy* di Indonesia yang sekaligus menunjukkan gejala *premarital intercourse* yang sangat penting.

Aborsi yang telah menjadi praktik yang sangat problematis dalam memecahkan *unwanted pregnancy* ini karena aborsi masih ditanggapi secara pro dan kontra dalam masyarakat. Secara resmi tindakan aborsi masih dikategorikan sebagai tindakan ilegal sehingga dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Akibat tidak adanya legitimasi sosial dan politis terhadap tindakan aborsi maka keterlibatan dukun menjadi sangat penting. Hal ini kemudian menyebabkan banyak kematian anak dan ibu pada saat melakukan aborsi. Dalam satu kasus aborsi, misalnya, seorang ibu diberi minum air nenas muda yang dicampur dengan ramuan khusus. Setelah perut mules (sakit), dukun tersebut memijat perut pasien untuk mengeluarkan janin dari kandungan. Cara-cara seperti ini seringkali menyebabkan pendarahan yang kemudian menyebabkan kematian bagi pasien (ibu) (Emiyanti, 1998). Praktik serupa yang dilakukan secara meluas di Indonesia telah ikut menyumbangkan pada tingginya tingkat kematian maternal yang sangat membutuhkan tindakan kebijakan yang tepat.

Berbagai tindakan yang dilakukan oleh perempuan atau pihak lain banyak merugikan kaum perempuan. Keputusan-keputusan yang diambil dalam berbagai kejadian, seperti aborsi, merupakan tanda dari lemahnya posisi kaum perempuan dalam berbagai tahap reproduksinya.

Bias Gender dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi

Kelemahan kebijakan kesehatan reproduksi dapat dilihat dari tiga hal. *Pertama,* kebijakan yang ada cenderung memperlakukan perempuan sebagai "sasaran" atau korban. Program aksi seperti kondomisasi tampak lebih banyak merugikan perempuan karena perempuan ditempatkan sebagai pihak yang lebih berkepentingan dalam menjaga kesehatan. Contoh lain adalah dalam pelayanan aborsi, yang mana perempuan berada pada pihak yang harus mengalami penderitaan yang tidak diinginkannya. Keputusan melakukan aborsi dalam banyak kasus memperlihatkan lemahnya posisi perempuan dalam memutuskan untuk merawat kehamilan dan melahirkan anak.

Kedua, persoalan akses pelayanan kesehatan reproduksi. Jika pelayanan secara umum bersifat *public goods,* maka pelayanan kesehatan reproduksi dalam bentuk-bentuk tertentu tidak dapat dihadirkan sebagai fasilitas publik dalam arti yang sesungguhnya akibat pro dan kontra dalam persoalan seksual secara umum. Isu yang sejak lama belum selesai dan bahkan cenderung dilupakan dalam pembicaraan publik adalah "pendidikan seks di sekolah". Kaum remaja atau pasien tidak dapat mengakses informasi yang berkaitan dengan praktik seksual atau aspek-aspek reproduktif remaja. Oleh karena itu, informasi cenderung di dapatkan dari informasi yang salah. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai penyimpangan seks. Dalam berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi, kaum perempuan menjadi pihak yang disudutkan untuk bertanggungjawab atas penyimpangan-penyimpangan yang berlangsung. Perlindungan terhadap hak perempuan sangat terbatas dan

tidak berkualitas.

Ketiga, masalah kualitas pelayanan dimana pelayanan yang tersedia tidak memiliki kelengkapan informasi baik dalam pengertian obyektif maupun subyektif. Latar belakang sosial ekonomi pasien berpengaruh dalam persepsi dan penilaian mereka tentang kualitas suatu bentuk pelayanan. Peningkatan kualitas secara umum meliputi tingkat keahlian paramedis dan pendekatan yang digunakan dalam melayani kepentingan pasien. Perempuan yang menjadi pasien dalam pelayanan kesehatan reproduksi tidak mendapatkan pelayanan yang sesuai dengan hanya karena suami tidak turut memberdayakan posisi perempuan. Hal ini terutama akibat pengetahuan umum yang menilai kehamilan dan persalinan, misalnya, sebagai tanggungjawab perempuan.

Dalam mendapatkan pelayanan di atas maka masalah *advocacy* merupakan masalah penting dalam peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan mengingat posisi perempuan yang sangat lemah dalam struktur sosial. *Advocacy* bagi kaum perempuan tidak hanya memungkinkan peningkatan kemampuan mereka dalam mengakses berbagai bentuk pelayanan kesehatan reproduksi, tetapi juga memberdayakan perempuan dari berbagai tekanan yang mungkin muncul sebagai akibat dari suatu tindakan medis. Efek samping yang merugikan perempuan atas pemakaian suatu alat kontrasepsi dalam program *family planning* akan dapat dihindari atau dengan cara itu hak-haknya sebagai konsumen dapat diperoleh (Susilo, 1996: 173-174).

Kurangnya informasi telah menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang berbagai aspek kesehatan reproduksi dan juga menyulitkan kaum perempuan untuk mengakses berbagai pelayanan yang dibu-

tuhkan. Berbagai bentuk metode penyebaran informasi yang menyangkut penyimpangan seksual, cara mengatasi berbagai akibat, bahaya-bahaya yang mungkin timbul dari suatu praktik, bagaimna melakukan aborsi yang aman; dan berbagai hal yang berkaitan dengan ketimpangan gender atau kekerasan yang secara potensial dialami kaum perempuan, perlu diinformasikan secara lengkap melalui berbagai saluran. Berbagai bentuk informasi tertulis yang disebarluaskan melalui berbagai agen sosial dan seminar atau pelatihan perlu dilakukan yang dapat diakses oleh kelompok yang membutuhkan.

Lemahnya posisi perempuan dalam pelayanan reproduksi tampak dari berbagai hal, seperti; (1) Kurangnya informasi yang dapat di akses oleh kaum perempuan dan tidak dimilikinya keahlian menolong diri sendiri dalam kesehatan sehingga ketergantungan pada pihak lain sangat besar; (2) Tidak memiliki jaringan sosial yang kuat yang memungkinkan perempuan mampu melakukan tawar menawar dalam berbagai tindakan yang merugikan; (3) Lemahnya basis ekonomi perempuan yang menyebabkan ia tergantung pada pencari nafkah dan pada fasilitas kesehatan yang berkualitas rendah; (4) Lemahnya basis sosial yang dapat digunakan sebagai sumber legitimasi keberadaannya. Keempat faktor ini merupakan dasar dari berbagai bentuk tindakan yang merugikan kaum perempuan.

Reproduksi Sosial Gender dalam Kesehatan Reproduksi

Berbagai tahap reproduksi perempuan yang meliputi menstruasi, hubungan seksual, kehamilan, persalinan, aborsi, kemandulan, penyakit kelamin atau tergang-

gunya alat reproduksi, menopause, dan lain-lain membutuhkan pelayan yang tepat untuk menuju pada suatu keadaan reproduksi sehat. Dalam tahap-tahap tersebut seorang perempuan tidak hanya berhadapan dengan laki-laki, tetapi juga dengan berbagai pihak (unit) yang menentukan, seperti orang tua, mertua, bidan, dokter, perawat, dukun, anak dan lain-lain. Pihak-pihak tersebut memperlihatkan betapa besarnya ketergantungan seorang perempuan, seperti ibu hamil, dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesehatan reproduksinya. Kelahiran tidak hanya ditentukan oleh pasangan suami istri, tetapi juga oleh orang tua atau mertua. Dalam kasus perempuan mandul, peran orang tua atau mertua sangat dominan selain memberikan penilaian terhadap perempuan, juga dalam memutuskan berbagai tindakan yang perlu dilakukan, termasuk menceraikan istri yang *dianggap* mandul meskipun belum dilakukan pemeriksaan secara seksama.

Pola hubungan antar unit atau pihak yang begitu banyak merupakan persoalan yang penting yang menentukan bagaimana perempuan diposisikan dalam kesehatan reproduksinya sendiri. Jika hubungan satu pihak dengan perempuan merupakan suatu hubungan yang harmonis dan lebih memperlihatkan hak perempuan, maka proses reproduksi perempuan dapat berlangsung dengan baik; sebaliknya jika hubungan antara perempuan dengan pihak tertentu bersifat buruk, khususnya pada saat posisi tawar menawar perempuan lemah, maka perempuan akan mengalami berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Dalam hal ini perempuan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan dari pihak-pihak tersebut secara memuaskan. Hubungan ini juga harus dilihat dalam jaringan yang lebih luas yang melibatkan

relasi lebih dari satu, seperti hubungan ibu hamil dengan dokter dan dengan suami. Jika suami lebih peduli terhadap istri maka sang istri akan lebih berdaya di depan dokter karena suami ikut memberdayakannya. Suatu perlakuan yang diterima oleh perempuan dari orang tua/mertua dapat dikendalikan oleh kepedulian suami terhadap perempuan (istri).

Skema 1.
Posisi Perempuan dalam Pelayanan Kesehatan Reproduksi
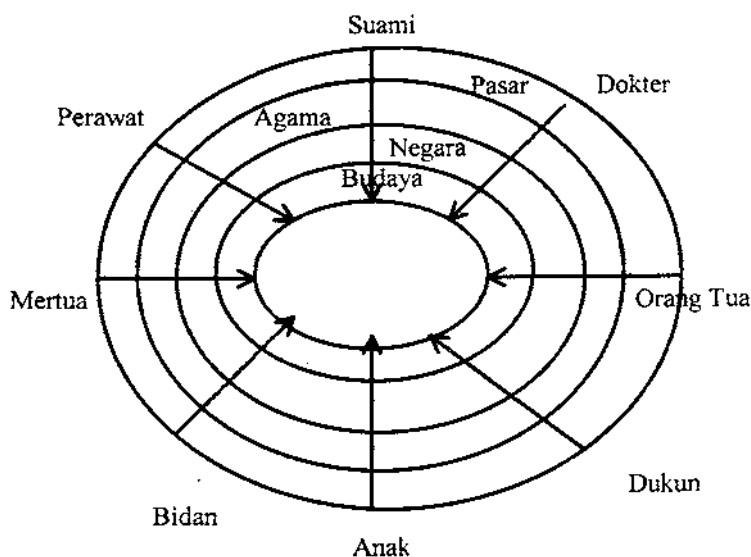
Hubungan-hubungan yang melibatkan berbagai pihak ini sesungguhnya diberi warna oleh kekuatan-kekuatan yang saling berinteraksi, seperti agama, budaya,

adat atau oleh ideologi pasar dan negara. Bukan rahasia lagi bahwa alat kontrasepsi yang dipilih dan cara pemasangannya terhadap perempuan ditentukan oleh kepentingan negara, seperti kasus IUD di Indonesia. Pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan tanpa menghiraukan hak reproduksi perempuan didasari pada ideologi negara dalam pembatasan kelahiran. Demikian juga pasar dapat saja mendikte jenis obat yang dikonsumsi tanpa diketahui dengan pasti efektivitas dan efek samping dari obat tersebut. Hak perempuan untuk mendapatkan informasi yang tepat seringkali diabaikan. Demikian pula agama dan adat telah ikut memberi corak dalam hubungan-hubungan sosial yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah. Interpretasi terhadap ayat-ayat tertentu dapat "merugikan" kaum perempuan.

Kesimpulan

Kesehatan reproduksi dalam wacana publik hampir menjadi persoalan kaum perempuan yang akibat-akibatnya diderita oleh alat kontrasepsi, kehamilan, aborsi, STD dan HIV/AIDS akibat tindakan laki-laki, maupun risiko-risiko kematian pada saat melahirkan. Hal-hal di atas sesungguhnya merupakan refleksi dari struktur sosial yang timpang yang menempatkan perempuan sebagai subordinat. Kebijakan yang berusaha mencakup persoalan reproduksi dan yang berkualitas tidak akan berhasil tanpa memperhitungkan kultur dan struktur hubungan gender yang ada dalam masyarakat Indonesia. Untuk itu berbagai perubahan sistemik diperlukan untuk memberdayakan kaum perempuan pada level kebijakan sehingga berbagai usaha perbaikan kesejahteraan kaum perempuan dapat diwujudkan.

Berdasarkan uraian dan skema 1 menjadi perlu dipertimbangkan bahwa persoalan penyadaran gender merupakan persoalan yang bertumpu pada tiga pilar. Ketiga pilar ini membentuk sistem yang solid yang proses transformasinya membutuhkan pemikiran yang serius dengan mempertimbangkan berbagai sumber yang tersedia. *Pertama,* penyadaran gender merupakan proses yang melibatkan unit-unit yang beragam dengan sifatnya masing-masing. Usaha penyadaran pada tingkat konseptual harus memahami masing-masing unit dengan mendalam sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah yang lebih strategis dan pada tingkat praktis unit-unit tersebut harus dilibatkan dengan berbagai pendekatan.

Kedua, penyadaran gender harus mempertimbangkan bentuk-bentuk relasi antar unit yang tidak hanya merupakan konstruksi yang mapan, tetapi juga telah di *back up* oleh serangkaian proses pelestarian dalam berbagai bentuknya. Hubungan orang tua dengan anak, misalnya, telah dikulturisasikan dan disosialisasikan dalam suatu seting historis yang panjang sehingga membutuhkan cara-cara yang benar-benar dipikirkan dengan matang. Hubungan dokter dengan pasien (perempuan) menegaskan suatu keyakinan tertentu yang telah mengakar, khususnya bagaimana dokter diposisikan dalam masyarakat dan dilegitimasi dengan berbagai cara.

Ketiga, penyadaran gender yang terkait dengan hak reproduksi perempuan harus dilihat dalam tataran ideologis yang telah menjadi kosmologi suatu masyarakat. Agama sebagai suatu ideologi yang menjadi faktor yang tidak hanya memberi corak pada serangkaian hubungan antar unit di mana perempuan diposisikan,

tetapi juga merupakan sumber legitimasi berbagai bentuk hubungan gender yang timpang. Wacana publik sangat banyak mengambil berbagai aspek agama sebagai sumber legitimasi untuk mencapai tujuan dan kepentingan individu, kelompok atau institusi. Keluarga, misalnya, cenderung menggunakan agama sebagai sumber legitimasi kekuasaan laki-laki atas perempuan atau kekuasaan orang tua terhadap anak-anak. Demikian pula ideologi negara dengan segala kepentingannya telah mengesampingkan hak-hak reproduksi perempuan dalam berbagai bentuknya. Penyadaran tentu saja tidak hanya melibatkan pendekatan negara terhadap masyarakat, tetapi juga harus dilakukan dengan mengubah paradigma yang digunakan di dalam hubungan negara dengan masyarakat itu sendiri.

Ketiga persoalan di atas menjadi suatu kebutuhan yang mendesak untuk dipikirkan dan dirumuskan dengan teliti dalam berbagai forum. Kesamaan persepsi kaum akademisi dan praktisi dalam hal ini merupakan usaha awal yang tidak dapat ditunda ●

Perempuan dalam Realitas Ekonomi

Bab Tujuh

Reproduksi Ketimpangan Gender: Partisipasi Wanita dalam Kegitan Ekonomi

MENINGKATNYA jumlah keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi ditandai oleh dua proses. *Pertama,* peningkatan dalam "jumlah perempuan" yang terlibat dalam pekerjaan di luar rumah tangga (*out door activities*). Hal ini antara lain dapat dilihat dari kenaikan tingkat partisipasi perempuan dari waktu ke waktu. Data Sensus Penduduk memperlihatkan TPAK wanita yang meningkat dari 32,43 pada tahun 1980 menjadi 38,79 pada tahun 1990 (BPS, 1992). *Kedua,* peningkatan dalam "jumlah bidang pekerjaan" yang dapat dimasuki oleh perempuan. Bidang-bidang yang sebelumnya masih didominasi oleh laki-laki berangsur-angsur dimasuki atau bahkan mulai didominasi oleh perempuan. Keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang pekerjaan

menjadi gejala yang mencolok sejak tahun 1980-an.[1]

Kedua bentuk perkembangan tersebut menandakan perkembangan kuantitatif yang penting dalam kehidupan perempuan. Hal ini bukan hanya karena menunjukkan kesempatan-kesempatan yang semakin terbuka bagi perempuan, tetapi juga karena penting artinya bagi analisis tentang makna perkembangan tersebut, baik bagi perempuan, laki-laki maupun masyarakat secara umum.

Peningkatan keterlibatan itu disebabkan oleh berbagai proses yang saling terkait, yang menyangkut pergeseran dalam diri perempuan sendiri, dalam sistem nilai dan normatif dan menyangkut perubahan peranan kelembagaan.[2] Kesempatan perempuan untuk keluar dari arena domestik dan bekerja di luar rumah (atau di luar desa dalam kasus perempuan migran) dapat dipengaruhi oleh kesadaran baru perempuan atau karena pergeseran sistem nilai yang memungkinkan perempuan meninggalkan rumah. Perubahan ini dapat juga dilihat sebagai tanda permintaan pasar tenaga kerja yang besar atau tanda dukungan kelembagaan yang memberikan jaminan bagi keterlibatan perempuan.

Namun demikian, peningkatan kuantitatif itu perlu dicermati pengaruhnya bagi peningkatan kesejahteraan perempuan karena fakta menunjukkan bahwa peningkatan keterlibatan perempuan secara umum terja-

---

[1] Meskipun demikian, perempuan hanya dapat memasuki sebagian kecil lapangan kerja dibandingkan dengan jumlah lapangan kerja yang dapat dimasuki oleh laki-laki (lihat Nasikun, 1990)

[2] Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi dapat juga didorong oleh tekanan ekonomi pasar yang mengubah tatanan sosial ekonomi, terutama menyangkut nilai barang dan uang dalam suatu masyarakat.

di dalam pekerjaan kasar.[3] Persentase perempuan yang terlibat dalam pekerjaan kasar meningkat dengan tajam, dari 9,2 persen pada tahun 1971 menjadi 15,07 persen pada tahun 1980, dan kemudian pada tahun 1990 menjadi 16,26 persen. Hal ini diikuti oleh penurunan dalam sektor A (khususnya pertanian). Dalam sektor tadi, seperti tenaga profesional dan kepemimpinan, tidak tampak peningkatan yang mendasar (BPS, 1975; BPS, 1989; BPS 1992).

Keterlibatan perempuan dalam pekerjaan kasar sesungguhnya memperlihatkan perluasan ketimpangan gender (Illich, 1982; Molo, 1993). Pembagian kerja secara seksual tidak hanya terjadi antara bidang domestik dan publik, tetapi dalam bidang publik pun terjadi segmentasi yang menempatkan perempuan dan laki-laki pada segmen yang berbeda. Karena itu, subordinasi dalam stratifikasi gender menunjukkan bentuk yang jelas dalam kehidupan ekonomi di mana perempuan berada pada posisi subordinat terhadap laki-laki. Seperti halnya perbedaan domestik dan publik,[4] stratifikasi dalam struktur ekonomi juga merupakan alat penegasan arah hubungan

---

[3] Perempuan semakin terlibat dalam pekerjaan fisik tidak layak dikerjakan oleh perempuan, seperti buruh di pasar-pasar buruh pembangunan jalan, buruh jahit (lihat Annisa, 1993; Suratiah dan Hardyastuti, 1990; Partini, et al, 1990).

[4] Pembagian struktur yang menempatkan perempuan dalam bidang domestik dan laki-laki dalam bidang publik sesungguhnya merupakan struktur yang membedakan wilayah kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Karena bidang yang lebih penting didalam keseluruhan proses sosial maka perempuan cenderung terubordinasi karena ia menempati bidang yang kurang penting. Statistik resmi yang tidak menghitung keterlibatan perempuan dalam pekerjaan rumah tangga, sesungguhnya merupakan salah satu bentuk diskriminasi.

kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Bidang-bidang pekerjaan penting dan berupah tinggi cenderung dikerjakan oleh laki-laki. Meskipun perempuan mengerjakan jenis pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan laki-laki, ia mendapatkan upah yang lebih rendah. Tunjangan keluarga bagi pekerja perempuan juga cenderung tidak diperhitungkan. Diskriminasi semacam ini tidak selalu disebabkan oleh kapasitas perempuan terbatas (seperti tingkat pendidikan dan keahlian yang terbatas), tetapi seringkali disebabkan oleh faktor ideologis Oppenheimer, 1977; West dan Zimmerman, 1991).

Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat pada struktur budaya yang menilai bahwa laki-laki mewakili kebudayaan obyektif dan perempuan mewakili kebudayaan subyektif di manaperempuan harus dikenakan proses obyektifikasi terus menerus untuk mencapai suatu yang obyektif, dengan ukuran-ukuran yang *bias* laki-laki (Vucht, 1991; Rosaldo, 1974). Proses ini sejalan dengan tranformasi yang digambarkan MacCormack dari *nature* (perempuan) ke *culture* (laki-laki) yang merupakan proses penaklukan *culture* terhadap *nature* (MacCormack, 1980). Karena itu, dalam kehidupan ekonomi terjadi subordinasi yang terus menerus terhadap perempuan. Struktur hubungan yang timpang semacam ini, yang memiliki akar sosial budaya yang kuat, direproduksi melalui berbagai bentuk wacana dalam kehidupan ekonomi yang melibatkan perempuan.

Tulisan ini ingin menjelaskan mengapa ketimpangan semacam ini dapat terjadi dan membentuk suatu realitas sosial. Analisis terutama dititikberatkan pada bagaimana ketimpangan gender dipelihara (dilestarikan) melalui berbagai proses yang menyebabkan partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi tidak mengalami

perkembangan kualitatif. Pengkajian dilakukan dengan melihat pada tiga bidang penjelasan. *Pertama,* dengan melihat pada akar sosial budaya di mana ketimpangan gender itu tersusun menjadi suatu realitas obyektif. *Kedua,* melihat pada proses pemberian makna dan pemeliharaan ketimpangan itu secara terus menerus. *Ketiga,* melihat pada integrasi pasar yang memiliki peran penting dalam proses segmentasi yang kemudian menempatkan perempuan pada segmen tertentu dan laki-laki pada segmen yang lain. Ketiga proses tersebut dikaji secara rinci pada bagian-bagian berikut.

Akar Sosial Budaya Gender

Kecenderungan laki-laki diorientasikan ke bidang publik dan perempuan ke bidang domestik telah memproduksi ketimpangan kekuasaan antara kedua jenis kelamin.[5] Perempuan lebih bertanggung jawab terhadap keluarga dan segala kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga, seperti pengasuhan anak. Laki-laki terlibat langsung dalam bidang ekonomi dan politik (sebagai kegiatan publik) yang dianggap sebagai institusi utama dalam masyarakat modern (Chafetz, 1991).

Dalam proses sosialisasi perempuan cenderung dihubungkan dengan kegiatan domestik tersebut, yang dianggap sebagai kegiatan yang "kurang" penting dalam perkembangan masyarakat modern yang bertumpu pada

[5] Perbedaan ini juga dapat diperluas dengan melihat kecenderungan bahwa perempuan lebih terlibat dalam bidang konsumtif, sementara laki-laki dalam bidang produktif. Perbedaan bidang ini juga menunjukkan adanya negosiasi kekuasaan antara laki-laki yang menguasai sektor produksi, maka perempuan juga akhirnya berada di bawah kontrol laki-laki.

proses produksi dan birokrasi. Asosiasi semacam ini telah mereproduksi ketimpangan gender yang terus menerus, karena dalam proses sosialisasi perempuan disosialisasikan ke dalam suatu nilai dan ukuran sosial budaya yang kemudian pilihan-pilihannya ditentukan oleh laki-laki atau dalam kerangka struktural yang patriarkhal.

Kedudukan perempuan karenanya dibingkai oleh tatanan yang terpusat pada laki-laki yang ditegaskan oleh lembaga-lembaga pendukung (Solomon, 1988). Mitos-mitos telah dibangun untuk mengatakan bahwa tempat laki-laki adalah di dunia kerja dalam perjuangannya untuk hidup, sementara tempat perempuan di rumah mengatur rumah tangga dan merawat anak (Solomon, 1988). Dalam kerangka inilah definisi siapa itu perempuan dan bagaimana "menjadi perempuan" dirumuskan. Enggawati Tedjasukmana menulis:

> Ketika saya masih kecil, tertanam pendidikan dari orang tua yang menyebabkan anak-anak wanita tidak terlalu berambisi menjadi wanita karier. Tidak ada pilihan hidup bagi gadis-gadis selain menjadi istri dan ibu bagi suami dan anak-anaknya kemudian. Banyak keluarga yang mengejek anak perempuan menjadi juara kelas tapi tidak dapat menanak nasi... Keluarga yang mempunyai gadis sangat khawatir apabila anak-anaknya tidak dapat mendapatkan jodoh. Rupanya prestasi tertinggi nilainya bagi seorang wanita adalah apabila ia berhasil menikah dan mempunyai anak (Tedjakusuma, 1990).

Proses sosialisasi semacam ini telah membatasi pilihan-pilihan hidup perempuan. Sesuatu yang berada di luar dapur, anak, rumah tangga, dianggap bukan sebagai tempat yang sesuai bagi perempuan.

Keluarga, sekolah, bacaan, dan televisi telah menjadi sumber pengetahuan tentang bagaimana menjadi perempuan yang ideal, yang sesuai dengan tatanan sosial. Yang sangat penting adalah institusi semacam ini telah menegaskan suatu bentuk hubungan laki-laki dan perempuan dalam berbagai praktek kehidupan. Proses internalisasi mengakar dalam institusi tersebut yang telah menjadi dasar di mana laki-laki tetap ditonjolkan. Proses semacam ini merupakan konstruksi yang secara terus menerus menegaskan suatu realitas obyektif yang memiliki daya paksa (Berger dan Luckmann, 1979). Apa yang diajarkan dalam keluarga dan institusi lain dapat berarti sesuatu yang memang dihasilkan oleh keluarga itu sendiri dan pada saat yang sama juga merupakan artikulasi dari nilai dan norma yang berlaku secara sosial. Perbedaan domestik dan publik ditentukan oleh proses pemaknaan yang bersumber dari dunia makna (*universe of meaning*) yang merupakan pedoman kehidupan (Berger dan Luckmann, 1979).

Pengaruh akar sosial budaya dalam mengasosiasikan perempuan sebagai kelompok orang yang memiliki ciri tertentu telah memberi warna dalam keterlibatan ekonomi perempuan. Pemaknaan keterlibatan ekonomi perempuan ditentukan oleh sistem ideologi yang memberi kemungkinan dan batasan. Ideologi ini terwujud dalam etos kerja yang mempengaruhi keterlibatan perempuan karena ia kemudian membentuk etika kehidupan yang evaluatif. Ukuran-ukuran nilai dan keterlibatan perempuan ditentukan oleh etika-etika tersebut. Proses sosialisasi perempuan yang cenderung mengasosiasikan perempuan dengan kegiatan domestik dan sifat kewanitaan, meyebabkan terjadinya proses identifikasi pekerjaan-pekerjaan publik yang sesuai dengan sifat perempu-

an. Dapat dilihat kecenderungan bahwa perempuan ternyata terlibat dalam sektor-sektor yang sudah terpola dan terpusat pada pekerjaan-pekerjaan yang bersifat "menerima perintah", seperti sekretaris, resepsionis, *waitress,* atau pembantu rumah tangga (Kanter, 1977). Perbedaan perempuan dengan laki-laki yang telah disosialisasikan dalam keluarga kemudian terefleksi dalam kecenderungan "menerima perintah" dan "memberi perintah" (Collins, 1991). Orang yang memberi perintah (laki-laki) mengidentifikasikan dirinya dengan cita-cita organisasi dan teridentifikasi dengan hubungan-hubungan informal (Collins, 1991). Perempuan sebagai penerima perintah, di dalam suatu struktur kekuasaan, berada pada posisi yang lemah dan terlibat secara mendalam dengan hubungan-hubungan personal yang mempengaruhi ukuran-ukuran kedudukan dan kesempatan.[6]

Kalaulah pilihan-pilihan pekerjaan yang diambil perempuan itu dapat dikatakan sebagai pekerjaan marginal,[7] maka proses marginalisasi itu merupakan proses yang dimulai dalam keluarga, di sekolah, terdapat dalam bacaan, dipelajari melalui televisi, dan dikuatkan secara sosial pada saat kedudukan marginal itu merupakan

---

[6] Hal ini dapat disebut sebagai *idelogical discount rate* yang harus dibayar oleh perempuan pada saat ia ingin sejajar dengan laki-laki. Jika seorang perempuan ingin memasuki suatu bidang pekerjaan, ia tidak hanya harus memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, tetapi ia juga harus memiliki nilai tambah yang lain, seperti kecantikan dan penampilan, lihat Oppenheimer, *op.cit.*

[7] Saya mengikuti Anita van Velzen dalam mendefinisikan marginal dan marginalisasi. Marginalisasi kata Velzen, adalah "...a process by which relations between women and men change in such a way that women are increasingly cut off from having access to vital resources, which become monopolised by men" (lihat Velzen, 1994; Scott,(Vol 22 No. 4); Grijns et al. (ed.), 1992).

realitas obyektif. Realitas ini disahkan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan etika-etika kehidupan yang tersusun dengan kokoh sejalan dengan proses pembentukan identitas tersebut dengan berbagai sistem ideologi. Subordinasi perempuan karena itu merupakan pilihan-pilihan yang dilakukan oleh perempuan sendiri, sebagai hasil dari interaksi dan negosiasi antara kepentingan-kepentingan perempuan dan kepentingan umum dalam suatu masyarakat.

Memitoskan Ketimpangan Gender dalam Ekonomi

Konstruksi sosial yang menempatkan perempuan dalam struktur subordinat dalam berbagai kegiatan ekonomi, baik antarsektor maupun di dalam sektor tertentu, telah menjadi penghalang utama bagi perempuan untuk memperoleh kesempatan yang lebih baik (Chafetz, 1991). Struktur yang timpang, yang menempatkan laki-laki pada ujung yang satu dan perempuan pada ujung yang lain dalam suatu garis vertikal, telah membedakan wilayah-wilayah ekspresi di mana perempuan dan laki-laki terlibat. Perbedaan pekerjaan semacam ini telah memberi basis kekuasaan pada laki-laki,[8] yang secara langsung menegaskan superioritas laki-laki dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Dua hal dapat disebutkan berkaitan dengan ketimpangan gender semacam ini. *Pertama,* pekerjaan-pekerjaan marginal yang dikerjakan oleh perempuan

[8] Dalam hal ini tidak dipertanyakan apakah dominasi laki-laki ditolak atau diterima oleh perempuan. Dapat saja terjadi bahwa perempuan menerima karena menganggapnya sebagai suatu realitas yang sah. Penolakan dapat berbentuk konflik hubungan dan protes-protes sosial.

dapat dilihat sebagai akibat dari proses identifikasi perempuan terhadap apa-apa yang sesuai dengan sifat kewanitaan seperti yang sudah dikonstruksikan secara sosial. Identifikasi ini merupakan proses pemaknaan diri dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perempuan sehingga berbagai faktor diperhatikan di dalamnya. Keterlibatan dalam kegiatan ekonomi yang marginal karena itu merupakan hasil dari suatu proses interaksi dan negosiasi di mana perempuan sendiri aktif di dalamnya. Dalam perspektif semacam ini kemudian ketimpangan gender tidak lain merupakan pilihan perempuan, bukan pemaksaan terhadap perempuan.[9]

Hal ini sejalan dengan definisi "menjadi perempuan" yang dinilai sama dengan menjadi istri atau ibu rumah tangga. Berninghausen dan Kerstan menanyakan "ciri-ciri apa yang harus dimiliki oleh seorang wanita yang baik" kepada 94 perempuan di sebuah desa (Berninghausen dan Kerstan, 1992). Hanya enam responden yang mengatakan bahwa seorang perempuan harus mencari uang. Yang lain menjawab perempuan harus menjadi ibu yang baik (54 orang), seorang istri yang baik dan patuh (27 orang), dan seorang ibu rumah tangga (17 orang). Peran domestik sangat ditekankan oleh perempuan desa, meskipun ini tidak menggambarkan apa yang sesungguhnya mereka kerjakan sebagai perempuan desa. Perempuan desa melakukan peran yang kompleks karena ia terlibat dalam kegiatan rumah tangga, kegiatan ekonomi (dalam pertanian, industri, atau perdagangan kecil-kecilan), sekaligus kegiatan-kegiatan sosial (Abdul-

[9] Pada tahap awal pemaksaan dapat saja terjadi, namun pemaksaan itu belum tentu berarti bahwa perempuan terpaksa melakukannya. Perempuan melakukan sesuatu karena alasan-alasan yang jelas dan suatu sikap tertentu yang juga jelas bagi perempuan sendiri.

lah, 1991). Namun demikian, peran domestik perempuan mendapatkan penekanan yang cukup kuat oleh perempuan sendiri. Dan ini merupakan pilihan yang secara sosial mendapatkan pengesahan.

Kedua, berbagai proses telah mereproduksi sifat kewanitaan dan kenyataan tentang pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan sifat kewanitaan tersebut. Tingkat absensia perempuan yang tinggi (karena perempuan membutuhkan cuti hamil dan melahirkan) seringkali dijadikan alasan untuk tidak memilih perempuan atau untuk menempatkan perempuan dalam pekerjaan marginal.[10] Citra kehalusan dan ketelatenan yang menjadi ciri khas perempuan telah pula digunakan sebagai "alasan" untuk memberikan pekerjaan-pekerjaan marginal. Pekerjaan yang berkaitan dengan "mesin" tetap saja menjadi bidang yang diasosiasikan dengan laki-laki. Dengan cara ini kembali ditegaskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan perempuan bukanlah pekerjaan yang membutuhkan keahlian sehingga perempuan layak mendapat upah yang rendah. Hal ini merupakan penegasan dari oposisi *biner* yang membedakan laki-laki/perempuan, kultur/natur, positif/negatif, analisis/intuitif, rasional/emosional, yang hidup dalam pikiran manusia dan tanpa disadari menjadi bahan pertimbangan dalam rekruitmen tenaga kerja.

[10] Seringkali terjadi bahwa perempuan tidak memperoleh jaminan untuk mengambil cuti hamil dan melahirkan dari perusahaan di mana mereka bekerja. Pada saat perempuan kembali bekerja setelah melahirkan, dalam banyak kasus mereka tidak dapat diterima kembali sebagai karyawan atau buruh karena posisinya telah digantikan oleh orang lain. Mobilitas tenaga kerja perempuan yang tinggi dimanfaatkan sebagai mekanisme untuk menekan upah karena faktor masa kerja tidak menjadi unsur penting dalam situasi tersebut.

Pekerjaan marginal diasosiasikan dengan sifat-sifat tersebut, seperti halus dan telaten sehingga pekerjaan-pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan-pekerjaan yang kurang penting atau berupah rendah. Meskipun perempuan memiliki keahlian tertentu, tidak berarti bahwa ia akan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya karena suatu ideologi yang mempengaruhi suatu cara pandang, yang secara langsung diasosaikan dengan pekerjaan kasar meskipun sebagian dari mereka memiliki keahlian yang tinggi (Kelly, 1991; Humphrey, 1987) Mies, 1988).

Dalam proses selanjutnya partisipasi perempuan tidak hanya mengalami proses marginalisasi, tetapi juga terganggu oleh penggusuran keberadaan perempuan dalam bidang-bidang pekerjaan tertentu. Hal ini ditandai oleh proses maskulinisasi, di mana pekerjaan yang semula didominasi oleh perempuan lambat laun dikerjakan oleh laki-laki.[11]

Ketimpangan gender sesungguhnya ditegaskan terus menerus oleh struktur sosial yang patriarkhal, laki-laki dan perempuan. Perempuan cenderung mengalah pada suami dalam sutu struktur hubungan. Tindakan ini merupakan tindakan pemeliharaan hubungan yang harmonis yang sekali lagi menegaskan bahwa perempuan tidak memandang kegiatan ekonomi sebagai dunia perempuan. Dunia perempuan tetap ibu rumah tangga sehingga perempuan ideal adalah ibu rumah tangga

[11] Perdagangan di pasar-pasar yang dianggap bidang feminim, secara perlahan-lahan mulai dimasuki oleh laki-laki. Demikian pula pekerjaan-pekerjaan pemetikan teh yang mulai tampak keterlibatan laki-laki di dalamnya. Maskulinisasi ini antara lain merupakan tanda dari kesempatan kerja yang terbatas sementara tekanan ekonomi keluarga semakin berat.

yang baik (Tedjasukmana, 1990; Berninghausen dan Kerstan, 1992). Apa yang ditulis di kulit belakang buku La Rose menunjukkan ekspresi umum tentang kegelisahan pencarian sosok perempuan:

> Masalah yang dihadapi kaum wanita kian hari semakin banyak semakin sulit semakin rumit semakin kompleks. Karena wanita harus ada di mana-mana, di pabrik, di kantor, di dalam organisasi sosial, bahkan di posisi penting pemerintahan; sementara letak dasar wanita paripurna harus tetap di dalam rumah tangga, di samping suami, di jangkauan anak-anak tercinta, di lingkungan keluarga, di ajang pergaulan sesama manusia. Justru di situ letak masalah, kian hari, kian banyak persoalan yang dihadapi, wanita cenderung kian lalai pada fitrahnya (La Rose, 1995).

Dari sini jelas bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama secara aktif mereproduksi ketimpangan gender, karena mereka sama-sama memitoskan ketimpangan. Ketimpangan gender di sini ternyata tidak hanya menyangkut dikotomi sosial, perempuan dan pemerintah, perempuan dan pelaku-pelaku ekonomi.

Integrasi Pasar dan Realitas Ekonomi Perempuan

Peningkatan keterlibatan perempuan dalam berbagai pekerjaan berhubungan langsung dengan internasionalisasi dan globalisasi ekonomi. Dalam iklim yang kompetitif tenaga kerja perempuan dibutuhkan untuk mendukung suatu bentuk kegiatan ekonomi yang kapitalistik. Perempuan yang diasosiasikan sebagai pekerja

kasar dan tidak memiliki keahlian secara langsung memenuhi prasyarat perusahaan atau industri yang berusaha menekan biaya produksi untuk bersaing dalam pasar yang cenderung bebas.

Tenaga kerja perempuan yang murah (seperti juga tenaga kerja anak-anak) diperlukan untuk menekan biaya produksi.[12] Perempuan dalam hal ini terlibat dalam sektor-sektor sekunder,[13] yang tidak hanya berupah rendah, tetapi juga tidak memiliki jaminan sosial, tidak ada prospek untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan tidak memiliki kesempatan yang luas untuk mengikuti pelatihan. Untuk meraih kesempatan yang sejajar dengan laki-laki, seorang perempuan tidak hanya harus memiliki kapasitas yang sebanding, tetapi harus membayar biaya ideologis tambahan. Penampilan dan daya tarik merupakan kapital penting di dalam membayar biaya ideologis ini.

Penempatan perempuan dalam pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian, akibat kecenderungan *deskilling* (Beechey dan Perkins, 1987), yang dilakukan oleh perusahaan yang kapitalistik, merupakan tanda penting tentang bagaimana perempuan dinilai. Rekrutmen tenaga kerja perempuan secara besar-besaran terjadi, bahkan perempuan-perempuan muda dipilih untuk berbagai pekerjaan industri.[14] Perempuan dipekerjakan

---

[12] Di sini menarik diperbincangkan, mengapa perempuan dapat dibayar lebih murah daripada laki-laki. Apakah karena perempuan dinilai mau menerima upah yang murah sekalipun, sementara laki-laki tidak.

[13] Untuk pembagian sektor ini dan kondisi yang menyebabkan kecenderungan perempuan terlibat dalam sektor sekunder (lihat Kelly, 1991)

[14] dalam perkembangan ekonomi global kompetisi bersifat terbuka yang membutuhkan kemampuan managerial dan fungsi kontrol

sebagai pekerja hiburan di Jepang, pembantu rumah tangga di Arab Saudi, atau buruh perusahaan Hong-kong. Rekrutmen tenaga kerja perempuan muda dilakukan secara besar-besaran untuk diperkerjakan antara lain dalam industri elektronika di Batam. Dalam rekrutmen ini perempuan selalu diperlakukan sebagai orang dungu, dianggap tidak memiliki keahlian, dan tidak memiliki komitmen terhadap pekerjaan sehingga secara ideologis perempuan tersegmentasi ke dalam pekerjaan-pekerjaan rendahan.[15]

Definisi memiliki keahlian dan tidak memiliki keahlian di sini mengandung permasalahan karena definisi itu merupakan konstruksi sosial dan ideologis yang berkaitan dengan gender (Beechey dan Perkins, 1987; Cockburun, 1983). Pekerjaan perempuan memang cenderung diklasifikasikan sebagai pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian atau semi-keahlian, bahkan untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang rumit dan pekerjaan yang merupakan proses terpenting dalam produksi suatu barang (Braverman, 1983). Komposisi gender yang mencolok semacam ini sesungguhnya merupakan tanda dari kenyataan bahwa kegiatan ekonomi telah mengalami proses degradasi akibat pem-

---

perusahaan yang rumit. Dalam berbagai kasus diperilihatkan bahwa ketimpangan gender justru merupakan refleksi dari tekanan-tekanan yang dialami perusahaan-perusahaan dalam bersaing, yang ini umum di berbagai tempat di Asia. Kecenderungan rekrutmen tenaga kerja perempuan usia muda bahkan merupakan hal yang menyolok (lihat S.Sassen-Koob, 1984).

[15] Hal ini dipengaruhi oleh kodrat biologis perempuan yang mengharuskan perempuan absen pada saat hamil, misalnya. Yang menarik adalah mengapa kodrat semacam ini digunakan untuk melemahkan perempuan tidak dinilai sebagai keadaan yang harus diakui dan diterima.

buruan kapital untuk keuntungan yang lebih besar (Beechey dan Perkins, 1987).

Ketimpangan dalam hubungan ekonomi juga dapat dilihat dalam tindakan sewenang-wenang yang menimpa perempuan, seperti kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Tidak ada jaminan keamanan dan hukum yang membuat perempuan memiliki kekuatan untuk terlibat dalam suatu pekerjaan. Pelecehan ternyata tidak hanya dilakukan oleh mandor atau atasan, tetapi oleh laki-laki secara umum. Teman kerja dapat menjadi pengganggu yang cukup potensial. Gangguan yang dialami perempuan seringkali memaksa perempuan untuk keluar dari suatu pekerjaan dan mencari pekerjaan lain, meskipun dapat saja terjadi bahwa perempuan itu mengalami hal yang serupa di tempat yang baru.[16]

Reproduksi ketimpangan gender semacam ini, yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi yang kapitalistik atau laki-laki, bukan tidak mendapatkan reaksi sama sekali. Protes buruh dapat dianggap sebagai bentuk reaksi terhadap keadaan yang memburuk yang menjadi beban semakin berat yang harus dipikul oleh perempuan. Gerakan-gerakan pembela hak-hak perempuan menegaskan bahwa perempuan memiliki kesadaran dan tidak begitu saja menerima perlakuan-perlakuan yang tidak adil. Protes-protes itu sendiri menunjukkan suatu bentuk tawar-menawar kekuasaan yang merupakan suatu kondisi ketika perempuan mulai mempertanyakan keabsahan citra dan realitas yang dibangun untuknya.

---

[16] Persoalan semacam ini dilaporkan secara rinci dalam tabloid Annisa, 1993.

Penutup

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi merupakan masalah kultural dan struktural. Dimensi kultural menyangkut sistem ideologi yang memberi pengaruh di dalam pembentukan cara pandang perempuan, laki-laki dan cara pandang masyarakat terhadap kegiatan ekonomi dan terhadap perempuan. Pada saat ideologi menjadi pembatas ruang gerak perempuan maka etos kerja perempuan tidak akan terbentuk karena wilayah-wilayah ekspresi perempuan telah dirumuskan dalam kepala setiap orang. Cara pandang yang melihat perempuan sebagai obyek telah menghasilkan tindakan yang membatasi kesempatan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi. Kemungkinan partisipasi itu juga ditentukan oleh dukungan sistem nilai yang menegaskan adanya suatu alat ukur yang dipatuhi bersama, di mana perempuan mengalami subordinasi. Namun demikian, perubahan pemaknaan sedang terjadi disebabkan oleh kesadaran baru dalam diri perempuan dan laki-laki. Partisipasi perempuan kemudian meningkat sejalan dengan perubahan itu, tapi perempuan harus membayar biaya ideologis yang besar atas keterlibatannya itu.

Partisipasi ekonomi perempuan terikat pula pada perubahan struktur ekonomi yang telah membuka peluang baru bagi perempuan dalam berbagai pekerjaan. Namun demikian, keterlibatan ini justru mereproduksi ketimpangan gender karena perusahaan-perusahaan yang berorientasi pada pencarian keuntungan dan berorientasi global membutuhkan tenaga perempuan untuk menekan biaya produksi. Tenaga perempuan sama dengan tenaga murah yang memungkinkan perusahaan-

perusahaan bersaing dalam pasar yang bebas dan kompetitif. Untuk kepentingan tersebut, kapitalisme telah mereproduksi "kelemahan biologis perempuan" untuk mensahkan suatu bentuk tindakan ekonomi. Tindakan sewenang-wenang atau pelecehan di tempat kerja yang dialami perempuan merupakan tanda bagaimana sifat-sifat perempuan menjadi bagian penting dalam proses kerja, sehingga partisipasi tidak hanya ditentukan oleh kapasitas yang dimiliki tetapi oleh ideologi tentang "tenaga kerja perempuan".[17]

Fakta menunjukkan bahwa begitu banyak kendala yang harus dihadapi perempuan dalam partisipasi ekonomi, baik yang bersifat kultural maupun struktural. Sejalan dengan ini menarik untuk dipertanyakan, mengapa perempuan tetap terlibat dalam kegiatan ekonomi meskipun harus menghadapi berbagai hambatan? Tentu ada keuntungan yang diperoleh perempuan atas keterlibatan itu, karena bagaimanapun terjadi proses pemaknaan atas keterlibatannya dalam berbagai bidang pekerjaan. Ketimpangan gender yang direproduksi oleh laki-laki atau oleh agen-agen kapitalisme bisa saja tidak dianggap sebagai sebuah ketimpangan, tetapi merupakan sebuah struktur yang harmonis, ketika perempuan memang menempatkan dirinya di satu ujung garis vertikal. Meskipun protes buruh perempuan dapat dilihat sebagai tanda adanya reaksi perempuan terhadap struktur yang timpang, keberadaannya perlu dilihat sebagai bentuk kesadaran baru yang menghasilkan definisi baru tentang hubungan perburuhan secara umum.

---

[17] Kita tidak mengenal istilah TKL (Tenaga Kerja Laki-laki) atau laki-laki karier karena pertisipasi perempuan dalam bidang ekonomi masih dipandang sebagai sesuatu yang asing, bukan merupakan suatu realitas obyektif, sehingga perlu diberi nama khusus.

Berdasarkan kenyataan ini dapat dikatakan bahwa kita membutuhkan perspektif perempuan untuk mengetahui dengan pasti apa sesungguhnya yang diinginkan perempuan dan bagaimana perempuan mengkonsepsikan keterlibatannya dan memandang struktur yang disebut sebagai ketimpangan gender.[18] Sekedar menunjukkan hubungan yang tidak seimbang atau hierarkis antara laki-laki dan perempuan tidaklah memecahkan masalah apa pun karena sebagai sebuah struktur, ketimpangan itu terus dilestarikan melalui berbagai wacana. Dalam hal ini perempuan sendiri telah ikut mereproduksi ketimpangan itu dengan kekhawatirannya dan dengan mensahkan cara pandang dan tindakan laki-laki bias gender ●

---

[18] Dua orang pegawai sebuah bank yang ingin menikah, harus memutuskan salah satu diantara mereka untuk meninggalkan pekerjaannya sebagai pegawai bank tersebut. Hal ini sesuatu dengan peraturan yang berlaku. Perempuan dalam kasus semacam ini cenderung mengalah, ia berhenti bekerja. Mengapa perempuan merasa dikalahkan oleh sistem semacam ini karena ia melakukannya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Contoh yang menarik adalah apa yang ditulis tentang pembantu rumah tangga yang menerima nasibnya secara total sebagai perempuan yang melayani kepentingan orang lain (laki-laki)(lihat Linus Suryadi A.G., 1987).

Bab Delapan

Perempuan Bakul di Pedesaan Jawa

KETERLIBATAN perempuan desa dalam sektor perdagangan sangat menonjol sehingga tampak bahwa sektor perdagangan di desa didominasi oleh perempuan. Tingkat partisipasi perempuan yang tinggi di bidang perdagangan bertolak belakang dengan anggapan umum tentang perempuan. Perempuan dianggap sebagai golongan masyarakat yang "lembut dan halus budi", padahal pekerjaan berdagang dianggap bernilai rendah karena penuh dengan tipu muslihat. Mengapa mereka memilih dunia ini dan bagaimanakah mereka melakukan kegiatan perdagangan di samping kedudukan mereka sebagai ibu rumah tangga? Dua pertanyaan di atas menjadi sasaran pembahasan tulisan ini.

Kegiatan perdagangan masih dikaitkan dengan ciri-ciri yang bersifat negatif, seperti penipuan dan dan

hal-hal yang bernilai tidak baik (Geertz, 1982; Burger, 1983). Kalangan masyarakat petani juga menganggap bahwa pekerjaan di luar pengolahan tanah, di antaranya perdagangan, adalah pekerjaan kurang baik karena dilakukan oleh orang yang tidak tahan bekerja keras, di samping itu, perdagangan merupakan arena permainan mengadu untung (Redfield, 1982:92-93). Pandangan negatif terhadap perdagangan dalam masyarakat Jawa merupakan suatu warisan yang ditinggalkan oleh kalangan priyayi dan muncul sejak awal masuknya perdagangan dalam perekonomian Indonesia, khususnya ke Jawa. Kalangan priyayi Jawa beranggapan bahwa perdagangan dan pekerjaan kasar lainnya bernilai rendah (Burger, 1983: 70-78). Anggapan ini nampaknya berasal dari dua hal. *Pertama,* seluruh perilaku perdagangan bertujuan untuk memperoleh keuntungan sehingga ada pihak yang dirugikan. Hal ini bertentangan dengan kebudayaan "halus". *Kedua,* kaum pedagang umumnya berasal dari kalangan wong cilik yang telah mengalami kenaikan status menjadi golongan menengah yang secara ekonomis mengungguli kalangan priyayi. Persaingan di bidang ekonomi ini memaksa kaum priyayi untuk menanamkan nilai-nilai negatif terhadap dunia perdagangan agar secara kultural mereka tetap menjadi golongan elite.

Keterlibatan perempuan dalam dunia perdagangan di desa tampaknya tidak terpengaruh oleh nilai negatif yang dibangun oleh kaum priyayi. Pada saat memilih berdagang, mereka tidak memperhatikan anggapan yang negatif dari pekerjaan itu, tetapi mempertimbangkan bahwa dunia perdagangan memberikan peluang kerja yang coçok bagi dirinya untuk memperoleh pendapatan teratur (Stoler,1975:29). Di samping itu, dunia perdagangan memberi kemungkinan yang besar bagi keterli-

batan perempuan karena pekerjaan ini sesuai dengan kemampuan fisik alamiah perempuan. Hal ini berkebalikan dengan pekerjaan bidang pertanian yang membutuhkan kemampuan fisik lebih besar dari yang secara alamiah dimiliki oleh perempuan (Deere dan de Leal, 1982:117).

Pandangan di atas tidak begitu tepat karena di banyak masyarakat perempuan secara aktif dalam bidang pertanian, bahkan dalam kegiatan mencangkul. Menurut Alexander, perempuan mampu berperan baik dalam aktivitas tawar-menawar yang merupakan unsur pokok dalam dunia perdagangan karena perempuan bersifat lebih *telaten* (Alexander. 1987: 44). Penelitian Szanton di Aetancia menunjukkan bahwa kegiatan tawar menawar membutuhkan kesabaran, kemampuan berbicara dan keberanian mengatakan "tidak" yang semua ini merupakan kekuatan perempuan (Szanton, 1972: 85).

Pembagian jenis pekerjaan berdasarkan jenis kelamin, yakni laki-laki di bidang pertanian dan perempuan di bidang perdagangan, sudah lama berlangsung (Raffles, 1978: 112-113 dan 198-199). Mensejajarkan kedua jenis pekerjaan ini dengan jenis kelamin pekerjanya tepat, artinya pekerjaan di bidang perdagangan memang lebih cocok untuk perempuan, walaupun tidak ada pembatasan secara ketat. Perempuan masih bisa terlibat dalam bidang pertanian, seperti memanen, dan laki-laki dapat pula terlibat dalam bidang perdagangan, seperti membantu perempuan mengumpulkan dan mempersiapkan barang dagangan. Kesejajaran kedua jenis pekerjaan ini terbukti dari data hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari suami perempuan pedagang bekerja di bidang pertanian baik sebagai petani sendiri maupun buruh tani.

Sejarah telah membuktikan bahwa dunia perdagangan di desa tidak bisa dilepaskan dari peranan kaum perempuan. Perempuan, selain bekerja sebagai pedagang, juga merupakan ibu rumah tangga yang harus bertanggung jawab, bahkan dituntut untuk berperan penuh dalam mengelola rumah tangga. Peranan perempuan semakin rumit karena ia juga merupakan anggota masyarakat yang selalu dilibatkan dalam lingkungan sekitarnya. Tulisan ini menjelaskan mengapa perempuan bekerja sebagai pedagang dan bagaimana perempuan pedagang memerankan kedudukannya di pasar dan dalam aktivitas pedagangan, dalam rumah tangga, dan dalam masyarakat sebagai anggota komunitas.

Tulisan ini merupakan bagian dari seri laporan penelitian *Off-farm Employment di Pedesaan Jawa,* yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Gadjah Mada. Data dikumpulkan melalui pengamatan terlibat (*participant observation*) dan wawancara mendalam (*indepth interview*) terhadap sejumlah *bakul* (pedagang) dari berbagai tipe *bakul.* Sebelum hasil penelitian disajikan, diuraikan secara singkat keadaan daerah penelitian dan gambaran pasar di Jatinom. Bagian isi akan menjelaskan kedudukan perdagangan sebagai pekerjaan *off-farm* bagi rumah tangga tani, gambaran dunia *bakul* di pasar, dan status serta peranan *bakul* dalam kehidupan sosial pedesaan.

Daerah Penelitian

a. Letak Wilayah

Jatinom merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, yang letaknya cukup

strategis bagi perdagangan. Daerah ini dapat mewakili wilayah Barat Klaten dalam mensuplai barang dagangan, berupa hasil pertanian, ke kota kecamatan sekitar Klaten. Selain itu, daerah ini berfungsi sebagai pintu gerbang keluar-masuknya hasil-hasil pertanian dari daerah sekitarnya, antara lain Cepogo, Musuk, dan Karanganom ke daerah Klaten, Wedi, dan Pedan (berjarak belasan kilometer).

Penduduk Jatinom berjumlah 49.455 orang pada tahun 1986, terdiri dari 11.137 kepala keluarga. Apabila dibandingkan dengan beberapa kecamatan di sekitarnya, seperti Karanganom dan Kemalang, Jatinom merupakan daerah yang jumlah penduduknya relatif besar karena yang lain masing-masing hanya berpenduduk 47.247 orang dan 30.992 orang.

Luas Jatinom adalah 35,54 km2, sebagian besar (29,6 km2) berbentuk tanah kering atau tegalan dan sebagian kecil (5,9 km2) berupa tanah sawah. Sementara itu, luas tanah sawah yang mendapat pengairan teknis hanya 0,41 km2 dan selebihnya merupakan pengairan setengah teknis dan tadah hujan. Oleh sebab itu, hasil pertanian utama dari daerah ini adalah ketela pohon, jagung, palawija dan beberapa jenis tanaman semusim lain.

Wilayah Jatinom beriklim tropik sehingga memungkinkan tumbuhnya berbagai tanaman pangan seperti palawija, padi dan buah-buahan. Sebagian penduduk pedesaan mengalami kekurangan air karena sebagian wilayah Jatinom terletak di lereng-lereng bukit, meskipun curah hujan dapat dikatakan cukup. Upaya mengatasi hal itu adalah dengan membuat bak-bak penampungan air hujan.

Dilihat dari posisi daerahnya, Jatinom sebagai pu-

sat aktivitas Tampaknya cukup berpotensi untuk berkembang. Hal ini dipengaruhi oleh letaknya yang strategis, yaitu pada persimpangan antara Klaten, Solo dan Boyolali. Posisi seperti itu menguntungkan Jatinom, dalam kaitannya dengan perdagangan antar wilayah. Wilayah Jatinom dapat dipandang sebagai *buffer zone* antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan sekitar. Salah satu aspek penting adalah sebagai pintu gerbang perdagangan. Jatinom berfungsi sebagai distributor barang atau produk daerah perkotaan ke daerah pedesaan sekitarnya atau sebaliknya, sebagai distributor komoditi pertanian dari pedesaan sekitar ke daerah perkotaan. Kondisi seperti ini telah merangsang Jatinom untuk sedikit demi sedikit berkembang menjadi daerah perdagangan yang semakin besar dan mendorong terciptanya berbagai kesempatan kerja, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan.

b. Pasar dan Pasaran

Ada empat jenis pasar yang terdapat di Jatinom, yaitu pasar *adang-adang*, pasar *periodik non-permanen*, pasar *permanen periodik*, dan *permanen non-periodik*. Keempat pasar ini membentuk suatu jaringan perdagangan yang menentukan efektivitas peredaran barang dari dan ke Jatinom.

Pasar *adang-adang* merupakan sebuah pasar yang tidak mempunyai bangunan fisik tetap dan merupakan tempat terjadinya transaksi perdagangan antara petani dan *bakul* (pedagang kecil). Berbagai komoditi dipasarkan di pasar ini, meliputi jeruk, pisang, kelapa, cabai, ketela pohon, jagung, dan lain-lain. Lokasi pasar itu pada umumnya terletak di persimpangan jalan atau di tempat-

tempat strategis lainnya yang banyak dilalui oleh para petani dalam menjual hasil pertaniannya. Kegiatan transaksi perdagangan berlangsung setiap hari sehingga sebuah pasar *adang-adang* pada akhirnya berkembang dapat menjadi pasar permanen setelah pemerintah setempat ikut serta dalam pengembangan sarana fisik dan menarik pajak di pasar tersebut.

Pasar *periodik non-permanen* mempunyai ciri-ciri yang mirip dengan pasar *adang-adang,* tetapi kegiatan pasar ini tidak berlangsung setiap hari, melainkan berdasarkan periode tertentu. Pada umumnya satu siklus *pasaran* berlangsung selama 5 hari Jawa meskipun kegiatan dalam satu *pasaran* tersebut dapat kurang dari 5 hari. Hari yang dipakai adalah hari Jawa di mana satu *pasaran* terdiri dari *Pon, Wage, Kliwon, Legi dan Pahing,* disebut satu pekan. Ada pasar yang berlangsung hanya satu hari dalam *sepasar*-an lokal dengan pemusatan komoditi utama yang berbeda. Kedua pasar itu adalah pasar Gabus dan pasar Jatinom. Pasar Gabus merupakan pasar permanen yang mempunyai aktivitas setiap hari. Komoditi yang dijajakan meliputi hasil-hasil pertanian seperti sayur-mayur, buah-buahan, palawija, dan komoditi lain terutama bahan makanan. Pasar Gabus merupakan pusat distribusi bahan makanan. Pasar ini menampung komoditi dari pasar-pasar di wilayah utara atau dari luar Jatinom, seperti Temanggung dan Tawangmangu, kemudian didistribusikan ke pasar-pasar di wilayah selatan seperti Pedan dan Klaten. Menurut sejarahnya, pasar ini berasal dari pasar *adang-adang* yang berkembang menjadi pasar permanen.

Pasar Jatinom merupakan pasar permanen yang paling tua di Kecamatan Jatinom. Meskipun hari pasarannya adalah hari *Legi,* pasar Jatinom tetap mempunyai

aktivitas perdagangan di luar hari *Legi* dengan skala lebih kecil. Komoditi yang tersedia di pasar ini meliputi hasil industri pedesaan dari daerah Jatinom dan sekitarnya atau barang-barang kota dari Klaten dan Surakarta, seperti tekstil, alat-alat pertanian, alat-alat rumah tangga dan hasil peternakan, seperti sapi, kambing dan ayam. Di luar hari pasaran (legi), pasar Jatinom hanya menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari, antara lain beras, sayur-sayuran, lauk pauk dan makanan kecil.

Para pedagang Jatinom tidak hanya berdagang di dalam desa atau dalam Kecamatan Jatinom. Mereka membeli komoditi pertanian di Jatinom dan sekitarnya dan dipasarkan ke pasar-pasar yang relatif jauh untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Sebagian pedagang kecil berjalan kaki dari desa ke pasar-pasar sekitar yang jaraknya beberapa kilometer, dan sebagian yang lain mengendarai sepeda untuk menempuh jarak puluhan kilometer ke daerah-daerah sekitar.

Sebagian pedagang juga berasal dari luar Jatinom, mereka membeli barang (*kulakan*) di daerah Jatinom lalu menjual ke pasar-pasar di luar wilayah Kecamatan Jatinom. Pedagang jenis ini datang ke Jatinom karena daerah ini merupakan wilayah penghasil, khususnya sayur-sayuran, sehingga mereka dapat membeli barang dengan harga murah.

Dunia Perempuan Bakul

a. Perempuan di Pasar

Pasar yang biasa dikunjungi para bakul ada dua jenis, yaitu pasar tempat membeli barang (kulakan) dan pasar tempat menjual barang. Secara geografis pasar kulakan umumnya terletak di daerah relatif tinggi yang

dekat dengan sumber komoditi pertanian. Pasar untuk menjual barang terletak di pusat kecamatan Jatinom. Bakul *grabatan* dan *candak kulak* cenderung menjual barang ke pasar yang jauh karena bakul jenis ini membawa macam-macam barang dagangan yang jumlahnya relatif banyak. Mereka harus mencari pasar yang akan memberinya keuntungan relatif lebih besar, yaitu pasar di daerah yang tidak mempunyai jenis komoditi tersebut.

Pasar tempat *kulakan* biasanya merupakan tempat berkumpul: (1) petani yang menjual sendiri komoditi ke pasar; (2) *penebas* atau *bakul* kecil-kecilan yang membawa barang hasil *tebasan* tetangga dalam jumlah terbatas; (3) para *bakul* yang membeli barang dari pasar lain; dan (4) para *juragan* yang membeli barang dalam jumlah besar untuk dibawa ke pasar jauh. Para pedagang kecil cenderung *kulakan* secara tetap di pasar tertentu dan jarang pindah ke tempat atau pasar lain. Mereka tidak mau menaggung resiko rugi atau tertipu karena belum mengetahui pasti keadaan pasar baru dan belum mengenal orang-orang di pasar tersebut.

Para pedagang juga tidak mudah mengganti-ganti jenis barang dagangan karena ada konsep *jodoh* dalam alam pikiran para pedagang. Konsep *jodoh* ini menunjuk kepada kesesuaian tempat dirinya dalam lingkungan yang harus ditempati pedagang. Jika seseorang pedagang merasa *jodoh* dengan jenis usaha tertentu, maka mereka tidak akan mengganti jenis dagangannya dengan jenis yang lain selama barang itu masih mungkin diperoleh. Mereka juga tidak pindah ke pasar lain karena belum tentu *jodoh* bagi mereka. Walaupun mendapat informasi tentang pasar yang sangat maju dan lebih laris, pedagang tetap tidak ingin pindah karena belum tentu

sesuai dengan tempat baru itu. mereka merasa tenteram berdagang di pasar yang pelanggannya mereka kenal, apalagi yang berasal dari satu desa. Kecenderungan seperti itu tampak jelas di Jatinom, di mana pedagang dari desa tertentu berdagang di pasar tertentu pula.

Sebagian besar pasar tempat membeli barang adalah pasar *adang-adang*. Pasar ini berlangsung dalam waktu singkat (lebih kurang 2 jam). Para pembeli dan penjual di pasar ini sama-sama berpacu dengan waktu karena mereka tidak akan memperoleh barang baik jika terlambat datang. Apabila pasar hampir usai para penjual sering terpaksa harus menjual barang dagangannya dengan harga lebih rendah daripada harga penawaran tertinggi yang diperoleh hari itu. Menjelang pasar usai biasanya para penjual akan berusaha mencari pedagang yang telah menawar dengan harga relatif tinggi. Walaupun demikian, pembeli umumnya sudah tidak menghendaki barang tersebut karena sudah membeli barang dalam jumlah yang dikehendakinya. Oleh karena itu, barang tersebut terpaksa dijual kepada siapapun yang mau membeli, walaupun dengan harga sangat murah.

Sebagian pedagang *kulakan* ke pasar yang jauh dari tempat tinggal maupun dari pasar tempat ia berjualan agar memperoleh harga beli lebih rendah. Seringkali mereka juga menambah barang dagangan di sepanjang jalan yang dilalui apabila merasa bahwa barang dagangannya masih perlu ditambah.

Para pedagang memiliki pengetahuan cukup baik tentang usaha yang digeluti. Seorang *bakul* pisang mengetahui bahwa kualitas pisang baik berasal dari desa tertentu (misalnya dari pasar Temuireng) karena memiliki ketinggian yang cocok untuk tanaman pisang tertentu. Jika ditanam di daerah lebih tinggi, pisang cenderung

kecil-kecil atau kulitnya kasar dan tampak jelek pada saat matang. Oleh karena itu, setiap kali *kulakan,* pembeli bisa membedakan pisang yang berasal dari Temuireng dan yang bukan. Gambaran ini memperlihatkan bahwa sikap profesionalisme tinggi juga ditemukan dalam dunia pedagang skala kecil, tidak hanya pada usaha dagang skala besar.

Dalam membeli barang, para *bakul* sangat hati-hati, yaitu dengan memilih barang dengan teliti. Tawar menawar terjadi setelah mereka yakin bahwa mutu suatu barang sesuai dengan kehendaknya. Dalam hal ini, mereka mempunyai istilah *nek wis mantep lagek ditawa* (kalau sudah matap baru ditawar). Perasaan mantap ini sangat penting untuk menghindari penyesalan yang diakibatkan oleh kesalahan dalam pembelian. Kecermatan menilai mutu suatu barang ini menunjukkan sikap profesional dalam perdagangan skala kecil.

Dalam perdagangan kecil-kecilan, etika penawaran dipatuhi oleh setiap pedagang. Tawar menawar diawali oleh pedagang sebagai penentu harga awal dan kemudian dilanjutkan oleh pembeli sebagai penentu harga penawaran pertama. Kesepakatan harga terjadi setelah pembeli dan penjual menaikkan dan menurunkan harga barang sebanyak tiga atau empat kali. Tawar menawar sangat lama dan rumit sering terjadi sebelum harga terakhir tercapai (lihat Alexander dan Alexander, 1987). Penawaran pertama dalam kulakan kira-kira separuh harga (50 oersen) dari harga yang disebutkan penjual. Setiap barang umumnya bisa dibeli dengan harga 75 persen dari harga yang diminta oleh pemilik barang pada awal transaksi. Penawaran yang dimulai dari separuh harga merupakan etika yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap etika ini biasanya menimbulkan

kemarahan penjual.

Seorang pedagang cenderung membeli barang dari petani untuk memperoleh barang yang murah. Mereka dapat membedakan dengan tepat antara petani dan bukan petani. Pengetahuan ini penting untuk mendapatkan barang yang murah. Sebagai contoh, para pedagang umumnya tidak membeli jeruk di pasar. Mereka datang ke kebun-kebun jeruk dan melakukan transaksi dengan sistem *tebasan,* yang dalam hal ini, mereka memberikan uang muka untuk jeruk yang belum siap dipetik. Dalam sistem *tebasan,* harga sudah disepakati sejak sebelum panen, tetapi apabila jeruk terserang virus harga akan dihitung kembali sesuai dengan keadaan barang. Selain itu, mereka datang ke pasar jeruk, misalnya pasar *Nglundo* yang terletak di Kecamatan Jatinom dan membeli pada *bakul walik dasar.*

Dalam penjualan barang, para pedagang juga mengetahui secara pasti siapa calon pembeli yang dihadapinya. Hal ini, misalnya, dapat dilihat pada kasus perdagangan pisang. Pisang raja merupakan pisang yang digunakan untuk upacara perkawinan. Pedagang segera mengerti apabila ada calon pengantin yang mencari pisang ini. Mbok Somo bisa menjual pisang ini seharga 5.000 rupiah satu sisir, padahal hari biasa harga pisang itu biasanya hanya 2.000 rupiah. Pedagang juga telah mengetahui bahwa saat banyak calon pengantin mencari pisang raja adalah pada bulan Besar atau bulan *Rejeb* yang menurut kalender Arab merupakan bulan baik untuk melangsungkan perkawinan. Bulan lain yang penting bagi pedagang pisang adalah awal musim *rendeng* (hujan) karena pada saat itu petani mulai ke sawah. Setiap memulai pekerjaan di sawah, dilakukan upacara *sesajen.* Pada musim ini pisang sangat laku karena di-

gunakan sebagai salah satu unsur *sesaji*. Hari-hari yang baik lainnya adalah hari Minggu atau hari libur, menjelang hari raya, dan menjelang Maulud.

Musim yang merugikan mereka adalah musim angin barat, yaitu pada akhir musim hujan karena volume barang merosot. Merosotnya volume barang disebabkan oleh angin kencang dan mulai datangnya musim panas. Angin kencang merobohkan pohon-pohon pisang dan musim panas membuat petani perlu menebang pohon pisang untuk makanan ternak. Pada saat semacam ini pedagang sulit mencari barang dagangan.

Seperti halnya dengan pembelian barang, penjualan barang di pasar dilakukan dengan cara kontan atau *ngalap nyaur*. Alternatif cara penjualan tergantung pada calon pembeli. Para pembeli dapat dibagi atas lima macam, yaitu (1) pedagang *walik dasar*; (2) pedagang *bango* dan warung; (3) pedagang *candak kulak*; (4) *juragan* yang menjual barang ke kota; dan (5) konsumen akhir. Konsumen akhir membeli dengan kontan, sedangkan empat lainnya boleh membayar dengan cara *ngalap nyaur*. *Bakul-bakul* bermodal besar jarang melakukan *kulakan* secara *ngalap nyaur*. Mereka lebih sering membeli barang dengan membayar kontan. Hal ini membuat para pemilik barang atau penjual barang di pasar lebih senang berhubungan dengan *bakul* yang memiliki modal besar.

Para pedagang berinteraksi satu sama lain dan membangun norma-norma perilaku di pasar. Mereka saling membantu dalam mengatasi kesulitan yang dialami sesama pedagang, mengunjungi pedagang lain yang kebetulan sakit, dan tetap membina hubungan setelah mereka di rumah. Misalnya, seorang pedagang juga dapat meminjam uang kepada temannya di pasar apabila

ia mendapat kesulitan modal. Di pasar, para pedagang bertemu dengan *bakul-bakul* lain, baik dari daerah sama maupun dari daerah lain. Oleh karena itu, mereka harus menjaga etika pergaulan. Jika ada pedagang lain akan membeli barang dagangannya maka seorang pedagang akan memberi harga murah. Mereka merasa harus saling menghidupi. Jika seseorang memperoleh keuntungan maka yang lain juga ikut menikmati.

Apabila bertemu dengan *bakul* lain, seorang *bakul* segera terlibat dalam pembicaraan tentang harga, keadaan pasar, kemungkinan mendapat keuntungan dalam masa-masa "ramai", dan keluhan-keluhan dalam masa "sepi" yang menyebabkan mereka rugi atau mendapat keuntungan sedikit. Waktu luang, ketika menunggu teman mereka membenahi barang dagangan (bagi mereka yang pulang bersama-sama), diisi dengan perbincangan di antara sesama *bakul*. Pada saat pasar usai, mereka saling menunggu untuk pulang bersama-sama. Bakul yang bersepeda akan pulang dengan sesama teman yang bersepeda; yang berjalan kaki pulang bersama teman yang berjalan kaki. Mereka umumnya berasal dari desa sama sehingga memiliki solidaritas sosial sangat kuat.

Dalam perjalanan pulang mereka juga membicarakan banyak hal, dari keadaan pasar yang sepi sampai ke masalah-masalah gosip. Mereka membicarakan kematian seorang perempuan yang *kumpul kebo* (hidup bersama tanpa nikah) dan mencemooh laki-laki yang sudah beristri tetapi *kumpul kebo* dengan perempuan lain. Mereka juga membicarakan betapa beratnya sumbangan *(nyumbang)* yang besarnya minimal 2.000 rupiah karena mendapatkan uang sejumlah itu sangat sulit.

Kewajiban Sosial Bakul

Ketika para *bakul* pulang dari pasar, anak-anak mereka sudah berkumpul di halaman rumah dan langsung menyongsong untuk meminta *oleh-oleh*. Gejala semacam ini dapat ditemukan pada setiap rumah para *bakul* setiap hari. Bahkan, anak tetangga yang bermain di rumah *bakul*, meskipun bukan anak *bakul*, juga mendapat *oleh-oleh*. Dengan demikian, ada suasana yang berbeda antara rumah tangga *bakul* dengan rumah tangga petani yang bukan *bakul*.

Para *bakul* masih membantu suami mereka setelah mereka kembali dari pasar. Pekerjaan yang biasa mereka kerjakan adalah mencari rumput. Pedagang yang pulang pada sore hari tidak mengerjakan pekerjaan lain kecuali pekerjaan rumah seperti membantu memasak. Apabila mereka mempunyai anak perempuan yang sudah dewasa, anak-anak mereka dapat menggantikan tugasnya dengan baik, tetapi pada umumnya anak-anak mereka juga pergi ke pasar sehingga baru bisa memasak setelah kembali.

Pedagang yang kembali dari pasar pada siang hari masih sempat menyelesaikan sisa pekerjaan suami mereka, seperti *mengarit* rumput dan memberi makan sapi. Setelah itu, mereka memasak untuk sore hari. Setelah kembali dari pasar, mereka umumnya masih mengerjakan pekerjaan pertanian dan atau rumah tangga.

Sebagian pedagang sudah keluar rumah sejak sore hari, yaitu kira-kira jam 14.00, untuk mencari barang dagangan dengan mendatangi kebun-kebun dan mengamati jeruk, pepaya atau hasil pertanian lain yang boleh dibeli atau ditebas. Mereka kembali ke rumah di senja hari, yaitu kira-kira jam 18.00. Sesampai di rumah, mereka mengurus keperluan anak-anak mereka, menyiapkan makan malam lalu menata barang dagangan yang

siap dibawa ke pasar keesokan harinya.

Para pedagang membina hubungan dengan warga desa di sela-sela kesibukan mereka, misalnya, *ketika melihat televisi bersama.* Karena warga desa yang memiliki televisi terbatas, pada saat-saat acara menarik, seperti ketoprak, dan wayang, warga desa menonton di rumah tetangga. Pada kesempatan itu, mereka tidak mencurahkan semua perhatian kepada acara tersebut, tetapi, yang penting, mereka dapat berkumpul dan berbincang-bincang dengan sesama warga. Gejala semacam ini menunjukkan bahwa hubungan sosial merupakan kebutuhan penting untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat desa.

Jam kerja para *bakul* umumnya sangat panjang, mereka berangkat jam 03.00 atau jam 04.00 dan kembali pada jam 15.00 atau jam 16.00. Sebagian mereka kembali jam 18.00 sampai jam 20.00 malam. Beberapa *bakul* tidak berdagang setiap hari karena mereka menggunakan dua hari dalam sepasar untuk membeli barang (*kulakan*). Mereka dapat beristirahat pada hari *kulakan,* sedangkan para *bakul* yang berjualan setiap hari hampir tidak pernah berhenti atau beristirahat.

Para pedagang tidak meninggalkan kepentingan-kepentingan desa walaupun mereka banyak menghabiskan waktu mereka di pasar. Apabila ada *mantenan, supitan* dan upacara-upacara lain yang sudah direncanakan, mereka tidak berangkat ke pasar karena memenuhi kewajiban mereka sebagai anggota komunitas desa. Jika ada *kesripahan* (kematian), padahal barang dagangan sudah terkumpul, mereka tetap pergi ke pasar, tetapi segera pulang setelah meminta orang lain memasarkan dagangannya. Tugas para perempuan biasanya membantu memasak makanan yang digunakan untuk *slamet-*

an atau upacara-upacara lain.

Pranata sosial lain yang sangat penting adalah *nyumbang* yang menunjuk kepada kebersamaan perasaan moral dalam komunitas. Apabila ada upacara tertentu maka setiap warga desa sebaiknya menyumbangkan sesuatu kepada keluarga yang mengadakan upacara. Jika ada upacara dalam siklus hidup individu, seperti kelahiran anak, sunat, perkawinan, dan kematian, setiap anggota komunitas menyumbangkan makanan atau uang. Dalam kelahiran bayi, misalnya, seorang yang masih memiliki hubungan keluarga akan menyumbang Rp. 2.000 dan lebih kurang 5 kilogram beras pada saat ia berkunjung untuk melihat bayi tersebut. Nilai seluruh sumbangan itu sekitar Rp. 4.500.

Nyumbang, bagi pedagang dan anggota masyarakat desa pada umumnya, merupakan suatu kewajiban berat sehingga mereka mengeluh karena pendapatan dari berdagang habis digunakan untuk memenuhi kewajiban itu. Intensitas *nyumbang* sangat tinggi karena mungkin beberapa hari dalam seminggu terdapat upacara atau kejadian yang memerlukan sumbangan, antara lain kelahiran bayi.

Beban menyumbang (*nyumbang*) dirasakan lebih berat oleh keluarga petani. Petani tidak selalu memiliki uang kontan karena penghasilan mereka sangat dipengaruhi oleh musim. Petani sering harus berhutang untuk memenuhi kewajiban-kewajiban sosial itu. Perempuan pedagang, berbeda dengan petani, selalu memegang uang kontan sehingga dapat mengalokasikan sebagian uangnya untuk memenuhi kewajiban sosial tersebut dengan mudah.

Bakulan Sebagai Pekerjaan *Off-Farm*

Rumah tangga tani di pedesaan Jawa mengalami persoalan penyempitan lahan yang semakin parah. Pemilikan lahan di Jatinom sekitar 0,22 hektar setiap rumah tangga tani. Pemilikan lahan seluas itu tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Sistem pewarisan lahan keluarga merupakan salah satu faktor yang ikut mempercepat penyempitan pemilikan lahan di daerah pedesaan. Di samping itu, konsentrasi penguasaan lahan oleh sekelompok elit pedesaan juga dipandang sebagai faktor yang memperburuk keadaan ekonomi pedesaan (Amaluddin, 1987: 111-114). Secara keseluruhan, situasi semacam ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian desa di masa mendatang.

Anggota rumah tangga tani yang biasa bekerja di sektor pertanian, secara berangsur-angsur, harus bekerja pula di luar sektor pertanian *(off-farm employment)*. Dengan demikian, anggota rumah tangga pedesaan yang berlahan sempit masih tetap dapat bertahan bekerja di sektor pertanian dengan cara mencari pekerjaan tambahan di luar sektor pertanian. Mereka memasuki berbagai peluang kerja, seperti buruh tani, buruh bangunan, tukang, pedagang, dan jasa angkutan untuk menambah pendapatan rumah tangga. Data *listing* rumah tangga di lima desa di Kecamatan Jatinom menunjukkan bahwa 86 jenis dari 96 jenis peluang kerja merupakan pekerjaan non-usaha tani.

Perempuan sebagai pengelola rumah tangga sangat merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Mereka harus mengatur pengeluaran dan terpaksa harus mempertimbangkan sumber-sumber yang dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga. Perempuan di

Jatinom umumnya memilih menjadi pedagang untuk mengatasi kesulitan ini. Dengan menjadi pedagang, perempuan mendapat tambahan pendapatan. Perempuan bekerja di bidang perdagangan sekedar untuk dapat membeli barang keperluan rumah tangga sehari-hari yang mereka butuhkan. Setiap usai berdagang, mereka membeli segala kebutuhan rumah tangga, seperti gula, teh, kopi, minyak goreng, lauk pauk, garam, dan lain-lain. Usaha di bidang perdagangan sebenarnya bertujuan memperoleh uang sebagai alat tukar, agar mereka memperoleh barang lain yang dibutuhkan rumah tangga. Setelah membeli berbagai kebutuhan, mereka mengalokasikan uang sebagai modal. Meskipun demikian, bagi para pedagang kecil, penambahan modal jarang sekali.

Sebagai pedagang, perempuan juga dapat menjadi anggota lapisan masyarakat terpandang ikut memberikan sumbangan pendapatan terhadap keluarganya. Suami istri di Jawa memang harus bekerja sama untuk keselamatan keluarga (Koentjaraningrat, 1984: 291), dan hasil kerja perempuan mempunyai nilai sama dengan hasil kerja laki-laki (Schiller, 1978: 134) walaupun pembagian tanggung jawab antara suami dan istri masih ada.

Kepentingan jangka panjang, seperti mengawinkan anak, *sunat,* dan membangun rumah, menjadi tanggung jawab suami. Kepentingan harian atau kepentingan seremonial, seperti *nyumbang* yang seringkali dirasakan sangat berat oleh komunitas desa, menjadi tanggung jawab perempuan (istri). Hal ini memperlihatkan perbedaan alokasi penggunaan uang yang dihasilkan oleh suami dan istri. Istri mempunyai kesempatan lebih banyak untuk memperoleh uang karena mereka dapat memegang uang lebih teratur daripada suami mereka (Stoler, 1975: 34).

Rumah tangga tani yang anggota rumah tangganya perempuan tidak berdagang ke pasar akan menjadi rumah tangga *cukup-cukupan*. Dengan adanya produksi subsistensi, mereka masih dapat bertahan pada garis ekonomi *cukup-cukupan,* yaitu garis batas kritis. Oleh karena itu, perempuan di desa biasanya tetap bekerja untuk memperoleh tambahan penghasilan. Selain menjadi pedagang, mereka bekerja sebagai pengumpul kayu bakar dan mengurus rumah tangga.

Perempuan memang benar-benar berperan ganda di pedesaan. Mereka mengurus rumah tangga dan berpartisipasi dalam sektor perdagangan, bahkan membantu kegiatan pertanian. Dalam perdagangan, mereka menghabiskan jam kerja yang panjang, tetapi keuntungan yang diperoleh hanya berkisar 500 sampai 1.000 rupiah setiap hari. Uang inipun biasanya tidak selalu dibawa pulang karena langsung digunakan untuk membeli kebutuhan harian bagi rumah tangga. Dengan hasil yang kecil mereka tidak mampu memperbesar skala usaha.

Intensitas pertemuan para pedagang di pasar atau di tempat lain di luar desa membuat mereka menjadi golongan yang lebih maju dalam berpikir dan bergaul, jika dibandingkan dengan orang-orang desa lain. Mereka tidak takut menghadapi orang baru atau orang yang belum mereka kenal; lebih mampu berbicara; mengeluarkan pendapat; dan memiliki wawasan yang lebih luas.

Bekerja sebagai *bakul* merupakan kebanggaan bagi mereka. Sejak kecil, mereka telah melihat bahwa status *bakul* lebih tinggi dibandingkan dengan yang bekerja di tegal atau petani. Mereka merasa lebih banyak mempunyai kesempatan mengenal dunia luar, lebih banyak berhubungan dengan orang luar, dan merasa beruntung sebagai "orang pilihan" karena menganggap

bakulan sebagai pekerjaan yang sulit. Mereka menganggap bahwa *kabeh wong iso dadi bakul, ning ora kabeh bakul ndadi* (semua orang bisa jadi *bakul,* tetapi tidak semua *bakul* bisa berhasil). Menurut mereka, keberhasilan seorang *bakul* tidak hanya ditentukan oleh besarnya modal, tetapi oleh hal-hal lain yang lebih penting, yaitu bakat dan nasib. Mereka menyebut hal ini sebagai *pulung* (suatu pemberian Tuhan), artinya, mereka ditakdirkan menjadi pedagang.

Bekerja sebagai pedagang memiliki keuntungan secara psikologis. Para pedagang merasa tidak tenang jika hanya tinggal di desa lingkungan tempat tinggalnya. Mereka lebih senang pergi ke luar dari lingkungan tempat tinggalnya dan bertemu dengan teman-teman seprofesi di pasar.

Secara perlahan-lahan, tetapi pasti, dunia pasar telah memperkuat ikatan emosional antara seorang pedagang dengan pedagang lain. Seorang pedagang melukiskan kegembiraan ini sebagai berikut:

> "Saya tetap memilih ke pasar walaupun tidak mendapat keuntungan sama sekali daripada disuruh tinggal di rumah dengan memegang uang seribu rupiah. Kesenangan bukan terletak pada uang, tetapi pada rasa senang karena bisa bepergian dan dapat bertemu teman".

Mereka, sebagai anggota komunitas pedagang, menilai diri mereka berbeda dengan anggota lain yang tidak berdagang. Persepsi seperti ini disebabkan mereka mendapatkan penghasilan dalam bentuk uang dari perdagangan. Seorang *bakul* mengatakan:

> "Uang sebesar 500 rupiah, jika tidak usaha (dicari) di pasar tidak akan diperoleh. Dengan ke pasar, walaupun dengan membawa uang milik orang lain, untuk sementara tetap dapat digunakan. Setelah itu uang pinjaman dapat diganti, walaupun dengan cara meminjam pada orang yang lain lagi. Jika hanya berusaha di desa, sangat sulit untuk mendapatkan uang 500 rupiah. Semua orang tidak memegang uang jika bukan musim panen".

Berdagang atau pergi ke pasar tampaknya memiliki daya tarik lain. Dari segi psikologis, perdagangan mengembangkan kebutuhan akan hubungan sosial. Secara ekonomis, perdagangan telah menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. Pembagian kerja menjadi kurang jelas di dalam rumah tangga pedagang karena pekerjaan istri dapat pula dikerjakan oleh suami dan begitu pula sebaliknya. Perempuan juga membersihkan rumput, memberi pupuk, dan mencari rumput ke tegalan untuk ternak. Sebaliknya, laki-laki juga berkewajiban untuk memasak dan mengurus anak-anak mereka jika istri sedang ke pasar.

Kehidupan ibu-ibu pedagang seperti di atas menyebabkan anak-anak kecil di desa lebih dekat dengan ayah daripada ibu. Seorang anak akan mengharapkan ibunya hanya pada saat sang ibu kembali dari pasar karena sang ibu membawa buah tangan *(oleh-oleh)* dari pasar, berupa makanan kecil atau buah-buahan. Setelah itu, mereka kembali bermain sendiri dan tidak memperdulikan ibunya. Anak-anak tidak minta ikut atau menangis jika ibunya pergi, sebaliknya mereka akan gelisah jika ayahnya pergi. Pada siang hari, ketika para perempuan berdagang, masalah anak-anak dan rumah tangga diurus oleh suami.

Sebagian dari uraian di atas menunjukkan bahwa perdagangan memiliki daya tarik penting bagi perempuan. *Pertama,* mereka mendapat penghasilan sendiri sehingga mempunyai andil dalam ekonomi rumah tangga. Hal ini sekaligus menunjukkan kerja sama yang seimbang antara suami dan istri untuk memenuhi ekonomi rumah tangga.

Kedua, dengan berdagang para perempuan dapat setiap hari memegang uang sehingga memiliki otonomi untuk mengatur rumah tangga dan kepentingan-kepentingan dirinya. Apabila ada kebutuhan tertentu, mereka tidak perlu meminta uang atau persetujuan dari suami mereka. Uang biasanya sangat sulit diperoleh dari suami mereka karena baru dapat tersedia pada saat panen. Hal ini juga menyebabkan kedudukan perempuan tidak lebih rendah daripada suami mereka karena mereka juga ikut memecahkan masalah ekonomi rumah tangga pedagang. *Ketiga,* dengan berdagang para perempuan dapat bertemu teman setiap hari. Kebanyakan perempuan berangkat ke pasar untuk berdagang sehingga keadaan desa sudah sepi setelah jam 08.00. Apabila seseorang hanya tinggal di desa, teman mereka sangat terbatas.

Penutup

Peran perempuan dalam ekonomi rumah tangga semakin penting sejalan dengan menurunnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian desa. Para suami di Jatinom tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga secara memuaskan karena lahan pertanian mereka sempit. Sementara itu, kebutuhan-kebutuhan uang tunai harian, seperti biaya-biaya konsumsi sehari-hari,

kebutuhan anak-anak, dan kewajiban-kewajiban sosial, semakin menonjol justru ketika pertanian tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kebutuhan itu sepanjang tahun.

Suami terlibat di sektor pertanian, sedangkan perempuan tidak banyak terlibat dalam bidang ini karena tidak banyak pekerjaan yang tersedia untuk perempuan. Di samping itu, keterlibatan perempuan di bidang pertanian tidak dapat meningkatkan produksi pertanian yang sebanding dengan waktu dan tenaga yang dicurahkan. Oleh karena itu, bidang perdagangan merupakan alternatif pekerjaan non-pertanian bagi rumah tangga tani (*off-farm employment*) yang menyediakan peluang berusaha bagi perempuan pedesaan.

Keterlibatan perempuan dalam perdagangan menghasilkan beberapa keuntungan bagi rumah tangga tani. Para perempuan pedagang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga harian walaupun uang yang diperoleh terbatas. Pendapatan ini menjadi pelengkap karena produksi subsistensi pedesaan, seperti sayur-sayuran yang dipetik dari pekarangan, dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, pendapatan dari perdagangan memungkinkan perempuan memenuhi kewajiban-kewajiban sosial mereka sebagai anggota komunitas desa, seperti *nyumbang* kepada tetangga yang melahirkan, dan upacara-upacara lain di desa.

Keterlibatan perempuan dalam perdagangan di pasar-pasar juga memungkinkan perempuan memperoleh otonomi dalam rumah tangga. Perempuan memperoleh kekuatan untuk memutuskan kepentingan-kepentingan rumah tangga sehari-hari dan sekaligus menunjukkan peranan mereka yang sangat penting dalam

ekonomi rumah tangga tani. Perempuan pedagang juga memiliki status sosial relatif tinggi, jika dibandingkan perempuan-perempuan desa lain yang tidak berdagang, karena mereka merasa mengenal dunia luar dengan baik, memiliki pengalaman lebih luas, di samping secara ekonomi rumah tangga mereka lebih baik dari rumah tangga petani umumnya.

Perempuan desa sangat tertarik kepada pekerjaan berdagang karena secara sosial budaya mereka memperoleh tempat di dalam masyarakatnya, menemukan status-status baru, dapat memainkan peranan yang lebih baik di dalam masyarakat, menemukan jaringan hubungan dengan orang-orang lain yang tidak mereka kenal sebelumnya dan menemukan dunia lain di luar desa yang menunjukkan suasana berbeda dengan keadaan sehari-hari di desa. Dengan demikian, mereka mempunyai pengetahuan dan wawasan lebih luas. Selain itu, secara ekonomi, kebutuhan rumah tangga tani dapat terpenuhi. Oleh karena itu, mereka menjadi kelompok masyarakat yang lebih terhormat ●

Bab Sembilan

Perempuan ke Pasar, Studi tentang Perubahan Ekonomi Pedesaan

DATA Sensus Penduduk memperlihatkan perubahan struktur pekerjaan sejak tiga dekade lalu. Sejalan dengan menurunnya kesempatan kerja disektor pertanian, persentase penduduk yang terlibat dalam kegiatan luar pertanian, khususnya dalam sektor jasa dan perdagangan, meningkat pesat (lihat Tabel 1).

Tabel 1.
Persentase Pekerja Pertanian dan Luar Pertanian di Indonesia 1961-1980

Sektor	1961	1971	1976	1980
Pertanian	72	68	62	58
Luar pertanian	28	32	38	42

Sumber: G. Hugo et al. (1987: 272)

Sebagian peneliti menilai pergeseran ini sebagai indikator kemajuan, yakni dalam pengertian terjadinya peningkatan diversifikasi ekonomi pedesaan. Sebagian lain telah menyimpulkan bahwa kesempatan pekerjaan yang berkurang di sektor pertanian (sebagai akibat meningkatnya fragmentasi lahan) telah mendorong munculnya sejumlah penduduk tidak bertanah yang mencari pendapatan melalui kegiatan luar pertanian, juga dengan gaji dan imbalan rendah.

Keterlibatan anggota rumah tangga tani dalam sektor luar pertanian menjadi tanda perubahan perekonomian desa, yang secara langsung mempengaruhi ekonomi rumah tangga. Satu persoalan menarik adalah keterlibatan perempuan: persentase keterlibatan perempuan dalam pekerjaan luar pertanian relatif tinggi. Khusus untuk kasus perdagangan skala kecil, perempuan memiliki peranan lebih penting daripada laki-laki di Jawa. Pada 1961 terdapat 10,3 persen perempuan terlibat dalam perdagangan dari seluruh perempuan bekerja. Persentase ini meningkat dengan cepat menjadi 18,4 pada 1971 dan 23,1 persen pada 1980 (lihat tabel 2).

Tabel 2.
Persentase Distribusi Pekerja di Jawa 1961, 1971 dan 1980

Pekerjaan	Laki-laki			Wanita		
	1961	1971	1980	1961	1971	1980
Pertanian	71,3	62,7	53,3	64,5	8,0	6,6
Industri	6,4	7,4	9,2	9,0	3,1	4,7
Pembangunan	2,7	3,1	5,3	0,2	0,1	0,2
Perdagangan	7,0	10,6	11,5	10,3	18,4	3,1
Transport	3,1	3,8	4,6	0,3	0,2	0,1
Jasa	9,5	12,4	16,1	15,7	0,2	5,0

Sumber: Hugo et al., 1987:263

Di Jawa Tengah terdapat 27,3 persen perempuan terlibat dalam sektor perdagangan pada tahun 1985, sedangkan laki-laki hanya 10 persen. Di Jatinom, sebuah kecamatan di Jawa Tengah, keterlibatan perempuan di sektor perdagangan mencapai 80,5 persen untuk tahun 1988, dibandingkan laki-laki yang hanya 19,5 persen.

Pekerjaan luar pertanian merupakan sumber penting bagi ekonomi rumah tangga pedesaan. Petani, dalam banyak kasus, menghabiskan sebagian atau seluruh waktunya, entah di desa atau pun di luar desa, untuk pekerjaan luar pertanian. Ini pulalah yang membedakan petani dengan pengusaha pertanian (Robinson, 1988: 164). Keterlibatan petani dalam pekerjaan luar pertanian memiliki sejarah cukup panjang dan meluas di berbagai daerah. Di Jawa sendiri, berdasarkan penelitian di 14 desa, pendapatan pertanian memang lebih kecil dibandingkan pendapatan luar pertanian. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan luar pertanian di Jawa jauh lebih penting dari yang diperkirakan (Rietveld, 1986: 108).

Persoalan bagaimana kaitan antara sektor pertanian dan luar pertanian belumlah diteliti dengan baik, terutama masalah keterlibatan perempuan tani dalam kegiatan luar pertanian, diharapkan dapat menjelaskan kaitan itu. Apakah keterlibatan perempuan dalam sektor perdagangan disebabkan oleh lemahnya sektor pertanian di dalam mendukung ekonomi rumah tangga pedesaan? Hal ini masih belum cukup jelas. Kegiatan luar pertanian yang diteliti adalah perdagangan skala kecil, bidang pekerjaan yang didominir oleh perempuan. Penelitian ini dilakukan di kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah.

Gambaran Sosial Ekonomi Daerah Penelitian

Jatinom selain merupakan sebuah kota kecil juga sebuah kecamatan di Kabupaten Klaten. Kota ini merupakan tempat pemerintahan lokal, karena ia merupakan kawedanan yang membawahi beberapa wilayah, dan merupakan pusat perdagangan penting bagi daerah sekitar. Luas daerah mencapai 35,54 kilometer persegi, meliputi 17 desa dan satu kelurahan. Penduduknya berjumlah 49.918 orang pada tahun 1987.

Jatinom terletak di pertengahan antara kota Kabupaten Boyolali (15 Km ke arah utara) dan kota Kabupaten Klaten (10 Km ke arah selatan) dan dikelilingi oleh daerah-daerah subur, seperti Karang Anom, Karang Nongko, dan Musuk. Wilayah ini memiliki jalan dan jaringan transportasi yang sangat baik. Jika dilihat Jatinom di dalam konteks yang lebih luas maka tampak bahwa Jatinom terletak di pusat antara beberapa kota utama seperti Yogyakarta, Klaten, Surakarta, dan Boyolali.

Ada dua pasar di kota Jatinom. Pasar Gabus merupakan pasar permanen dan pasar harian yang merupakan tempat penjualan komoditas pertanian. Pasar kedua adalah pasar Jatinom, juga pasar permanen dan pasar harian, namun volume barang dan jumlah orang yang terlibat lebih banyak pada setiap *Legi* (pasaran). Setiap *Legi* dapat pula ditemukan pasar hewan, seperti pasar sapi dan pasar kambing. Pasar sapi termasuk paling besar dibandingkan dengan pasar sejenis di dalam wilayah Klaten dan Boyolali.

Toko-toko terletak di sepanjang jalan raya dan di dalam atau di luar pasar. Pasar dan toko, termasuk warung-warung, menunjukkan keadaan perdagangan yang sangat dinamis: arus barang yang konstan, volume barang yang tinggi, mobilitas pedagang dan pembeli

yang begitu padat merupakan gambaran sehari-hari yang tampak memberikan pengaruh penting bagi perkembangan ekonomi daerah.

Dalam kegiatan perdagangan itu, baik di pasar-pasar maupun di toko-toko, perempuan tampak dominan, yakni 80,5 persen perempuan terlibat dalam perdagangan dan dominasi ini berlaku terhadap semua jenis perdagangan (lihat tabel 3). Perempuan mempunyai peranan penting dalam ekonomi rumah tangga, mereka memberikan sumbangan pendapatan keluarga. Dengan perdagangan mereka memperoleh pendapatan teratur untuk mengatasi kebutuhan dasar harian, walaupun dalam jumlah terbatas.

Perdagangan dan Pembentukan Status Perempuan

Pendapatan perempuan dari kegiatan luar pertanian membantu ekonomi rumah tangga, sekaligus menunjukkan adanya kerjasama pemenuhan kebutuhan rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan. Kerja sama semacam ini tampaknya merupakan gambaran umum dalam rumah tangga di Jawa, seperti kasus Celapar (lihat Koentjaraningrat, 1984: 291) dan hasil yang diperoleh perempuan juga memiliki nilai sama dengan apa yang diperoleh laki-laki (lihat Schiller, 1978: 134). Jika dilihat lebih lanjut, jelas bahwa ada pembagian tanggung jawab di Jatinom, kebutuhan yang membutuhkan uang banyak seperti perkawinan, *sunatan*, pembangunan rumah tetap menjadi tanggung jawab suami. Kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan seremonial sebaliknya menjadi tanggung jawab perempuan. Namun demikian, perempuan memiliki kesempatan lebih luas untuk memperoleh uang (pendapatan) karena mereka tidak tergantung pada musim sehingga mereka memiliki uang secara

teratur (Stoler, 1975: 34).

Tabel 3.
Pedagang Perempuan dan Laki-laki berdasarkan Tipe Perdagangan di Jatinom, Jawa Tengah

	Adang -adang	Graba- tan	Candak kulak	Bakul pasar	Warung	Toko	Total
Male							
f	2	11	93	28	20	31	185
%	6.1	11.7	20.4	19.3	15.0	36.6	19.5
Female							
F	31	83	362	117	113	56	762
%	93.9	88.3	79.6	80.7	85.0	64.4	80.5
Total	33	94	455	145	133	87	947

Sumber: Survai Off-Farm Employment, Pusat Penelitian Kependudukan, Univeritas Gadjah Mada (PPK-UGM), 1988

Karena perempuan memiliki sumbangan terhadap ekonomi rumah tangga, pembagian kerja dalam rumah tangga menjadi kurang jelas. Tugas-tugas perempuan, seperti memasak atau mengurus anak-anak, biasanya dilakukan oleh laki-laki (suami), khususnya pada saat perempuan tidak di desa (saat berdagang atau mengumpulkan barang dagangan). Usia anak tidak mempengaruhi kegiatan perdagangan, perempuan yang memiliki anak di bawah lima tahun tetap berangkat ke pasar karena anak dirawat oleh ayah atau kakaknya. Anak dapat pula dirawat oleh *mbah* (nenek), yang dimungkinkan karena pola keluarga luas (*extended family*) masih berlaku.

Karena perempuan memiliki kekuatan ekonomi akibat mereka mendapat uang setiap hari secara teratur,

perempuan memiliki kebebasan untuk menemukan atau memutuskan apa yang diinginkan dan memiliki kebebasan menggunakan uang, sekalipun untuk kepentingan pribadi. Jika ingin membeli atau membutuhkan sesuatu, mereka tidak perlu meminta uang atau persetujuan suami (Abdullah, 1989b: 21). Biasanya sangat sulit meminta uang kepada suami karena pendapatan suami sangat tergantung pada musim.

Perempuan sangat bangga menjadi *bakul*, mereka memandang diri sendiri sebagai kelompok yang memiliki status lebih tinggi dibandingkan perempuan desa yang tidak ke pasar (karena secara ekonomi mereka juga lebih mampu). Mereka mengatakan bahwa mereka orang yang mengetahui lebih banyak "dunia luar". Intensitas pertemuan antar pedagang dan dengan orang lain di pasar menjadikan mereka lebih terbuka dan dapat berkomunikasi dengan lapisan sosial lain, juga mereka mampu berbicara dan mengekspresikan pikiran-pikiran. Oleh karenanya mereka mendapatkan tempat khusus di dalam masyarakatnya, mereka menemukan status baru melalui perdagangan.

Pendapatan dari produksi pertanian dan peternakan (oleh suami) dapat digunakan untuk tabungan karena pendapatan luar pertanian yang diperoleh perempuan digunakan untuk memenuhi konsumsi harian dan kebutuhan rumah tangga. Tabungan ini umumnya digunakan untuk perbaikan rumah, membeli televisi, perkawinan anak, dan sunatan. Adanya pendapatan luar pertanian yang disumbangkan perempuan memungkinkan peningkatan kesejahteraan rumah tangga.

Kekuatan ekonomi ini memberi kemungkinan pedagang menjadi bagian dari golongan atas di dalam komunitas. Namun, apakah ini dapat dikatakan sebagai

tanda perkembangan ekonomi pedesaan? Pada satu pihak, pendapatan luar pertanian menyebabkan pengkayaan si miskin dan rumah tangga marginal, sekaligus meningkatkan status mereka di desa. Pada pihak lain, rumah tangga tani (murni) masih berada dalam perangkap ekonomi karena perubahan-perubahan ekonomi pedesaan yang telah dan sedang berlangsung.

Perubahan Ekonomi Pedesaan

Ada dua proses perubahan secara umum terjadi dalam bidang pertanian. *Pertama,* proses fragmentasi lahan, yakni terbaginya lahan ke dalam kapling-kapling kecil dan terbagi di antara anggota rumah tangga. Sebagian besar rumah tangga memang memiliki lahan terbatas, rata-rata 1,22 hektar, luas ini tidak memadai untuk usaha tani sehingga mereka harus mengerjakan sesuatu yang lain untuk memperoleh tambahan pendapatan. Fragmentasi ini disebabkan oleh beberapa proses: (1) Akibat tekanan penduduk, yakni bertambahnya penduduk membutuhkan lahan untuk pembangunan pemukiman dan tempat-tempat pelayanan umum, seperti mesjid, sekolah, dan perkantoran, juga pabrik-pabrik dan industri; (2) Proses jual beli tanah yang meluas mempengaruhi sumber ekonomi rumah tangga; (3) Terpecah-pecahnya lahan kepada beberapa pemilik akibat proses pewarisan.

Kedua, pergeseran pertanian subsistensi ke pertanian komersial. Proses komersialisasi ini, yang terjadi pada tahun 1970-an, ditandai dengan perubahan tanaman ketela pohon dan jagung menjadi tanaman jeruk. Penanaman jeruk menyebabkan berubahnya orientasi pertanian cenderung ke pasar, dalam usaha memperoleh

keuntungan dan kesempatan memperoleh "kekayaan". Setiap rumah tanga menanam jeruk, meskipun dalam jumlah terbatas (karena luas lahan terbatas). Perekonomian Jatinom berubah pesat, terjadi peningkatan pendapatan petani, sehingga memungkinkan mereka membangun rumah dan membeli berbagai barang. Proses semacam ini tampaknya muncul pada kasus-kasus lain, di antaranya kasus Tayu yang dilaporkan Frans Husken. Munculnya komersialisasi dan ekonomi uang erat berkaitan dengan perubahan komoditas pertanian: "Tayu menjadi pusat penanaman palawija: kacang tanah, dan khususnya kapas, yang dengan mudah tumbuh sepanjang jalan desa yang terbukti sangat menguntungkan. Pertanian secara berangsur-angsur kehilangan ciri subsistensinya. Penduduk lebih banyak terlibat dalam perdagangan, transport, dan komunikasi, dan ekonomi pedesaan menjadi sangat dipengaruhi uang secara substansial" (Husken 1989: 304). Tidak dapat dielakkan bahwa komersialisasi merubah gaya dan pola hidup masyarakat Jatinom. Keadaannya menjadi berubah pada saat "malapetaka" muncul, yakni saat tanaman jeruk mulai diserang hama (virus) sejak 1985. Keadaannya semakin memburuk dan saat ini petani harus mengganti tanaman jeruk lama dan menanam bibit baru.

Kedua perubahan tersebut, baik fragmentasi lahan maupun komersialisasi pertanian, memberikan rangsangan bagi keterlibatan anggota keluarga dalam pekerjaan luar pertanian. Karena fragmentasi lahan, terciptalah pekerjaan-pekerjaan baru untuk pengisi waktu anggota rumah tangga, seperti kerajinan dan industri rumah tangga. Lahan yang sempit tidak membutuhkan banyak waktu dan tenaga dalam penggarapan sehingga banyak anggota keluarga yang keluar mencari alternatif peker-

jaan lain, termasuk perdagangan (khususnya bagi perempuan).

Munculnya jeruk, akibat proses komersialisasi pertanian, menyebabkan munculnya pasar-pasar baru yang banyak menyerap tenaga kerja perempuan dalam proses poengumpulan produksi jeruk untuk dipasarkan ke Surakarta, Klaten, Yogyakarta, Semarang dan Jakarta. Pasar-pasar jeruk di beberapa tempat di wilayah Jatinom berlangsung pagi-pagi (yang dimulai bervariasi antara jam 13.00 sampai dengan jam 07.00) dan selesai hanya dalam dua atau tiga jam. Sesudah itu perempuan dapat kembali ke rumah dan mengerjakan pekerjaan domestik atau mengurus usaha tani.

Mengapa Perempuan ke Pasar?

Banyak perempuan masuk ke perdagangan skala kecil dalam pemasaran produksi pertanian. Pendapatan tunai teratur, walaupun kecil, berasal dari kegiatan perdagangan tersebut memungkinkan perempuan memuaskan kebutuhan konsumsi harian rumah tangga dan memungkinkan mereka memenuhi kewajiban sosial terhadap warga desa dalam berbagai kesempatan seperti perkawinan, kelahiran bayi, sunatan, dan kematian. Peranan perempuan yang penting bagi budget rumah tangga memperkuat posisi perempuan pedagang di dalam rumah tangga dan keluarganya, pada saat yang sama status mereka pun meningkat dalam komunitas karena kemampuan mereka memenuhi kewajiban-kewajiban sosial di dalam masyarakat.

Dari 615 perempuan yang diwawancarai, umumnya suami mereka (59,5 persen) adalah petani. Di sini tampak bahwa laki-lakilah yang mengambil peranan mengurus pertanian, dan perempuan "terdepak" ke luar

pertanian. Ada dua hal yang dapat menyebabkan perempuan terlibat dalam pekerjaan di luar pertanian, khususnya perdagangan.

1. Posisi Perempuan Lemah dalam Bidang Pertanian

Posisi perempuan rendah dalam kegiatan pertanian terutama akibat fragmentasi lahan dan komersialisasi. Lahan yang terbatas tidak membutuhkan tenaga kerja banyak, oleh karena itu tenaga laki-laki saja sudah cukup untuk mengerjakan kegiatan pertanian. Keterlibatan perempuan di pasar, dengan demikian, juga merupakan fungsi pemanfaatan waktu luang akibat mereka tersisih dari pertanian. terlebih lagi, setelah komersialisasi, jeruk kurang memberi peluang kepada perempuan karena tanaman ini semacam barang baru yang harus dipelajari, tidak seperti tanaman palawija sebelumnya. Laki-laki masih saja sebagai "pemilik" utama pertanian dan yang bertanggung jawab penuh apabila ia tidak keluar untuk bekerja di luar usaha tani.

2. Tekanan Ekonomi Rumah Tangga Tani

Tekanan ekonomi ini diawali dengan beberapa proses. *Pertama,* penurunan nilai tukar relatif produk pertanian. Menjadi jelas jika dibandingkan nilai tukar relatif produk pertanian dengan barang-barang kebutuhan harian anggota rumah tangga tani. Sebagian besar perempuan memang memilih perdagangan sebagai sumber tambahan penghasilan di luar pertanian, tetapi tidak berarti mereka secara penuh menggeluti bidang perdagangan. Hampir separuh (42,4 persen) perempuan pedagang masih terlibat pekerjaan ganda, pertanian dan perda-

gangan (Tabel 4). Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, para petani membutuhkan lebih banyak produk pertanian untuk mendapatkan sejumlah uang. Sebaliknya biaya yang harus dikeluarkan untuk biaya operasional, seperti untuk membeli bibit dan pupuk, semakin tinggi. Apalagi luas lahan tidak memadai untuk menjalankan usaha tani secara produktif dan efisien

Tabel 4.
Pekerjaan Perempuan Berdasarkan Tipe Perdagangan

	Adang-adang	Graba-tan	Candak kulak	Bakul pasar	Toko	Total
Male						
F	43	41	229	100	132	545
%	55.1	43.6	50.3	62.1	83.0	57.6
Female						
F	35	53	226	61	27	402
%	44.9	56.4	49.7	37.9	17.0	42.4
Total	78	94	455	161	159	947

Sumber: Survai Off-Farm Employment, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada (PPK-UGM) 1988

Kedua, perubahan-perubahan institusional di pedesaan. Pranata-pranata sosial seperti *nyumbang* di Jatinom, banyak dipengaruhi oleh ekonomi pasar. *Nyumbang* dalam perkawinan, kelahiran bayi, *sunatan,* dan kematian, telah dilakukan dengan uang tunai sekarang ini, sedangkan sebelumnya cukup dengan produk pertanian. Dengan demikian setiap warga desa membutuhkan lebih banyak uang dalam rangka memenuhi kebutuhan di luar konsumsi harian. Rata-rata mereka mengeluarkan dua ribu rupiah dalam bentuk tunai setiap mengunjungi kelahiran bayi atau perkawinan (padahal

dari perdagangan hanya diperoleh uang 500 sampai 850 rupiah sehari). Ini dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi pasar kapitalis (Husken dan White, 1989) yang menyebabkan uang lebih penting di dalam setiap transaksi. Transportasi yang memadai memungkinkan produk-produk pabrik (dari kota) tersebar ke pelosok desa. Perkembangan semacam ini menyebabkan ketergantungan orang desa terhadap uang semakin besar dan meluas. Ekonomi subsisten kehilangan kekuatan di dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Perempuan tampak sebagai pihak yang paling "bertanggung Jawab" atas perubahan-perubahan yang terjadi karena secara sosial budaya perempuan adalah pengatur ekonomi rumah tangga. Hal ini dipengaruhi oleh apa yang dinamakan sistem matrifokal.

Kesimpulan

Perubahan ekonomi pedesaan dalam banyak kasus (Geertz, 1963b, 1967; Husken, 1989; Husken dan White, 1989) harus dilihat dalam konteks perubahan-perubahan ekonomi secara umum. Tranformasi teknologi, adopsi varitas tanaman baru, komersialisasi tanaman, memberikan tekanan yang dahsyat bagi lahirnya perubahan-perubahan dalam organisasi sosial pedesaan dan pranata sosial pedesaan (Heyzer, 1986: 11). Pengaruh ekonomi pasar kapitalis terhadap pembentukan diferensiasi sosial pedesaan merupakan gejala yang tidak dapat dihindari. Para petani mau tidak mau sangat tergantung pada ekonomi pasar, karena pertanian sangat berfluktuasi, dan nilai tukar relatif produk pertanian dengan kebutuhan lain, yang tidak mereka produksi, cenderung menurun dari waktu ke waktu.

Ekonomi pasar, yang dimulai dengan komersiali-

sasi pertanian, telah mempengaruhi sendi-sendi ekonomi masyarakat desa. Ekonomi subsistensi telah dilemahkan oleh ekonomi pasar yang merubah tidak saja orientasi kehidupan ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi sendi-sendi sosial dan merubahnya menjadi "materialistik".

Diversifikasi ekonomi desa, yang ditandai dengan munculnya berbagai kegiatan luar pertanian, tampaknya merupakan tanda kemajuan ekonomi pedesaan. Petani berlahan sempit dapat memperoleh tambahan pendapatan dan menggunakan waktu luang mereka dalam kegiatan luar pertanian. Secara luas, proses ini dapat memperkuat perekonomian wilayah karena muncul sektor-sektor alternatif yang dapat menampung tenaga kerja pedesaan. Perdagangan memberikan peluang usaha sekaligus tambahan pendapatan bagi rumah tangga pedesaan. Keterlibatan perempuan dalam kegiatan di luar pertanian pun tidak dapat diartikan sebagai "pelarian" dari pertanian, karena keterlibatan mereka dalam kegiatan luar pertanian tidak bersifat penuh karena mereka masih terlibat dalam kegiatan pertanian.

Tidak juga dapat dikatakan bahwa berkurangnya kesempatan kerja di pertanian sebagai indikator munculnya sejumlah penduduk tidak bertanah. Para pedagang berstatus sebagai anggota rumah tangga tani dan separuh dari mereka masih terlibat dalam kegiatan pertanian. Perdagangan dan pertanian dilakukan secara bersamaan, sebagai fungsi pemanfaatan waktu luang dan mencari tambahan pendapatan yang tidak mungkin dipenuhi hanya dengan terlibat dalam sektor pertanian. Selain itu, suami pedagang umumnya petani yang aktif terlibat dalam kegiatan usaha tani keluarga. Jelas bahwa keterlibatan perempuan tidak hanya disebabkan oleh terbatas-

nya luas lahan pertanian (yang mempengaruhi keadaan ekonomi rumah tangga), tetapi juga akibat "lemahnya" posisi perempuan (secara sosial-budaya) dalam pengambilan keputusan di sektor pertanian sehingga tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk mencurahkan waktu dalam kegiatan pertanian secara penuh. Keterlibatan mereka dalam kegiatan pertanian, akhirnya hanya sebagai pembantu sang suami. Laki-lakilah yang secara sosial budaya dianggap pemilik lahan dan usaha tani ●

Bab Sepuluh

Antara Peran Produktif dan Reproduktif: Perempuan dalam Industri Rumah Tangga Kerajinan

Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan Publik

KETERLIBATAN perempuan dalam kegiatan ekonomi di pedesaan merupakan suatu fenomena umum yang telah berlangsung dalam waktu lama. Dalam berbagai laporan dapat dilihat bahwa sejak awal abad ke –20 perempuan telah menjadi bagian dari keseluruhan kehidupan ekonomi desa. Laporan Ochse dan Terra yang menggambarkan situasi tahun 1932–1933 merupakan bukti tentang keterlibatan perempuan dalam ekonomi desa dan ekonomi rumah tangga, khususnya perempuan saat itu telah terlibat dalam penjualan makanan jadi (de Vries, 1985: 76). Paling tidak, keterlibatan perempuan di luar sektor pertanian semacam ini tidak semata-mata disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam pemilikan lahan dan mekanisme pertanian, tetapi jauh lebih kom-

pleks yang dapat diinterpretasikan sebagai tanda dari perkembangan sosial ekonomi yang luas.

Bidang pertanian merupakan bidang di mana perempuan terlibat secara intensif dan berperan penting di dalam keseluruhan proses tranformasi masyarakat desa. Bukan saja perempuan, merupakan "penemu" tradisi bercocok tanam (Rosaldo, 1979), tetapi fakta memperlihatkan bahwa pada saat laki-laki tidak ada maka perempuanlah yang mengelola berbagai kegiatan ekonomi rumah tangga (Rodenborg, 1993). Perempuan kemudian tidak hanya berperan dalam rumah tangga, tetapi juga di luar rumah sebagai pencari nafkah dan terlibat dalam kegiatan sosial yang melahirkan gejala *triple role* kaum perempuan. Ketiga peran ini menunjukkan ikatan yang sangat kuat perempuan dengan rumah, dengan pekerjaan-pekerjaan domestik, dalam memenuhi tuntutan ideologis perempuan yang memiliki peran reproduktif.

Gambaran tentang peran perempuan yang luas menegaskan bahwa konteks keterlibatan perempuan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Bagaimanapun keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi, tidak dapat dipisahkan dari keadaan di dalam rumah, antara lain menyangkut komposisi keluarga dan umur anak, demikian pula keterlibatan ekonomi kaum perempuan harus pula dilihat dalam konteks sosial budaya di mana keterlibatan itu dimungkinkan. Selain perubahan-perubahan ikatan keluarga, perubahan persepsi tentang posisi perempuan dalam rumah tangga dan desa merupakan dasar dari keterlibatan ekonomi perempuan.

Pergeseran keterlibatan perempuan di dalam bidang ekonomi itu sendiri telah terjadi di pedesaan, terutama perubahan kesempatan kerja yang dipengaruhi oleh proses pembangunan pertanian. Adopsi varitas

tanaman baru dan proses komersialisasi pertanian merupakan tekanan penting yang merubah organisasi dan institusi sosial pedesaan (Heyzer, 1986: 11). *Ani-ani* yang digantikan oleh sabit, alat penyiang (*landah*) yang menggantikan tangan manusia, *alu* dan *lesung* penumbuk yang digantikan oleh mesin penggiling padi (huller), dan meluasnya sistem tebasan, telah membatasi keterlibatan perempuan dalam kegiatan pertanian (Collier, 1981; Hüsken, 1984: 122; Hüsken & White, 1989: 32-33).

Namun demikian, berkurangnya pekerjaan-pekerjaan ini tidak secara langsung menyebabkan perempuan meninggalkan sektor pertanian, yang mempengaruhi tingkat urbanisasi (Hayami, 1988: 55), karena sebagian perempuan tetap terlibat dalam bidang pertanian dengan mencari pendapatan tambahan di luar sektor pertanian, yang dalam banyak kasus memberikan pendapatan yang lebih besar (Rietveld. 1986: 108). Keterbatasan kesempatan kerja dalam bidang pekerjaan sekaligus, tidak seluruhnya di luar sektor pertanian. Seorang perempuan pedesaan karenanya dapat saja menjadi ibu dan istri di rumah, bekerja pada industri rumah tangga, masih mengurus atau terlibat dalam kegiatan pertanian, dan masih terlibat dalam kegiatan sosial di desa.

Kegiatan kerajinan merupakan salah satu bentuk kegiatan industri rumah tangga yang juga memiliki sejarah yang cukup panjang (Soeroto & Hatmosuprobo, 1979). Kerajinan batik, anyaman bambu, rotan, dan keramik, merupakan contoh dari kegiatan ekonomi yang telah mengakar di dalam masyarakat pedesaan. Munculnya kegiatan ekonomi semacam ini, tentu saja tidak dapat secara langsung dikaitkan dengan kemunduran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja (Abdullah et al., 1995), tetapi juga merupakan fungsi dari diferen-

siasi kegiatan ekonomi dalam suatu struktur ekonomi wilayah. Oleh karena itu, kegiatan kerajinan telah memiliki tradisi yang hampir sama panjangnya dengan pertanian itu sendiri, yang kemudian dapat dilihat bahwa kegiatan sektor ini memiliki peran yang saling mendukung dalam ekonomi desa secara keseluruhan.

Laporan dalam Bab ini lebih memfokuskan pada keterlibatan perempuan dalam kegiatan kerajinan yang merupakan salah satu bentuk industri rumah tangga. Satu masalah dasar yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: Apa hakikat keterikatan perempuan dalam kegiatan kerajinan? Menjawab pertanyaan ini bukan hanya berarti menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan, tetapi lebih merupakan pengujian kembali kekuatan proses domestikasi dalam hubungannya dengan kekuatan-kekuatan yang mendorong partisipasi perempuan dalam bidang publik. Untuk itu perlu dilihat hubungan antara peran produktif yang dimainkan perempuan dengan peran reproduktif yang bersifat ideologis yang justru mereproduksi status perempuan sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan domestik pada dasarnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan perempuan untuk bekerja (lihat Gannage, 1986).

Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya akan menitik beratkan tulisan ini pada empat bidang penjelasan *Pertama,* melihat karakteristik perempuan dan industri rumah tangga kerajinan di mana keterlibatan perempuan di dalamnya dimungkinkan dengan adanya ciri-ciri yang bersesuaian. *Kedua,* melihat pada kesempatan kerja dan sumbangan ekonomi kerajinan yang berfungsi bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. *Ketiga,* menguji hubungan-hubungan kegiatan produktif dan reproduktif di mana kesesuaian antara keduanya meru-

pakan faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kegiatan kerajinan yang ini memiliki implikasi yang meluas dalam melihat bidang-bidang ekonomi lain di mana perempuan terlibat. *Keempat,* menganalisis faktor kultural yang meliputi kultur kerja di mana keterlibatan perempuan dalam industri rumah tangga kerajinan merupakan kelanjutan dari tradisi yang hidup dalam suatu masyarakat. Empat bidang penjelasan ini akan memberikan jawaban terhadap analisis keterlibatan perempuan dalam kegiatan kerajinan, yang sekaligus dapat mengevaluasi hakikat partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Data untuk analisis dalam Bab ini diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di empat propinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Barat, di bawah koordinasi Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitian tersebut telah diterbitkan secara terpisah dalam Seri Studi wanita (Wisnobroto & Budiono, 1994; Lestari *et al.,* 1994; Susilastuti *et al.,* 1994; Muhibat & Sekarningrum, 1994).

Perempuan dalam Industri Rumah Tangga Kerajinan

Kerajinan bukan hanya merupakan suatu bentuk kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan kegiatan kebudayaan daerah itu di mana kerajinan merupakan kegiatan yang telah mentradisi. Kerajinan ukir Jepara atau Batik Solo dan Pekalongan, misalnya, menjadi *trade mark* masing-masing daerah tersebut yang kemudian membentuk identitas nasional karena memiliki pengaruh yang luas. Hasil kerajinan ini pula yang kemudian dipasarkan meluas hingga ke luar negeri.

Pada awalnya kerajinan merupakan bentuk pe-

manfaatan sumber alam yang ada di daerah setempat, yang pemasarannya juga terbatas hanya di daerah sekitar. Pergeseran di dalam perkembangan kerajinan terjadi pada saat munculnya proses integrasi pasar di mana pasar-pasar lokal terkait dengan pasar regional dan nasional. Hasil kerajinan kemudian beredar jauh melampaui batas-batas desa. Sekarang ini perkembangan kerajinan memasuki tahap yang lain di mana ekspansi pasar telah memungkinkan munculnya desain dan model yang beragam untuk memenuhi permintaan pasar yang berbeda dan munculnya iklim kompetitif di dalam usaha kerajinan. Di sini kerajinan bukan lagi menjadi suatu tradisi, tetapi telah berubah menjadi komoditi yang diproduksi untuk kepentingan pasar.

Perkembangan kerajinan dari waktu ke waktu memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan pedesaan, terutama dapat dilihat dari tiga fungsi yang diperlihatkan oleh sektor ini. *Pertama,* peluang kesempatan kerja yang dimunculkan oleh usaha kerajinan dapat merangsang perluasan peluang kerja bagi angkatan kerja pedesaan karena ia mempunyai potensi untuk menciptakan peluang kerja tanpa harus didukung oleh modal besar yang biasanya menjadi hambatan dalam perluasan lapangan kerja. Perkembangan kerajinan secara alamiah kemudian juga mentranformasikan kerajinan dari kegiatan yang melibatkan pekerja keluarga menjadi pekerja luar keluarga yang upahnya ditetapkan dengan jelas.

Kedua, kerajinan dapat menjadi sumber penghasilan penting bagi rumah tangga pedesaan terutama bagi rumah tangga tani yang berlahan sempit atau tuna kisma untuk mendapatkan penghasilan lain karena ada peluang kerja di bidang kerajinan. Perkembangan kerajinan meyebabkan sektor kerajinan ini juga mengikuti aturan-

aturan pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga jaminan upah dari sektor kerajinan juga semakin jelas. Dalam industri kulit di Manding, Yogyakarta, upah dihitung harian dan dibayarkan setiap minggu. Upah per hari berkisar dari 500 rupiah hingga 2.500 rupiah (rata-rata Rp. 976,00 perhari) (lihat Tabel 1). Meskipun ini bukan suatu jumlah yang besar, uang tunai yang diterima memiliki arti penting, terutama karena sifatnya yang pasti.

Tabel 1.
Distribusi Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Industri Kulit di Manding, Yogyakarta

Besarnya Upah (dalam rupiah)	Frekuensi	Persentase
< 500.000	16	6.0
501.000-750.000	69	25.7
751.000-1.000.000	113	42.2
1.000.000-1.250.000	30	11.2
> 1.251.000	40	14.9
TOTAL	268	100.0

Sumber: Data Primer, 1991.

Ketiga, peluang kerja di kerajinan memiliki kaitan dengan pengembangan industri lainnya dan pengembangan pertanian dan perdagangan secara umum. Kerajinan tidak terlepas sama sekali dari sektor pertanian karena pekerja kerajinan dapat menggabungkan kedua kegiatan itu untuk meningkatkan kesejahteraan. Kerajinan juga merupakan bentuk diversifikasi usaha yang memberikan kemungkinan yang besar untuk mengatasi kesulitan ekonomi penduduk desa. Munculnya kerajinan

juga merangsang perkembangan perdagangan di daerah pedesaan, tidak hanya kerajinan dapat menjadi salah satu komoditi penting yang dipasarkan, tetapi juga karena daya beli masyarakat yang meningkat mempengaruhi permintaan barang-barang di pasar pedesaan.

Ketiga faktor tersebut dapat menjadi faktor penting di dalam menahan penduduk desa untuk tetap tinggal dan bekerja di pedesaan sehingga mereka dapat berperan sebaagi penggerak pembangunan di pedesaan (Effendi, 1990: 43). Kesulitan partisipasi masyarakat desa dalam berbagai aktivitas di pedesaan, karenanya, dapat teratasi. Meskipun demikian, dalam studi (industri kerajinan) terlihat bahwa partisipasi laki-laki sangat terbatas karena laki-laki memilih untuk bekerja di kota karena alasan upah yang lebih tinggi. Hal ini kemudian menyebabkan kerajinan lebih cenderung melibatkan tenaga kerja perempuan.

Serangkaian usaha telah dilakukan untuk mengembangkan usaha kerajinan menjadi usaha yang lebih berperan bagi pelaku ekonomi maupun bagi perkembangan ekonomi secara umum. Kebijakan pemerintah dan lembaga-lembaga terkait didasari oleh asumsi bahwa usaha kecil merupakan dasar dari perekonomian rakyat yang harus dikembangkan untuk kemakmuran rakyat di satu pihak (misalnya sistem Bapak-angkat) dan di lain pihak usaha kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu struktur ekonomi di mana keberadaannya sangat menentukan perkembangan ekonomi secara umum (Saleh, 1987).

Usaha pengembangan kerajinan tampak dari berbagai kebijaksanaan, meliputi pelatihan-pelatihan, pemberian fasilitas kredit, dan berbagai bentuk proteksi. Pelatihan diarahkan untuk membuka wawasan dan mem-

bina kemampuan manajerial pengusaha agar dapat mengembangkan usahanya ke arah kegiatan ekonomi yang lebih profesional. Minat pengusaha kecil yang kemudian berkembang didukung oleh fasilitas kredit yang disediakan oleh pemerintah dan fasilitas kredit yang tersedia dalam berbagai bentuk. Kredit ini merupakan *engine* yang menjadi pemicu pertumbuhan usaha kecil. Proteksi dalam berbagai bentuknya, seperti pengaturan harga dan pelarangan keterlibatan langsung kaum kapitalis dalam kerajinan, dapat memberikan iklim yang kondusif bagi perkembangan kerajinan. Jika program pembinaan usaha kecil dapat diterapkan dengan baik, maka tidak hanya perkembangan akan terjadi, tetapi juga akan menumbuhkan kemandirian industri kerajinan.

Dari serangkaian observasi yang telah dilakukan diberbagai tempat dari studi ini terlihat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pengembangan kerajinan ini. *Pertama,* kesulitan dalam penyediaan modal. Usaha kerajinan pada hakekatnya adalah usaha kecil, tetapi sejalan dengan perkembangan usaha, usaha ini membutuhkan modal yang lebih besar untuk dapat mengantisipasi pasar dan memenuhi permintaan pasar yang terus meningkat. Kesulitan yang utama dalam penyediaan modal karena pengambilan kredit selalu dikaitkan dengan jaminan berupa barang tak bergerak. Lembaga perkreditan tidak dapat menjangkau kelompok pengusaha kecil kerajinan semacam ini secara langsung.

Kedua, kesulitan dalam mekanisasi. Adalah suatu gambaran yang mencolok bahwa mekanisasi merupakan faktor penting yang menyulitkan industri di dalam bersaing dengan produk-produk pabrik dengan mesin canggih. Mekanisasi secara langsung berpengaruh dalam peningkatan efisiensi.

Ketiga, pemasaran yang masih sangat tergantung pada *middlemen* yang memiliki kekuasaan besar dalam penentuan harga. Jika pekerja industri mendapatkan pekerjaan dengan sistem borongan maka dia dieksploitasi dengan upah yang rendah dan harus melibatkan anggota keluarganya yang lain untuk mengejar target yang telah disepakati. *Keempat,* organisasi yang kurang baik yang tampak dari manajemen yang tidak jelas, baik dalam hal pembukuan, pengupahan, dan pembagian kerja. Hubungan keluarga masih menjadi unsur yang sangat penting di dalam menjalankan usaha. Usaha kerajinan tidak terpisah dari kehidupan keluarga sehingga terlihat bahwa para pekerja seringkali juga terlibat kegiatan memasak dan membersihkan rumah majikan.

Keempat hal tersebut merupakan faktor penting yang menghambat perkembangan kerajinan dan secara langsung mempengaruhi bagaimana para pekerja perempuan dapat bergantung selanjutnya pada industri kerajinan. Kecenderungan keterlibatan perempuan dari kelompok usia muda merupakan hal yang mencolok dalam industri kerajinan. Dalam kasus kerajinan kulit di Yogyakarta, usia pekerja bahkan didominasi oleh kelompok umur 15 – 19 tahun yang mencapai 42,5 persen. Dalam kasus kerajinan ukiran di Jawa Tengah usia pekerja lebih tinggi meskipun memperlihatkan dominasi usia muda, yakni kelompok pekerja yang berusia 13–24 tahun mencapai 51,66 persen dan 25–36 tahun mencapai 35 persen. Usia muda semacam ini merupakan daya tarik bagi industri karena memiliki beberapa keuntungan. *Pertama,* tenaga kerja dapat dinilai sebagai tenaga kerja anak-anak sehingga dapat dibayar dengan upah yang rendah. *Kedua,* tenaga kerja muda, terutama yang belum menikah, tidak memiliki tingkat absentia yang tinggi karena cuti

hamil dan mengurus anak. *Ketiga,* pekerja muda dianggap ideal karena mereka dapat berkonsentrasi penuh, tidak terganggu dengan berbagai tugas domestik sebagai ibu rumah tangga (Susilastuti et al., 1994: 21).

Kondisi ini tentu berbeda dengan kelompok perempuan yang sudah menikah, yang merupakan sebagian besar pekerja. Meskipun kasus industri rumah tangga kerajinan kulit menunjukkan bahwa 67,5 persen belum menikah, dalam kasus-kasus lain tampak bahwa hampir tiga perempat dari perempuan pekerja berstatus sebagai ibu rumah tangga (lihat Lestari et al., 1994: 28; Wisnubroto dan Budiono, 1994: 25). Hal ini memperlihatkan kecenderungan penggabungan status sebagai ibu rumah tangga dengan pekerja kerajinan. Data jumlah anak dan usia anak sesungguhnya dapat menjelaskan hubungan kegiatan ekonomi dengan struktur keluarga, terutama menyangkut pertanyaan apakah perempuan dengan ciri jumlah anak banyak dan umur anak muda cenderung bekerja di bidang kerajinan dibandingkan bidang yang lain. Kegiatan domestik pada dasarnya sangat mempengaruhi pengambilan keputusan perempuan untuk bekerja (lihat Gannage, 1986).

Hal ini terbukti dengan fakta bahwa pekerjaan kerajinan merupakan pekerjaan yang dominan baik sebagai pekerjaan pokok maupun sebagai pekerjaan sampingan. Pekerjaan pokok yang paling penting dalam kasus IRTK di Jawa Timur adalah kerajinan bambu. Sebanyak 54,41 persen pekerja perempuan di Tuban dan 68,24 persen di Lamongan memilih kerajinan bambu sebagai pekerjaan utama (Wisnubroto & Budiono, 1994:31). Mereka yang menyatakan pekerjaan kerajinan sebagai pekerjaan sampingan pun sesungguhnya melihat pekerjaan di luar sektor pertanian ini umumnya memberikan sumbangan

pendapatan yang lebih besar. Namun yang jelas bahwa perempuan yang terlibat dalam industri rumah tangga kerajinan tidak hanya dapat menggabungkan kepentingan rumah tangga dengan bekerja di bidang industri kerajinan, tetapi juga menggabungkan pekerjaan industri rumah tangga kerajinan dengan pekerjaan dalam bidang pertanian, termasuk juga sebagai buruh tani. Hampir tigaperempat pekerja kerajinan dalam berbagai kasus mendapatkan penghasilan dari pekerjaan ini merupakan faktor cukup penting di dalam mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam kegiatan industri kerajinan.

Tenaga kerja perempuan memberikan keuntungan ganda bagi majikan karena selain dapat dipekerjakan dengan upah yang rendah, tenaga kerja perempuan dapat dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan rumah tangga sang majikan, yang antara lain meliputi memasak, mencuci piring, membeli bahan mentah, dan menyapu (Tabel 2). Hal ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja perempuan masih dipandang sebagai pekerja keluarga di mana hubungan kekeluargaan masih sangat penting. Pekerja perempuan pun mengaku mengerjakannya dengan senang hati, meskipun sang juragan meminta mereka untuk menjamu tamu atau mengasuh anak majikan (Lestari et al., 1994:46). Untuk pekerjaan semacam ini tentu saja pekerja tidak mendapatkan upah ekstra, namun hubungan yang mempribadi memberikan banyak keuntungan lain seperti kebebasan para pekerja meminjam uang kepada majikan.

Posisi majikan dalam hubungan industri ini sangat dominan dan tidak ada tawar menawar kekuasaan. Dalam hal upah, para pekerja tidak pernah mempertanyakan berapa besar upah yang mereka terima, apalagi mempertanyakan kenaikan upah. Dalam kasus industri

ukir sebagian besar (88,33 persen) pekerja mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami kenaikan upah. Majikan pula yang menentukan apakah suatu pekerjaan dikerjakan dengan sistem harian atau borongan. Dalam kasus industri kulit, para pekerja bahkan takut untuk menanyakan upah yang diterima oleh rekan kerjanya. Seorang ibu mengatakan: "*Ajrih mbak kalih Ibu N* (majikannya), *mangke ndak dikira tumbak cucukan*" (Takut mbak pada Ibu N (majikannya), nanti dikira suka mengadu) (Susilastuti et al., 1994: 29). Majikan yang dalam hal ini laki-laki juga menentukan apa yang dikerjakan oleh pekerja laki-laki dan apa yang layak dikerjakan oleh pekerja perempuan.

Tabel 2.
Jenis Pekerjaan yang Dikerjakan di Rumah Majikan

Jenis Pekerjaan	N	Persen
Memasak	4	16.0
Mencuci Piring	1	4.0
Membeli Bahan Mentah	2	8.0
Menyapu	6	24.0
Pekerjaan lain-lain	12	28.0
JUMLAH	25	100.0

Sumber: Data Primer yang Diolah, 1991

Pekerjaan yang membutuhkan kekuatan fisik cenderung dikerjakan oleh laki-laki, seperti penggergajian dan pemotongan kayu dalam kerajinan ukir. Upah untuk pekerjaan semacam ini relatif tinggi, mencapai Rp 7.500 perhari (Lestari et al., 1994: 32). Masyarakat ikut mengkonstruksikan pekerjaan yang pantas untuk laki-laki dan perempuan. Pekerjaan mengampelas, misalnya dianggap

sebagai pekerjaan yang ringan sehingga cocok untuk perempuan. Tabel 3 memperlihatkan pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin pada industri kerajinan pandan di Jawa barat (Muhibat dan Sekarningrum, 1994).

Tabel 3.
Jenis Pekerjaan yang Dikerjakan di Rumah Majikan

Jenis Kegiatan	Laki-laki	Perempuan
Ngala (mengambil durian)	✓	✓
Penvuatan		✓
Maud basah		✓
Ngulup (menggodok)	✓	✓
Ngeucum (merendam)	✓	
Ngajait (angkat basah)	✓	
Moe (dijemur)	✓	
Dijait (angkat kering)		✓
Diibunkcun (diembunkan)		✓
Dipaud Kering		✓
Dianyam		✓
Dilepe (garis pinggir)		✓

Pekerja sendiri menganggap wajar bahwa laki-laki menerima upah lebih tinggi dari perempuan: *"Nek wong lanang bayare sethithik kaya wong wedok nggih mboten wangun. Soale wong lanang niku rak gadah tanggung jawab kalih keluargane"* (Kalau laki-laki menerima upah sedikit seperti perempuan *kan* tidak pantas. Soalnya laki-laki mempunyai tanggung jawab ekonomi terhadap keluarga) (Susilastuti, 1994: 29-30).

Sumbangan Ekonomi Industri Rumah Tangga Kerajinan

Upah yang diterima dari pekerjaan kerajinan memiliki arti penting bagi keterlibatan pekerja perempuan.

Pekerjaan ini tidak hanya bersifat pekerjaan sampingan, karena justru kerajinan memberikan upah yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan kerajinan merupakan pekerjaan sampingan, tetapi upah yang diterima memiliki arti yang sangat penting bagi ekonomi rumah tangga. Pekerjaan pertanian dan kerajinan merupakan dua bidang pekerjaan yang dominan. Dalam kasus Tuban, 35 persen menyatakan kerajinan sebagai sumber penghasilan utama dan 40 persen sumber penghasilan utamanya dari pertanian. Di Lamongan 36,33 persen mengatakan kerajinan sebagai sumber utama dan 30.08 persen mengatakan pertanian sebagai sumber penghasilan utama.

Upah yang diterima sesungguhnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan upah minimum yang telah ditetapkan. Dalam kasus kerajinan kulit upah rata-rata hanya Rp. 976,00 per hari. Kelompok yang menerima upah di atas seribu rupiah hanya 26,1 persen dan kelompok terbanyak menerima upah di bawah seribu rupiah. Jumlah yang hampir sama diterima oleh pekerja anyaman bambu di Tasikmalaya, hanya Rp. 706,50 per hari. Hanya 1,3 persen yang mendapat upah di atas 1.000,0 per hari. Dalam kasus kerajinan bambu di JawaTimur, upah yang diterima lebih tinggi, berkisar antara Rp. 1.000,00 hingga Rp. 1.900,00 per hari.

Meskipun upah yang diterima tergolong kecil, nilai uang tunai dalam pengupahan itu sangat penting. Kepastian akan pendapatan yang diperoleh setiap minggu memiliki arti bagi kepastian hidup itu sendiri, terutama jika dihubungkan dengan pekerjaan mereka dalam bidang pertanian yang pendapatannya diperoleh secara berkala, pada saat panen. Dalam sistem borongan, seperti dalam kasus kerajinan ukiran, kepastian tentang

upah yang diterima juga dapat diketahui setelah pekerjaan selesai dikerjakan.

Uang tunai ini terutama digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, termasuk untuk membiayai pendidikan anak. Dalam kasus kerajinan bambu di Jawa Timur kebutuhan sehari-hari ini mencapai 82,31 persen. Hal ini menunjukkan bahwa selain uang berfungsi langsung dalam pemenuhan kebutuhan harian, kebutuhan akan uang merupakan kebutuhan yang telah menjadi baku dalam masyarakat. Masuknya uang sebagai alat transaksi sosial ekonomi menandakan perubahan yang mendasar dalam masyarakat (Abdullah, 1991). Dapat dilihat dari pentingnya *item* arisan dan *nyumbang* dalam jajaran daftar pengeluaran. Selain komponen kebutuhan sehari-hari, arisan dan *nyumbang* merupakan komponen penting. Hal ini menunjukkan pergeseran nilai uang di mana kebutuhan uang tunai menjadi sangat mendesak.

Atas dasar ini, pendapatan yang diterima oleh kaum perempuan tidak berarti bahwa perempuan memiliki kebebasan di dalam penggunaan uang. Keterlibatan mereka jelas merupakan respon terhadap tekanan kebutuhan uang tunai yang merupakan tekanan kultural yang mempengaruhi pengelolaan sosial budaya yang hal ini dapat dilihat pada institusi *nyumbang*. Arisan mungkin dapat dikatakan sebagai bentuk institusi yang memungkinkan kebebasan berbelanja. Tapi pemilihan *item* yang dibelanjakan juga sangat terikat pada status sosial yang telah dibentuk dan disusun dalam masyarakat sehingga arisan itu merupakan "jalan" untuk memenuhi kebutuhan akan status itu sendiri di dalam masyarakat yang semakin berorientasi pada simbolis di mana uang kemudian menjadi alat di dalam pemenuhan kebutuhan identifikasi sosial.

Arti keterlibatan perempuan dalam kerajinan juga dapat dinilai dari peran suami bagi ekonomi rumah tangga. Sepertiga pekerja menyatakan bahwa dorongan mereka bekerja lebih disebabkan oleh tekanan ekonomi, di mana penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kalau benar apa yang dikatakan para peneliti bahwa pekerjaan kerajinan umumnya dilakukan oleh kelompok penduduk yang paling miskin (lihat Muhibat dan Sekarningrum, 1994: 1), maka fungsi ekonomi kerajinan menjadi dasar penting dalam partisipasi perempuan dalam bidang kerajinan. Keterlibatan suami, yang tampak dari pekerjaan utama sebagian besar penduduk desa yang diteliti, sebagai petani menjelaskan pentingnya uang tunai yang disumbangkan oleh pekerja perempuan. Dalam sistem borongan, suami bahkan terlibat secara mencolok dalam pekerjaan yang dilakukan istri. Dalam kasus kerajinan ukir di Jawa Tengah, misalnya, seperempat responden mengaku dibantu suami dalam menyelesaikan pekerjaan (Lestari et al., 1994: 54)

Dampak dari fungsi ekonomi keterlibatan perempuan dalam industri rumah tangga kerajinan dapat juga diperhatikan dari mobilitas status ekonomi yang terjadi, di mana sumbangan ekonomi dari kerajinan telah memungkinkan pekerja memperbaiki kehidupan jadi lebih baik. Uang yang diterima dari kerajinan, dalam kasus industri kulit di Yogyakarta, telah memungkinkan mereka mengikuti arisan. Uang arisan itu kemudian memungkinkan mereka membeli perabot rumah tangga, suatu barang yang sulit dibeli tanpa uang tunai dalam jumlah yang besar. Perbedaan status ekonomi dan sosial akibat keterlibatan perempuan di luar bidang pertanian merupakan daya tarik penting (Abdullah, 1990) yang mempengaruhi perempuan terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Antara Peran produktif dan Reproduktif Perempuan

Keterlibatan perempuan dalam bidang produktif tentu saja membawa dampak terhadap fungsi reproduktif perempuan, khususnya menyangkut peran perempuan sebagai istri dan ibu. Fungsi reproduktif tidak dapat ditinggalkan begitu saja sehingga dapat mengganggu keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi di luar rumah. Pentingnya peran reproduktif ini dapat dilihat pada tiga hal. *Pertama,* alokasi waktu yang memperlihatkan bahwa waktu yang dicurahkan di luar rumah dan di dalam rumah hampir sama besarnya. *Kedua,* pada struktur usia balita cenderung terbatas. *Ketiga,* jenis kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan. Industri rumah tangga kerajinan dalam kasus-kasus yang diteliti semuanya memperlihatkan peran kerajinan yang mampu mengakomodasikan kepentingan atau peran reproduktif perempuan. Hal ini menjadi penyebab penting keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi.

Industri kerajinan merupakan salah satu industri yang sangat terikat pada rumah tangga karena kegiatan produksi berlangsung di rumah atau di sekitar rumah *(home-based production*). Ciri industri semacam ini merupakan aktor yang sangat menentukan keterlibatan perempuan, yang mendukung usaha perempuan untuk memaksimalkan kesejahteraan keluarga (Bhatt, 1987). Dalam kasus kerajinan bambu di Tuban 77,50 persen pekerja mengatakan alasan bekerja karena dapat *disambi* dengan pekerjaan rumah, sementara dalam kasus Lamongan mencapai 96,11 persen (Wisnubroto & Budiono, 1994: 33). Industri rumah tangga kerajinan merupakan kegiatan ekonomi yang ideal bagi kaum perempuan karena industri semacam ini dapat memadukan tugas perempuan sebagai ibu/istri (reproduktif) dengan tugas

sebagai pencari nafkah (produktif).

Ciri industri yang berlangsung di sekitar rumah ini memperlihatkan empat keuntungan. *Pertama,* pekerjaan industri kerajinan memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehingga tidak mengganggu tugas rumah. Tugas-tugas mengasuh anak, berbelanja, memasak, membersihkan rumah, mencuci piring, mencuci baju, dan menyeterika, merupakan pekerjaan yang masih dikerjakan oleh pekerja industri dan pekerjaan yang menghabiskan banyak waktu. Selain itu, perempuan masih terlibat dalam berbagai bentuk kegiatan sosial, seperti pengajian, PKK, dan arisan. Di Tuban setiap perempuan rata-rata menghabiskan waktu 18,75 jam sehari untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sosial, dan mencari nafkah, sementara di Lamongan mencapai 20,5 jam sehari.

Kedua, pekerjaan industri kerajinan dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan kewajiban perempuan sebagai ibu karena pengasuhan anak masih dapat dilakukan. Sebanyak dua pertiga perempuan yang terlibat dalam industri kerajinan bambu masih mengurus anak. Di Tuban mencapai 76,19 persen dan di Lamongan 76,98 persen. Para suami hampir tidak ada peran sama sekali. Kenyataan ini juga berlaku untuk pekerjaan memasak, mencuci piring, dan mengurus rumah. Di sini tampak keterlibatan perempuan dalam industri kerajinan tidak menyebabkan ia meninggalkan tugas reproduktif di satu pihak, di lain pihak keterlibatan perempuan di luar rumah tidak diikuti keterlibatan laki-laki di dalam rumah. Sejalan dengan ini dapat dikatakan bahwa peran ganda memang berarti beban ganda bagi kaum perempuan.

Ketiga, industri kerajinan juga melibatkan anggota rumah tangga (terutama suami dan anak-anak) sehingga

dapat meringankan beban perempuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai pekerja. Yang terlibat dalam penyelesaian suatu pekerjaan, terutama dalam sistem borongan, tidak hanya suami dan anak-anak, tetapi juga saudara dan tetangga. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa kegiatan industri kerajinan mengakar dalam masyarakat yang sangat terikat pada nilai moral, tetapi juga kerajinan telah menjadi faktor di dalam enkulturasi nilai "bekerja" di dalam rumah tangga.

Keempat, penyelesaian tidak terikat pada waktu dan jam kerja sehingga dapat dikerjakan di sela-sela pekerjaan rumah tangga. Hal ini juga memungkinkan perempuan terlibat secara meluas dalam kegiatan kerajinan. Selain itu, aturan waktu yang longgar memungkinkan pekerja untuk menggabungkan keterlibatannya dalam bidang pekerjaan lain, khususnya kegiatan pertanian yang masih berperan penting dalam kasus-kasus yang diteliti.

Ciri-ciri industri semacam ini, yang memberikan peluang bagi perempuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan di luar rumah tangga, sesungguhnya mereproduksi keterikatan perempuan pada kehidupan domestik, terutama karena industri rumah tangga kerajinan memberikan kemungkinan bagi perempuan untuk mempertahankan status dan peran mereka sebagai ibu rumah tangga. Di sini juga menjadi jelas bahwa tidak ada larangan perempuan untuk bekerja, asalkan peran reproduktifnya tidak ditinggalkan.

Keterlibatan perempuan dalam industri kerajinan selain merupakan suatu bentuk melestarikan peran reproduktif kaum perempuan, keterlibatan mereka juga menunjukkan bahwa kerajinan merupakan bentuk kegiatan yang dapat melestarikan tradisi agraris di pedesa-

an. Kesempatan kerja dalam industri kerajinan di satu pihak telah menghambat arus urbanisasi sehingga memungkinkan berlangsungnya pembangunan pedesaan dalam arti yang luas, di lain pihak kerajinan telah memungkinkan perempuan untuk tetap terlibat dalam pekerjaan pertanian. Untuk itu, usaha-usaha mengembangkan industri kerajinan sebagai usaha alternatif di pedesaan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi atas upah yang diperoleh, tetapi juga kesejahteraan dalam arti yang jauh lebih luas.

Penutup

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi di pedesaan merupakan fenomena umum yang telah berlangsung dalam waktu lama. Laporan Ochse dan Terry (dalam De Vries, 1985:76) yang menggambarkan situasi periode 1932-1933 merupakan bukti tentang keterlibatan perempuan dalam ekonomi pedesaan dan ekonomi rumah tangga, khususnya mereka yang saat itu telah terlibat penjualan makanan jadi. Di sektor pertanian perempuan terlibat secara intensif dan berperan penting dalam keseluruhan transformasi masyarakat desa. Pergeseran keterlibatan perempuan di dalam bidang pertanian telah terjadi, terutama karena keterbatasan kesempatan kerja yang disebabkan oleh proses pembangunan sektor pertanian tersebut.

Adopsi varitas tanaman baru dan proses komersialisasi pertanian merupakan tekanan penting yang mengubah organisasi dan institusi sosial pedesaan (Heyzer, 1986: 11). *Ani-ani* yang diganti oleh sabit, alat penyiang *(landah)* yang menggantikan tangan manusia, *alu* dan *lesung* penumbuk yang diganti oleh mesin penggiling (huller), dan meluasnya sistem tebasan, telah membatasi

keterlibatan perempuan dalam kegiatan pertanian (Collier, 1981; Husken, 1984:122; Husken & White, 1989:32-33). Namun keterbatasan kesempatan ini tidak berarti perempuan meninggalkan kegiatannya di sektor pertanian, yang mempengaruhi tingkat urbanisasi (Hayami, 1988: 55), karena sebagian perempuan tetap terlibat dalam sektor non-pertanian yang memberikan tambahan pendapatan lebih besar (Rietvild, 1986: 108). Industri kerajinan merupakan salah satu kegiatan ekonomi pedesaan diluar sektor pertanian yang banyak melibatkan perempuan.

Permasalahan yang cukup mendasar dalam tulisan ini adalah: Apa hakikat keterlibatan perempuan dalam industri kerajinan? Menjawab pertanyaan ini tidak terbatas pada menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan di industri kerajinan, lebih jauh merupakan pengujian kembali kekuatan proses domestikasi dalam hubungannya dengan kekuatan yang mendorong partisipasi perempuan dalam bidang publik.

Industri kerajinan yang cenderung banyak melibatkan perempuan kelompok usia muda tidak terbatas pada suatu bentuk kegiatan ekonomi, tetapi juga merupakan kegiatan kebudayaan. Hasil kerajinan dari suatu tempat menunjukkan ciri budaya daerah itu dan kerajinan merupakan kegiatan yang mentradisi, seperti ukiran Jepara, batik Solo, dan batik Pekalongan.

Pada awalnya industri kerajinan merupakan bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang ada di daerah setempat dan hasil produksinya dipasarkan secara lokal. Namun, sejalan dengan upaya integrasi pasar, maka pasar lokal terkait pada pasar regional, nasional bahkan internasional. Integrasi pasar berpengaruh terhadap perkembangan industri kerajinan yang secara periodik memiliki implikasi yang luas bagi pembangunan pedesaan,

terutama dilihat dari tiga fungsi pasar kerja. Pertama, kesempatan kerja terus meningkat sebanding dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditawarkan. Kedua, kerajinan merupakan sumber penghasilan rumah tangga yang penting terutama bagi mereka yang memiliki lahan sempit dan buruh tani. Ketiga, industri kerajinan ternyata memiliki kaitan dengan pengembang-an industri lainnya, pengembangan sektor pertanian dan perdagangan secara umum. Industri kerajinan, selain memiliki potensi yang prospektif untuk dikembangkan juga memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh para pelakunya, seperti keterbatasan modal usaha, mekanisasi proses produksi, pemasaran, dan organisasi.

Pendapatan yang diterima oleh perempuan yang terlibat dalam industri kerajinan memiliki arti penting bagi penghasilan rumah tangga. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan kerajinan merupakan pekerjaan sampingan, justru kegiatan kerajinan memberikan upah yang lebih besar dibandingkan dengan upah di sektor pertanian. Kasus di Tuban menunjukkan bahwa 35 persen menyatakan kerajinan sebagai sumber penghasilan utama dan 30,08 persen mengatakan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan utama.

Upah yang diterima sesungguhnya tidak banyak berbeda dibandingkan dengan upah minimum yang telah ditetapkan. Pada kasus kerajinan kulit upah rata-rata hanya Rp. 976,00 per hari. Kelompok yang menerima upah di atas seribu rupiah perhari hanya 26,1 persen. Pekerja anyaman bambu di Tasikmalaya, hanya Rp. 706,50 per hari dan hanya 1,3 persen yang mendapat upah di atas Rp. 1.000,00 per hari. Dalam kasus kerajinan bambu di Jawa Timur, upah yang diterima lebih tinggi, berkisar antara Rp. 1.000,00 hingga Rp. 1.900,00 per hari.

Berbeda dengan sektor pertanian yang pendapatannya diterima oleh para petani secara berkala. Pada industri kerajinan, kepastian pendapatan yang diperoleh setiap minggu memiliki arti penting bagi kepastian hidup. Seperti sistem borongan dalam kasus kerajinan ukiran, kepastian tentang upah yang diterima juga dapat dipastikan setelah pekerjaan selesai dikerjakan. Uang tunai tersebut terutama digunakan untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya pendidikan. Dalam kasus pekerja kerajinan di Jawa Timur, bagian dari penghasilan yang dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari ini mencapai 82,31 persen.

Keterlibatan perempuan yang sudah menikah dalam bidang produktif telah membawa dampak terhadap fungsi reproduktif perempuan, khususnya meyangkut peran perempuan sebagai istri dan ibu. Paling tidak ada tiga dampak yang ditimbulkan atas keterlibatan perempuan pada kegiatan kerajinan ini. Pertama, alokasi waktu tercurah menjadi terbagi dua antara kegiatan di luar rumah dan di dalam rumah. Kedua, perempuan yang terlihat dalam kegiatan kerajinan yang memiliki anak usia balita cenderung terbatas. Ketiga, perempuan yang terlibat dalam kegiatan kerajinan menunjukkan bahwa jenis pekerjaan tersebut mampu mengakomodasikan kepentingan atau peran reproduktif perempuan ●

Epilog

Bab Sebelas

Pembangunan, Supremasi Lelaki dan Dekonstruksi Peran Perempuan

TIDAK berlebihan jika Linda Alcoff mengatakan bahwa konsep perempuan hampir tidak mungkin didefinisikan secara tepat. Bukan saja karena istilah itu terlalu sering digunakan untuk menunjuk kepada berbagai sifat dan identitas, tetapi juga karena istilah itu sarat muatan ideologis dan politis. Supremasi laki-laki telah mempengaruhi kandungan konsep tersebut. "Menjadi Perempuan" tidak lain menjadi suatu makhluk yang "pantas" disebut perempuan di mata lelaki. Menjadi perempuan karenanya mengandung pengertian suatu penerimaan terhadap suatu kondisi atau prasyarat. Usaha memahami konsep perempuan ini dapat dilakukan dengan melihat pada wacana sosial yang menempatkan perempuan di dalam berbagai representasi. Sebelum realitas perempuan dapat dipahami, kecenderungan-kecenderungan dalam wacana perempuan harus diperiksa dengan seksama.

Wacana Perempuan yang Lemah dan Supremasi Laki-laki

Ideologi yang memandang perempuan "sebagai makhluk lemah" telah menjadi ideologi umum yang tidak hanya mempengaruhi masyarakat awam, tetapi juga menjadi cara pandang kaum intelektual di dalam melihat dan menempatkan perempuan. Perempuan (karena ia lemah) harus dibantu dalam berbagai hal. Dengan cara ini, *pertama,* potensi perempuan telah dilupakan, sehingga setiap usaha perempuan untuk tampil menunjukan kemampuannya dianggap sebagai sesuatu yang istimewa, bukan hal yang wajar. *Kedua,* wacana perempuan sebagai makhluk yang lemah telah menyebabkan terbentuknya struktur ketergantungan perempuan terhadap laki-laki. Setiap kesulitan yang dihadapi perempuan, seolah-olah membutuhkan keterlibatan laki-laki untuk memecahkannya. Perempuan yang terkena tindakan kekerasan cenderung melibatkan laki-laki (ayah, suami atau saudara laki-laki) untuk memecahkan persoalan. Padahal, sebagian kesulitan itu justru diciptakan oleh laki-laki. Sayangnya, perempuan sendiri terlibat di dalam mereproduksi wacana tentang perempuan sebagai makhluk yang lemah.

Di dalam kehidupan ekonomi, kita sangat terbiasa dengan istilah "perempuan pekerja". Istilah tersebut mengandung pengertian bahwa perempuan bekerja adalah sesuatu yang tidak biasa karena di dalam struktur berpikir umum yang bekerja adalah laki-laki. Hal ini tampak dari kecenderungan di mana kita tidak pernah menyebut "laki-laki pekerja" atau "laki-laki buruh industri", dan sebagainya. Jika yang bekerja perempuan, dengan sendirinya kita menyebut "perempuan pekerja pabrik" atau "perempuan karier" dan tidak pernah "laki-laki

karier". Dan yang menarik adalah pekerjaan tertentu secara langsung dikaitkan dengan perempuan, seperti "pembantu rumah tangga". Seolah-olah itu merupakan sebutan yang pas untuk menunjukkan dunia perempuan yang sesungguhnya.

Demikian pula dalam hal kecenderungan kita mengkaitkan keterampilan dengan laki-laki. Dalam berbagai laporan penelitian disebutkan "perkembangan industri tidak dapat menyerap tenaga kerja perempuan karena industri membutuhkan pekerja terampil". Kenyataan tentang pekerja perempuan kurang terampil dalam berbagai kasus dapat dibenarkan. Namun, adalah suatu bahaya besar jika kita membentuk oposisi biner: laki-laki/perempuan, terampil/tidak terampil. Hal ini akan menyebabkan munculnya persepsi yang salah dan menyesatkan dalam menempatkan perempuan dalam suatu struktur sosial.

Kecenderungan semacam ini berlaku di dalam berbagai bentuk wacana, seperti wacana "partisipasi perempuan". Istilah partisipasi di sini jelas mengandung pengertian bahwa perempuan selama ini tidak (atau kurang) berpartisipasi. Untuk itu, partisipasi merupakan ajakan kepada perempuan untuk terlibat secara aktif di dalam berbagai kegiatan. Mengapa kita harus membicarakan dan mempertanyakan partisipasi perempuan? Hal ini dapat dibaca sebagai ketertutupan nilai untuk mengakui partisipasi perempuan dalam kehidupan secara luas. Kita dapat melihat betapa pekerjaan perempuan telah menjadi begitu banyak dan kompleks, sehingga istilah partisipasi perempuan tidak lain merupakan usaha "menambah beban" di pundak perempuan. Sifat mendua di sini tampak dengan jelas. Di satu pihak, kita menginginkan perempuan membantu mengurangi beban

laki-laki. Di lain pihak, laki-laki tetap saja membatasi bidang-bidang yang boleh dimasuki perempuan. Proses marjinalisasi secara jelas merupakan usaha yang justru membatasi partisipasi perempuan.

Ketiadaan pengakuan terhadap keterlibatan perempuan dapat pula dilihat dari transformasi makna istilah "ibu rumah tangga". Status sebagai ibu rumah tangga dianggap oleh sebagian feminis sebagai suatu kekalahan perempuan. Rumah tangga sama dengan domain kehidupan di mana perempuan kehilangan kebebasan-kebebasannya. Meskipun tidak dapat dipaksakan agar pekerjaan perempuan sebagai ibu rumah tangga mendapat pengakuan formal, haruslah diakui bahwa pekerjaan sebagai ibu rumah tangga merupakan kegiatan yang membutuhkan pikiran, tenaga, dan waktu. Untuk itu perlu diakui dan mendapat imbalan yang pantas secara sosial. Makna ibu rumah tangga yang sedang berubah dan ketergantungan perempuan yang ditegaskan oleh wacana menyebabkan perempuan gelisah dan berada dalam kebingungan pada saat memilih suatu peran.

Perempuan di dalam berbagai kebudayaan ditempatkan di luar sistem obyektif sehingga perempuan harus mengalami proses obyektivikasi secara terus menerus. Sifat subyektif perempuan dinilai harus mengalami transformasi supaya dapat menjadi suatu entitas yang sesuai dengan tata nilai dominan. Wacana yang terus diproduksi justru telah mereproduksi posisi subyektif perempuan yang karenanya oposisi biner laki-laki atau perempuan, kuat atau lemah, rasional atau emosional, obyektif atau subyektif, dan seterusnya menjadi semakin kuat.

Realitas perempuan selalu dibangun oleh laki-laki karena laki-lakilah yang dianggap dan menganggap diri-

memberi arti yang mendasar bagi kemajuan perempuan. Pergeseran dari domestik ke publik, seperti juga proses feminisasi secara umum, tidak memberikan basis penting bagi tawar-menawar kekuasaan. Cara-cara semacam ini sesungguhnya ikut mereproduksi realitas tentang stratifikasi bidang kegiatan, di mana bidang publik dinilai lebih tinggi daripada bidang domestik.

Usaha mendorong perempuan untuk lebih terlibat dalam bidang publik, sama halnya dengan memaksa perempuan untuk meninggalkan bidang domestik yang kurang prestisius. Dengan kata lain, yang diperoleh setelah itu adalah angka-angka partisipasi perempuan, bukan kualitas perempuan yang semakin baik. Hal ini disebabkan karena dalam proses migrasi dari domestik ke publik, perempuan harus mengeluarkan biaya ideologis yang begitu besar. Perempuan tidak hanya harus memiliki kualitas yang sama dengan laki-laki untuk memenuhi kriteria sebuah pekerjaan, tetapi juga harus cantik dan menawan. Bukankah ini sebuah pelecehan terhadap perempuan?

Penilaian yang hati-hati tentang keuntungan dan kerugian yang diperoleh perempuan karena keterlibatannya dalam bidang publik harus dilakukan, untuk tidak (sekali lagi) terperangkap dalam struktur hubungan yang menguntungkan laki-laki. Paling tidak, tiga proses perlu disiasati, sebelum usaha membebaskan perempuan dari penjara domestik dilakukan.

Pertama, keterlibatan perempuan dalam bidang publik merupakan peran ganda yang memang berarti beban ganda. Seringkali dikatakan bahwa peran ganda dapat diatasi (agar tidak menjadi beban ganda) dengan proses domestifikasi laki-laki. Persoalan ini tidak sederhana karena yang harus ditaklukan dalam pengurangan

beban perempuan tidak hanya laki-laki, tetapi juga keluarga luas dan masyarakat secara umum yang telah menerima pembagian peran berdasarkan gender sebagai realitas obyektif. Keterlibatan laki-laki dalam bidang publik dan perempuan dalam bidang domestik merupakan realitas obyektif yang telah diterima sebagai sesuatu yang baku. Usaha mengubah itu semua merupakan usaha mendekonstruksi bangunan sosial budaya yang kemudian membutuhkan kesadaran di dalam rekonstruksi realitas obyektif yang baru.

Kedua, perbedaan domestik-publik sesungguhnya menyangkut kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kepentingan itu menyebabkan kecenderungan reproduksi ketimpangan gender (domestik vs publik atau perempuan vs laki-laki) oleh berbagai pihak dan oleh berbagai kepentingan. Reproduksi kapitalis, misalnya, merupakan contoh yang menarik di dalam penegasan peran dan status perempuan dalam bidang domestik. Proses semacam ini juga muncul oleh adanya berbagai institusi yang mengurus perempuan, yang sesungguhnya ikut mereproduksi ketimpangan hubungan laki-laki dengan perempuan. Pergeseran dari domestik ke publik dapat saja terjadi, namun harus jelas apakah gejala tersebut benar-benar dapat menjadi tanda dari kemajuan perempuan. Padahal, perubahan tersebut cenderung terjadi hanya dalam format hubungan sehingga tidak bersifat substantif.

Ketiga, dalam situasi ekonomi yang semakin kompetitif, perempuan tidak lebih merupakan instrumen kapitalisme. Keterlibatan perempuan bukan merupakan fungsi dari peningkatan kesadaran laki-laki dan perempuan sehingga tidak memiliki arti mendasar bagi peningkatan kesejahteraan perempuan. Dalam situasi semacam

ini, pemberian upah yang rendah telah menjadi alasan mempekerjakan perempuan. Meskipun perempuan mengerjakan pekerjaan yang sama dengan laki-laki, mereka tetap menerima upah yang lebih rendah. Akses perempuan terhadap berbagai peningkatan karier pun sangat dibatasi oleh kepentingan pencarian keuntungan. Oleh karena itu, perubahan keterlibatan perempuan harus dinilai secara seksama, karena statistik peningkatan keterlibatan perempuan dapat menyesatkan.

Pergeseran dari domestik ke publik sesungguhnya bukan merupakan bentuk transformasi yang harus dipaksakan, karena proses itu bukan dengan sendirinya merupakan tanda kemajuan perempuan. Justru pergeseran keterlibatan dari domestik ke publik adalah suatu penambahan beban bagi perempuan, karena keterlibatan itu tidak didukung oleh konteks kultural dan struktural yang kondusif. Meskipun perempuan kemudian mendapatkan tambahan penghasilan dari peran publik yang dimainkan, kesejahteraan mereka sangat memprihatinkan karena iklim kerja dan hak-hak mereka tidak diperhatikan. Perempuan golongan menengah atas, sejalan dengan kesempatan sektor publik yang semakin terbuka, dapat lebih berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Tapi bukankah ini berarti perempuan semakin tersubordinasikan dalam sistem kapitalisme dan dalam arus kehidupan yang membangun basis-basis konsumsi, bukan basis-basis produksi. Keterlibatan perempuan golongan menengah atas lebih berguna untuk pembangunan gaya hidup dan batas-batas kelas. Mereka pun tidak dapat mengikutsertakan perempuan golongan ba-wah dalam berbagai pekerjaan, apalagi memperjuangkan hak-hak mereka.

Bagaimanapun, pembicaraan domestik-publik harus memperhatikan bahwa dikotomi itu telah menjadi

satu struktur yang harus ada. Oleh karena itu, jauh lebih menarik untuk melihat bagaimana perempuan dan laki-laki berinteraksi dan memberi makna atas kehidupan mereka masing-masing dalam struktur yang demikian (timpang). Apa keuntungan-keuntungan yang diperoleh perempuan dalam strutur semacam itu, dan dalam hal apa tawar-menawar kekuasaan dapat terjadi. Untuk itu tidaklah begitu penting mempersoalkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan harus seimbang. Harmoni tidak hanya dapat diperoleh dalam suatu hubungan yang horizontal. Hubungan yang berstratifikasi dapat saja melahirkan harmoni ketika hak dan kewajiban masing-masing pihak dipatuhi dan diterima. Dalam struktur domestik dan publik, hubungan perempuan dan laki-laki dapat saja bersifat vertikal.

Yang perlu ditegaskan adalah bagaimana ketergantungan antara laki-laki dan perempuan dapat dibangun, sehingga laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan dalam suatu hubungan. Dengan cara ini, perspektif laki-laki yang melihat perempuan sebagai *the other* dapat dihilangkan. Sebaliknya, memaksa perempuan untuk pindah dari sektor domestik ke sektor publik justru menegaskan posisi perempuan sebagai *the other,* karena potret perempuan menjadi kabur oleh berbagai wacana yang sesungguhnya mereproduksi ketimpangan hubungan. Oleh karena itu, wacana tentang otonomi perempuan atau partisipasi perempuan dalam pembangunan telah memenjarakan perempuan dalam mimpi-mimpi laki-laki (seperti juga mimpi sebagian feminis yang kelaki-lakian). Perempuan harus dibebaskan dari beban-beban yang tidak ingin dipikul oleh perempuan sendiri. Dan jangan-jangan kita telah menambah beban di pundak perempuan, pada saat kita ingin membantu

perempuan sekalipun. Hal ini disebabkan oleh kenyataan, bahwa kita sendiri tidak tahu bagaimana potret perempuan itu sesungguhnya, karena kita tidak pernah mau mendengarkan suara-suara mereka. Dan kita pun tidak tahu, makna kemerdekaan macam apa yang diinginkan perempuan?

Wacana Perempuan dalam Pembangunan

Pembangunan melahirkan kemajuan bagi kaum perempuan yang ditandai oleh keterlibatan mereka yang semakin besar dalam berbagai aspek kehidupan. Semakin banyak perempuan yang terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan penting. Kaum perempuan tidak lagi hanya sebagai ibu, tetapi juga sebagai perempuan karier atau kelompok yang lebih terlibat di luar rumah. Kiprah mereka dalam lembaga-lembaga sosial dan forum-forum pembicaraan publik dalam pembentukan opini massa, menunjukan bahwa mereka semakin dihargai dan mendapat tempat secara sosial. Namun demikian, pembangunan telah pula melahirkan diferensiasi dalam kehidupan perempuan. Kesempatan yang terbuka untuk perempuan tampak tidak merata. Perbedaan *human capital* dan akses telah membentuk berbagai macam kelompok perempuan, dari kelompok yang tetap di rumah karena tidak mau atau tidak bisa terlibat dalam pekerjaan publik, perempuan yang terkurung di pabrik-pabrik atau mereka yang bekerja sebagai pembantu sampai keluar negeri, hingga kelompok perempuan profesional yang sukses dalam berbagai bidang. Pembangunan karenanya telah pula melahirkan ketimpangan di antara kaum perempuan sendiri. Sebagian perempuan memiliki

kesempatan dan terlibat dalam kegiatan publik yang berupah dan berstatus tinggi; sebaliknya banyak perempuan yang semakin terpuruk dalam segmen-segmen yang memberikan upah/penghargaan yang rendah dan keadaan kesehatan yang buruk.

Persoalan perempuan kemudian tidak hanya bersumber pada ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga ketimpangan antar perempuan sendiri; perempuan disubordinasikan oleh perempuan yang lain, yakni oleh perempuan yang semakin maju dan semakin berkuasa dalam berbagai hal. Reproduksi kekuasaan pun kemudian terjadi di antara kaum perempuan, yang membentuk penjajahan perempuan atas perempuan.

Perempuan golongan atas akan menjadi patron bagi perempuan di bawahnya. Di sini kaum perempuan golongan atas membangun dominasi-dominasi bukan terhadap laki-laki, tetapi terhadap perempuan yang terkait dalam struktur hubungan yang timpang. Majikan perempuan cenderung memberi upah yang rendah terhadap buruh perempuan, dibandingkan majikan laki-laki. Perempuan juga menghancurkan perempuan yang lain, seperti dalam kasus-kasus perceraian yang disebabkan oleh adanya perempuan lain. Tidak sedikit kasus perempuan yang menjual perempuan lain dalam perdagangan perempuan dan prostitusi. Persekongkolan perempuan dengan laki-laki dapat menghancurkan kehidupan perempuan yang lain, seperti kasus pembunuhan.

Di sini tampak bahwa persoalan yang dihadapi kaum perempuan bukan ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan saja, tetapi juga antar perempuan sendiri. Lebih jauh usaha memahami perempuan tidak hanya memahami hubungan perempuan dengan

laki-laki dalam struktur sosial yang bias gender, tetapi juga hubungan-hubungan gender berdasarkan golongan (ekonomi) yang berbeda, berdasarkan perbedaan etnis, dan perbedaan agama. Pertanyaan yang penting diajukan adalah menyangkut bagaimana konteks tersebut memberikan pengaruh di dalam pembentukan struktur sosial (ekonomi dan politik) yang bias gender atau bagaimana ideologi gender menjadi aura di dalam struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Pergeseran konteks ini sangat mempengaruhi perubahan peran perempuan sebagai ibu.

Istilah ibu rumah tangga telah tersubordinasi dalam wacana perempuan, terutama setelah istilah perempuan karier atau perempuan pekerja menjadi sangat dominan. Hal ini tentu saja mengakar dalam struktur hubungan publik dan domestik di mana bidang publik menempati posisi yang dianggap lebih terhormat dari berbagai tolok ukur. Dalam wacana publik, ibu rumah tangga ditempatkan pada strata yang paling rendah. Wacana publik ini dipengaruhi oleh ideologi modernitas, yang turut mengubah konsep perempuan, ibu, anak, dan hubungan-hubungan sosial. Cara bagaimana perempuan ditempatkan dalam wacana merupakan faktor penekan penting di dalam mempengaruhi pilihan-pilihan yang dibuat oleh perempuan. Kemerdekaan memilih dalam hal ini perlu dipertanyakan, karena pilihan cenderung dibuat oleh perempuan di bawah tekanan-tekanan tertentu, khususnya di dalam sistem ideologis dan normatif yang represif.

Jika dilihat kembali konsep ibu dalam hubungannya dengan anak, maka ibu rumah tangga justru merupakan status yang ideal di dalam penciptaan makna kehidupan secara meluas dan berkelanjutan karena

seorang ibulah yang dapat menyiapkan generasi yang berkualitas. Jika kita membicarakan masalah jatidiri, identitas, moral, atau nasionalisme, sesungguhnya semua itu menyangkut bagaimana rumah tangga berfungsi sebagai pabrik di dalam menyiapkan suatu generasi yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan perubahan zaman. Anak-anak, khususnya anak usia prasekolah, sangat membutuhkan ibu dalam pembentukan kepribadian dan jatidiri.

Wacana perempuan, yang berakar pada ideologi pembangunan yang menekankan partisipasi perempuan, telah mendekonstruksi peran ibu. Wacana perempuan karier, misalnya, telah mengesahkan ketidakhadiran perempuan di dalam rumah untuk mendidik dan membesarkan anak dalam arti yang sesungguhnya. Anak menjadi tanggung jawab pembantu, bacaan, dan televisi. Institusi yang menggantikan peran ibu dalam mendidik anak belum dikembangkan ke arah yang jelas. Sumber pengetahuan tentang nilai-nilai moral dan praktik kehidupan diperoleh dari berbagai agen lain, seperti televisi, mainan (elektronik), dan bacaan-bacaan. Padahal, tidak jelas siapa yang mengendalikan pesan yang disampaikan media tersebut, sehingga kita tidak dapat menjamin bahwa anak kita dididik dengan cara yang benar.

Bagaimanapun orientasi kehidupan dewasa ini telah menjauhkan perempuan dari rumah, dari suami, dan dari anak-anak. Perempuan yang bekerja ke Arab Saudi, Hongkong, Korea, Singapura, atau Negeri Semenanjung, tentu saja meninggalkan suami, anak, saudara-saudara, dan desa secara keseluruhan. Tekanan untuk pergi yang begitu besar (baik karena tekanan ekonomi maupun daya tarik sosial, politik atau budaya) merupakan suatu fakta yang sangat jelas bahwa pergeseran

orientasi kehidupan di kalangan perempuan sedang terjadi, yang ini secara langsung mengubah definisi perempuan sebagai ibu. Anak yang secara tradisional merupakan pengikat perempuan untuk tetap tinggal di rumah, dewasa ini menjadi faktor yang hampir tidak berpengaruh secara umum. Berbagai faktor dan mekanisme telah terbentuk untuk mensahkan perilaku mobilitas perempuan atau keterlibatan perempuan di luar rumah. Hal ini berkaitan dengan penghargaan sosial yang semakin tinggi bagi perempuan yang terlibat dalam bidang publik, kemungkinan-kemungkinan yang terbuka bagi keterlibatan perempuan yang semakin luas, dan tekanan-tekanan ekonomi dan politik internal di dalam rumah tangga itu sendiri, serta tekanan-tekanan sosial akibat perubahan tata nilai dalam masyarakat.

Tantangan Masa Depan

Dalam situasi para ibu mulai *go public* dan *go international,* berbagai dampak terhadap anak sebagai generasi penerus, harus dianalisis dengan seksama. Persoalan yang kita hadapi dewasa ini adalah masalah minuman keras, obat terlarang yang digunakan oleh kaum remaja, perkelahian yang sering terjadi antar remaja, hubungan remaja putra dengan remaja putri yang semakin bebas, dan seksualitas di kalangan remaja. Apalagi jika benar sinyalemen yang mengatakan bahwa enam puluh persen penderita AIDS di masa mendatang adalah remaja, maka kita akan menghadapi situasi yang sangat sulit.

Pada saat ibu (karena keterlibatan mereka di luar rumah) tidak memiliki cukup waktu untuk memperhati-

kan anak, sangat mungkin anak mencari orang lain atau jalan lain untuk berbicara dan berdialog memecahkan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari. Hal ini tentu saja mempengaruhi hubungan orang tua dan anak, sementara keterlibatan laki-laki (suami) umumnya sangat sulit diharapkan untuk mengurangi beban ibu sebagai pengasuh anak. Dalam struktur masyarakat kita, di mana pembagian kerja secara seksual begitu tegas, partisipasi perempuan di bidang publik selalu berarti beban ganda yang harus dipikul perempuan.

Di satu pihak, kecenderungan perempuan semakin terlibat dalam kegiatan publik tidak bisa dihindari karena berbagai tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang sangat kuat. Di lain pihak, kecenderungan itu mempengaruhi kehidupan anak secara langsung, yang akan menentukan proses pembentukan kepribadian dan moral anak sebagai generasi penerus. Bisa dibayangkan masyarakat seperti apa yang bakal dihasilkan pada abad ke-21, terutama karena antisipasi terhadap dampak dari kecenderungan keterlibatan perempuan belum terlihat dengan jelas. Berbagai diskusi yang dilakukan pun belum menyentuh persoalan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi dampak keterlibatan perempuan di luar rumah terhadap kehidupan anak. Apa yang akan terjadi dengan proses sosialisasi, enkulturasi, hubungan antargenerasi dan hubungan-hubungan kekuasaan antara anak dan orang tua harus mulai diperdebatkan.

Keterlibatan berbagai agen terutama televisi, mainan, dan bacaan, akan melahirkan manusia dengan sistem nilai yang berbeda dan melahirkan suatu bentuk peradaban yang lain di masa depan. Pada saat anak hidup dalam nilai-nilai dan norma-norma yang begitu beragam, sejalan dengan bervariasinya sumber infor-

masi, dan ibu sebagai pengendali pembentukan nilai tidak berperan dengan baik, maka suatu tipe masyarakat yang berbeda akan lahir. Pergeseran ini dapat dilihat pada beberapa kecenderungan.

Pertama, munculnya keterasingan yang meluas sebagai akibat dari perubahan hubungan antar generasi. Hubungan anak–orang tua yang berubah merupakan dasar dari perubahan bentuk hubungan sosial secara meluas di mana asas kepentingan menjadi dominan dalam berbagai bentuk pertukaran sosial. Solidaritas mekanis akan bergeser ke solidaritas organis yang melemahkan hubungan-hubungan emosional.

Kedua, diferensiasi yang terjadi secara meluas, terutama karena sistem nilai yang beragam, membentuk minat dan praktek kehidupan yang berbeda-beda yang disyahkan oleh sistem nilai yang berbeda. Masyarakat semacam ini akan melahirkan konflik-konflik sosial yang semakin rumit, terutama akibat perbedaan cara pandang antar kelompok orang. Oleh karenanya, nilai kebenaran menjadi sangat relatif.

Ketiga, Kebudayaan sebagai sistem referensi di dalam mengatur tata kelakuan tidak berfungsi dengan baik, karena kebudayaan tidak merespon pergeseran-pergeseran yang terjadi sehingga nilai-nilai budaya tersubordinasi dalam wacana yang dibangun oleh bacaan, mainan, dan televisi yang berorientasi pada nilai yang berbeda.

Dalam usaha mengatasi kecenderungan pembentukan masyarakat dengan tata nilai dan praktik yang berbeda, perlu langkah-langkah yang tepat, terutama untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya mengglobal tetapi juga meng-Indonesia. Menurut hemat kami, fungsi keluarga sebagai pembentuk nilai moral

dan kepribadian perlu dikembalikan dan diintensifkan. Meskipun keterlibatan ibu di luar rumah tidak dapat dibendung, kesadaran tentang perlunya menata "rumah yang damai" bagi anak sangat dibutuhkan. Untuk itu serangkaian pengaturan rumah dan pola hubungan anak-orang tua perlu dirumuskan. Iklim dialog di dalam rumah harus dikembangkan dengan baik sehingga anak yakin bahwa orang tua memiliki perhatian, pengertian, dan selalu bisa diajak bicara. Dan orang tua itu adalah laki-laki dan perempuan. Persoalan kita di sini kemudian, bukan partisipasi perempuan dalam kegiatan publik, tapi "partisipasi laki-laki dalam kegiatan domestik", agar peran perempuan tidak lagi berarti sebuah beban ●

Daftar Pustaka

Buku dan Laporan Penelitian

Abar, Ahmad Zainai dan Tulus Subardjono. 1998. *Perkosaan Dalam Wacana Pers Nasional.* Yogyakarta: PPK-UGM

Abdullah, Irwan. 1988. *Pedagang Kecil di Jatinom.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

———. 1989a. *Kesempatan Kerja dan Perdagangan di Pedesaan: Suatu Kerangka Penelitian.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

———. 1989b. "Perilaku Ekonomi Pedagang Batik: Kasus Malioboro, Yogyakarta", *Masyarakat Indonesia,* 16(2): 213-229.

———. 1990. "The Making of Business Elite in a Javanese town", makalah disampaikan pada Eidos Winter Scholl "Trade, State and Etnicity", Bielefeld, 16-20 Januari. Bielefeld Sociology of Decelopment Research Centre, University of Bielefled.

———. 1991. *Wanita Bakul di Pedesaan Lama.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Abdullah, Irwan. et al. 1997. *Sangkan Paran Gender.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Alexander, Jennifer. 1987. *Trade, Traders and Trading in Rural Java.* Singapore: Oxford University Press.

Alexander, Jennifer dan Paul, Alexander. 1987. "Striking a Bargain in Javanese Markets". *Man,* (22): 42-68.

Amaluddin, Moh. 1987. *Kemiskinan dan Polarisasi Sosial.* Jakarta: UI Press.

Anchalee, Singhanetra-Renard. 1985. *Overseas Contract Labor: New Migration Paths for Thai and Indonesian Workers.* Singapore: Southeast Asian Studies Program.

———. 1991. *Langit Suci: Agama sebagai Realitas Sosial.* Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

Appadurai, Arjun. 1986. *The Social Life of Thinfs: Commodities in Cultural Perspective.* Cambridge: Cambridge University Press.

Beechey, V. dan T. Perkins. 1987. *A Matter of Hours: Woman, Part-time Work and the Labour Market.* Cambridge: Polity Press.

Berger, Peter dan Thomas Luckmann. 1979. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sosciology of Knowledge.* New york: Penguin Books.

Berninghausen, Jutta and Birgit Kerstan. 1992. *Forging New Paths Social Methodology and Rural Woman in Java.* London: Zed Books.

Biro Pusat Statistik. 1975. *Sensus Penduduk 1971.* Jakarta: Biro Pusat Statistik.

Biro Pusat Statistik. 1992. *Penduduk Indonesia 1980.* Jakarta:Biro Pusat Statistik.

Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste.* London: Routledge & Kegan Paul.

Braverman, Harry. 1983. *Labor and Monopoly Capital.* New York: Monthly Review Press.

Burger, D.H. 1983. *Perubahan-perubahan Struktur dalam Masyarakat Jawa.* Jakarta: Bhratara Karya Aksara.

Chafetz, Janet Saltzman. 1991. "The Gender Division of Labour and the Reproduction of Disadvantage: Toward an Integrated Theory," dalam Rae Lesser Blumberg (ed.), *Gender, Family, and Economy.* London: Sage Publications. hlm. 75.

Cockburn, Cynthia. 1983. *Brothers.* London: Pluto Press.

Collins, Randall. 1991. "Women and Men in the Class Structure", dalam RL Blumberg (ed.), *Gender, Family, and Ecomony: The Triple Overlap.* London: Sage Publication.

Courtney, A. & T. Whipple. 1983. *Sex Stereotyping in Advertising.* Lexington: Lexington Books.

"Dalam Senggama Laki-laki Seperdelapan Wanita". 1990. *Yogya Post,* 7 Oktober.

de Vries, E., 1985. *Pertanian dan Kemiskinan di Jawa.* Jakarta: Yayasan Obor.

Deere, Carmen D. dan Magdalena L. De Leal. 1982. *Women in Andean Agriculture.* Geneva: International Labour Office.

Dewey, Alice G. 1962. *Peasant Marketing in Java.* New York: The Free Press of Glencoe, Inc.

Effendi, Tadjuddin N. 1988. *Rural Non-farm Employment in Rural Java.* Research Proposal, Flinders University, Adelaide.

Effendi, Tadjuddin N.et al. 1990. *Kegiatan Non-Farm di Pedesaan: Studi Kasus di Jatinom.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Emiyanti, Sri, et. al. 1998. *Aborsi: Sikap dan Tindakan Paramedis.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.

Enggawati Tedjakusuma. 1990. "Sekali Lagi Wanita Karier", *Jawa Pos,* 12 Desember

Ewen, Stuart. 1976. *Captains of Consciousness: Advertising and the Social Roots of The Consumer Culture.* New York: McGraw-Hill Book Company.

———. 1990. "Marketing Dreams: The Political Elements of Style". In Alan Tomlinson, *Consumption, Identity, and Style: Marketing, Meanings, and the Packing of Pleasure.* London: Routledge.

Fakih, Mansour. 1995. *Menggeser Konsepsi Gender.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Faruk, HT. 1996. "Wanita di Goa Hantu", dalam Irwan Abdullah, ed. *Sangkan Paran Gender.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Featherstone, Mike et al, (ed.). 1991. *The Body: Social Process and Cultural Theory.* London: Sage Publications.

Featherstone, Mike. 1990. *Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity.* London: Sage.

———. 1991. *Consumer Culture and Postmodernism.* London: SAGE Publications.

———. 1992. "Cultural Production, Consumption, and the Development of the Cultural Sphere". In Richard Mnch & Neil J. Smeler (eds.), *Theory of Culture.* Berkeley: University of California Press.

Fine, Beb and Ellen Leopold. 1993. *The World of Consumption.* London: Routledge.

Firestone, Shulamith. 1972. *The Dialectic of Sex.* New York: Bantam.

Foucault, M. 1990. *The History of Sexuality.* London: Penguin Books.

Frisby, David. 1991. "The Aesthetics of Modern Life: Simmel's Interpretation". *Theory, Culture & Society* 8 (3): 73-93.

Gannage, Charlene. 1986. *Double Day, Double Blind, Women Garment Workers.* Toronto: Women's Press.

Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Cultures.* New York: Basic Books.

———. 1963b. *Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns.*

Chicago: The University of Chicago Press.

———. 1967. 'Social Change and Economic Modernization in Two Indonesia Towns: a Case in Point", dalam G. Dalton, *Tribal and Peasant Economies.* New York: The Natural History Press. hlm. 366-394.

———. 1982. "Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota di Indonesia", dalam Taufik Abdullah (ed.), Agama, Etos Kerja dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta, LP3ES, hlm. 154-186.

———. 1983. *Local Knowledge.* New York: Basic Books.

Giddens, Anthony. 1984. *The Constitutions of Society.* Cambridge: Polity Press.

Grijns, Mies, et al. (ed.). 1992. *Gender, Marginalisation and Rural Industries.* Bandung: Akatiga Foundation.

Hansen, G. E., ed. 1981. *Agriculture and Rural Development in Indonesia.* Colorado: Westview Press.

Hart, Gill, et. al. 1989. *Agrarian Transformations: Local Proces-ses and the State in Southeast Asia.* Berkeley: University of California Press.

Hayami, Y. dan M. Kikuchi. 1981. *Asian Village Economy at the Crossroads.* Tokyo: University of Tokyo Press.

Heise, L. 1993. "Violence Against Women: The Missing Agenda", dalam Marge Koblinsky et al. (ed.), *The Health of Women: A Global Perspective.* Boulder, Colorado: Westview Press, hlm. 171-95.

Heyzer, Noeleen. 1986. *Working Women in South-East Asia: Development, Subordination and Emancipation.* Milton Keynes: Open University Press.

Hoffman, Carl I. 1985. 'Punan 'liar' di Kalimantan: Alasan Ekonomis", dalam M.R. Dove, ed., *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi.* Jakarta: Yayasan Obor. hlm. 162-179.

Hugo, G.J., et al. 1987. *The Demografhic Dimension in Indonesian Development.* New York: Oxford University Press.

Humphrey, John. 1987. *Gender and Work in the Third World.* London & New York: Tavistock Publications.

Husken, Frans. 1989 "Ekonomi Politik Pembangunan Pedesaan dan Struktur Agraria di Jawa", *Prisma* 18(4): 15-37.

Husken, Frans. 1989. "Cycles of Commercialization and Accumulation in a Central Javanese Village", dalam Gill Hart, ed., *Agrarian Transformations: Local Processes and the State in Southeast Asia.* Berkeley: University of California Press.

Illich, Ivan. 1982. *Gender.* New York: Pantheon Books.

Jameson, Frederic. 1993. "Postmodernism and Consumer Society", dalam Hal Foster, ed, *Postmodern Culture.* London: Pluto Press, hlm. 111-125.

Jones, Gavin, et al. 1995. *Prostitution in Indonesia.* Canberra: The Australian National University.

Kanter, Rosabeth Moss. 1977. *Men and Women of the Corporation.* New York: Basic Books.

Kelly, Rita Mae. 1991. *The Gendered Economy: Work, Careers, and Success.* London: Sage Publication.

Koentjaraningrat, 1984. "Celepar: Sebuah desa di Jawa Tengah Bagian Selatan", Dalam Koentjaraningrat (ed.), *Masyarakat Desa di Indonesia.* Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, hlm. 279-311.

Kutanegara, P. M., et al, 1989, *Pedagang dan Perdagangan di Jatinom.* Yogyakarta. Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

La Rose. 1995. *Dunia Wanita.* Jakarta: Garuda Metropolitan Press.

Lee, Martyn J. 1993. "Exploring the Economy of Symbolic Goods", dalam Martyn J. Lee, *Consumer Culture Reborn.* London: Routledge, hlm. 25-39.

Lestari, Sri Budi et.al. 1994. *Pekerja Wanita dan Industri Kerajinan Ukir di Jawa Tengah.* Yogyakarta: PPK-UGM

Levi-Strauss, Claude. 1976. *Structural Anthropology Middlesex.* London: Penguins Book.

Lorber, J. and S. Farrell. 1991. *The Social Construction of Gender*. London: Sage.

Lupton, Deborah. 1994. *Medicine as Culture: Illness, Disease and the Body in Western Societies*. London: Sage Publications.

MacCormack, Carol P. 1980. "Nature, Culture and Gender: a Critique", dalam C.P. MacCormack dan Marilyin Stratern, *Nature, Culture and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press.

Manning, Chris. 1987. "Penyerapan Tenaga Kerja di Pedesaan Jawa: Pelajaran dari Revolusi Hijau dan Bonanza Minyak, dan Prospeknya di Masa Depan", makalah disampaikan pada Seminar Strategi Pembangunan Pedesaan, Yogyakarta, 1-3 Oktober 1987. Yogyakarta: Universitas Wangsa Menggala kerja sama dengan Pusat Penelitian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan UGM.

Mies, Maria (ed.). 1988. *Women: The Last Colony*. London & New Jersey: Zed Books Ltd.

Molo, Marcelinus. 1993. "Sex dan Gender: Apa dan Mengapa," *Populasi*, 4(2).

Moore, Henrietta L. 1994. *A Passion for Difference*. Cambridge: Polity Press.

Muhibat, A.S. dan Bintarsih, Sekarningrum. 1994. *Wanita, Kerajinan Anyaman Pandan dan Rumah Tangga*. Yogyakarta: PPK-UGM

Nasikun. 1990. "Peningkatan Wanita dalam Pembangunan: Teori dan Implikasi Kebijaksanaan," *Populasi*, 1(1).

Olesen, Virginia. 1994. "Feminism and Models of Qualitative research", dalam N.K. Denzin & Y.S. Lincoln (ed.), *Handbook of Qualitative Research*, London: Sage Publication.

Oppenheimer, Valerie Kincade. 1997. "The Sociology of Women's Economic Role in the Family," *American Sociological Review*, 42(3).

Partini, Dewi H. Susilastuti, dan Bambang Handoyo. 1990. *Buruh Jahit di Pedesaan Jawa: Studi Tentang Kondisi Sosial Ekonomi dan Strategi Kelangsungan Hidup.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Peluso Nancy Lee. 1984. *Occupational Mobility and the Economic Role of Rural Women.* Yogyakarta: Population Studies Center, Gadjah Mada University.

Priyadi, Budi Puspo, dan Marcelinus Molo, 1989. *Dinamika Perdagangan di Jatinom: Suatu Gambaran Ringkas.* Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

Raffles, T.S. 1978. *The History of Java.* Kuala Lumpur: Oxford University Press.

Redfield, Robert. 1982. *Masyarakat Petani dan Kebudayaan.* Jakarta: Rajawali Press.

Rietveld, Piet. 1986. "Non-Agricultural Activities and Income Distribution in Rural Java", Bulletin of *Indonesian Economic Studies,* 22(3): 106-117.

Robinson, Geroid T. 1988 "Crafts and Trades Among the Russian Peasantry", dalam T. Shanin, ed., *Peasants and Peasant Societies.* London, Penguin Books. hlm. 164-164.

Rojek, C. and B.S. Turner (ed.).1993. *Forget Baudrillard?.* London: Routledge.

Roll, Werner. 1983. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia.* Jakarta: CV Rajawali.

Rosaldo, E.Z. 1983. *Woman, Culture and Society.* California: Stanford University Press.

Rose, La. 1985. *Dunia Wanita.* Jakarta: Garuda Metropolitan Press.

Sadli, Saparinah. 1993. "Sejarah Perkembangan Studi Wanita", makalah yang disajikan pada Seminar Forum Komunikasi Bidang Peranan Wanita, Cisarua, Bogor, 25-28 Oktober.

Saleh, Azhary I. 1987. *Industri Kecil: Sebuah Tinjauan dan Perbandingan*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

Sassen-Koob, S. 1984. "Notes on the Incorporation of Third World Women into Wage-labour through Immigration and Off-shore Production", *International Migrtion Review*, 18 (4).

Schiller, Barbara M. 1978. *Women, Work and Status in Rural Java*. Tesis Ph. D., Ohio University, Ohio.

Scott, Mc Ewen. n.a. "Women and Industrialisation: Examining the Female Marginalisation Thesis", *The Journal of Development Studies*, 22 (4).

Shilling, Chris. 1993. *The Body and Social Theory*. London: Sage Publications.

Sigit, Hananto. 1989. "Transformasi Tenaga Kerja di Indonesia selama Pelita", *Prisma* 17 (5): 3-14.

Simmel, Georg. 1991. *The Philosophy of Money*. London: Sage.

Singarimbun, Masri. 1991. "Norma-norma dan Perilaku Seks Remaja", *Populasi*, 2 (1): 11-23.

————. 1992. *Renungan dari Yogya*. Jakarta: Balai Pustaka.

Soeroto, Sari & Hatmosuprobo, Soetardjo. 1979. *Laporan Penelitian Pendahuluan tentang Industri Rakyat di Daerah Klaten (Suatu Tinjauan Historis-Antropologis)*. Jakarta: LP3ES

Soetjipto, Helly P. dan Faturochman. 1989. *Knowlwdge, Attitude, and Practice of Reproductive Health Among Javanese and Balinese Adolescence*. Yogyakarta: Population Studies Centre, Gajah Mada University.

Solomon, Jack. 1988. *The Sign of Our Time: the Hiddens Messages of Environments, Objects, and Cultural Images*. Los Angeles: Jeremy P. Tarcher, Inc,.

Stoler, Ann. 1975. *Land, Labor, and Female Autonomy in a Javanese Village*. New York: Departement of Anthropology, Columbia University.

Suratiah, Ken dan Suhatmin Hardyastuti. 1990. "Profil Pekerja Wanita: Kasus Proyek Bangunan Kampus UGM," *Populasi*, 1(1).

Suryadi, Linus A.G. 1987. *Pengakuan Pariyem*, Jakarta: Sinar Harapan.

Suryakusuma, Yulia I. 1991. "Konstruksi Sosial Seksualitas: Pengantar Teoritis", *Prisma*, 20 (7): 3-14.

Susilastuti, Dewi dan Bambang Hudayana. 1994. Buruh Jahit di Pedesaan: Suatu Studi Kondisi Sosial Ekonomi dan Strategi Kelangsungan Hidup. Yogyakarta: PPK-UGM.

Szanton, Maria C. B. 1972. *A Right to Survive; Subsistence Marketing in aLowland Philippine Town*. Tesis Ph.D., The Pennsylvania State University, Pennsylvania.

Tedjakusuma, Enggawati. 1990. "Sekali Lagi Wanita Karier," *Jawa Pos*, 12 Desember.

Tomlinson; Alan. 1990. "Introduction: Consumer Culture and the Aura of the Commodity". *In Consumption, Identity, and Style: Marketing, Meanings, and the Packing of Pleasure*, edited by Alan Tomlinson. London: Routledge.

Turner, Bryan. 1984. *The Body and Society*. Oxford: Basil Blackwell.

————. 1991. "The Discourse of Diet", in Mike Featherstone, M. Hepworth, B.S. Turner (ed.), *The Body: Social Process and Cultural Theory*. London: Sage Publications, P. 157-69.

Velzen, Anita van. 1994. *Who's the Boss?: Marginalisation and Power in Food-Processing Household Enterprises, West Java, Indonesia*. Disertasi doktor, University of Amsterdam.

Vucht, Lieteke van. 1991. "Women and Objective Culture: George Simmel and Marianne Weber", *Theory, Culture and Society*, 8(3).

West, Candace dan Don H. Zimmerman. 1991. "Doing Gender," dalam Judith Lorber dan Susan A. Farrell, *The Social Construction of Gender*. Newbury Park:

Sage Publications.

Wigna Winati. 1993. "Perkembangan Penelitian Kajian Wanita Masa Kini", makalah yang disajikan pada Seminar Forum Komunikasi Bidang Peranan Wanita, Cisarua, Bogor, 25-28 Oktober.

Wisnu Broto, Pinky dan Bambang Budiono. 1994. *Wanita, Kerajinan Bambu, dan Masyarakat.* Yogyakarta: PPK-UGM

Wouters, Cas. 1992. "On Status Competition and Emotion Management: the Study of Emotions as a New Field", dalam Mike Featherstone, ed. *Cultural Theory and Cultural Change.* London: Sage.

Wuthnow, Robert. 1987. *Meaning and Moral Order: Explorations in Cultural Analysis.* Berkeley: University of California Press.

Majalah dan Surat Kabar

Angkatan Bersenjata, 18 Mei 1995, "Wanita Indonesia Sering Dipojokkan dalam Sinetron dan Film"

Annisa: Tabloid Opini dan Refleksi Kaum Perempuan. Vol. 1, No. 1, 1993;

Bintang, No. 281 Juli 1996

Bintang, No. 282 Juli 1996

Gatra, 4 Maret 1995, „Akhir Kisah Penjual Istri"

Gatra, 4 Mei 1995

Gatra, 4 Maret 1995, "Mencabuli Adik Ipar"

Jawa Pos, 16 Mei 1994, "Trennya tak Harus Cantik Tapi Seksi"

Suara Karya, 19 Mei 1995, "Ketidakberdayaan Wanita dalam Hak Reproduksi"

Yogya Post, 7 Oktober 1990

Sumber Tulisan

Bab 1. Makalah yang disampaikan dalam seminar dengan tema Tantangan Perempuan dalam Era Global yang diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun Ke-25 Pusat Penelitian Kependudukan UGM, di Hotel Century Yogyakarta, 20 April 1998.

Bab 2. Makalah yang disampaikan dalam diskusi panel tentang "Wanita Muslim: Dulu, Kini, dan Esok" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kewanitaan, Keluarga, dan Pembangunan, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 20 Mei 1995.

Bab 3. Dimuat dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan,* PKBI Yogyakarta, 1997.

Bab 4. Pernah diterbitkan dalam buku Agus Dwiyanto et al. (ed.), *Penduduk dan Pembangunan,* PT. Aditya Media, Yogyakarta, 1996.

Bab 5. Artikel yang dimuat dalam Jurnal *Populasi,* Volume 6, No. 2, 1995.

Bab 6. Makalah dalam Training of Trainers "Pelatihan Kesadaran Gender dan Penguatan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam", yang diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 19-24 Juli 1999.

Bab 7. Pernah diterbitkan dalam *Prisma, No* 6, 1995.

Bab 8. Pernah diterbitkan sebagai laporan penelitian oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, tahun 1991.

Bab 9. Pernah dimuat dalam Jurnal *Populasi* , Volume 1, No. 1, 1990.

Bab 10. Artikel dalam buku Ken Suratiyah et al. (ed.), *Dilema Wanita,* Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Bab 11. Artikel yang disusun ulang berdasarkan beberapa bahan yang pernah diterbitkan dalam *Bernas* dan *Kedaulatan Rakyat.*

Tentang Penulis

Irwan Abdullah, lahir di Aceh Utara, 37 tahun silam, adalah dosen Antropologi Fakultas Sastra, dan koordinator penelitian pada Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM yang memiliki perhatian besar pada kajian dan penelitian gender. Setelah menyelesaikan program Ph.D-nya di bidang Antropologi dari *University of Amsterdam*, Negeri Belanda pada tahun 1994, sentuhannya terhadap masalah gender dalam berbagai perspektif semakin mendalam, dan menyebabkannya dikenal sebagai pakar di bidang studi gender.

Di samping beberapa penelitian lapangan yang telah melambungkan namanya di belantara intelektual Indonesia, ia juga menulis beberapa karya yang telah diterbit-kan, di antaranya, *Reproduksi Ketimpangan Gender* (1995), *Dilema Wanita* (1996), *Sangkan Paran Gender* (1997), *Antropologi di Persimpangan Jalan* (1998), *Dari Bounded System ke Borderless Society* (1999), dan *Teori dan Praktik Komunalisme di Jawa* (2000).

Jabatan penting lainnya yang masih dipegang hingga kini adalah; Anggota Dewan Pakar Dikti Departemen Pendidikan Nasional, Anggota Komite Nasional MOST-UNESCO, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Cabang Yogyakarta-Jawa Tengah, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Sosial Kesehatan Indonesia (AISKI), Sekretaris Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPPIS) Yogyakarta, dan Pengurus Forum Diskusi Bulaksumur ●

Sage Publications.

Wigna Winati. 1993. "Perkembangan Penelitian Kajian Wanita Masa Kini", makalah yang disajikan pada Seminar Forum Komunikasi Bidang Peranan Wanita, Cisarua, Bogor, 25-28 Oktober.

Wisnu Broto, Pinky dan Bambang Budiono. 1994. *Wanita, Kerajinan Bambu, dan Masyarakat*. Yogyakarta: PPK-UGM

Wouters, Cas. 1992. "On Status Competition and Emotion Management: the Study of Emotions as a New Field", dalam Mike Featherstone, ed. *Cultural Theory and Cultural Change*. London: Sage.

Wuthnow, Robert. 1987. *Meaning and Moral Order: Explorations in Cultural Analysis*. Berkeley: University of California Press.

Majalah dan Surat Kabar

Angkatan Bersenjata, 18 Mei 1995, "Wanita Indonesia Sering Dipojokkan dalam Sinetron dan Film"

Annisa: Tabloid Opini dan Refleksi Kaum Perempuan. Vol. 1, No. 1, 1993;

Bintang, No. 281 Juli 1996

Bintang, No. 282 Juli 1996

Gatra, 4 Maret 1995, „Akhir Kisah Penjual Istri"

Gatra, 4 Mei 1995

Gatra, 4 Maret 1995, "Mencabuli Adik Ipar"

Jawa Pos, 16 Mei 1994, "Trennya tak Harus Cantik Tapi Seksi"

Suara Karya, 19 Mei 1995, "Ketidakberdayaan Wanita dalam Hak Reproduksi"

Yogya Post, 7 Oktober 1990

Sumber Tulisan

Bab 1. Makalah yang disampaikan dalam seminar dengan tema Tantangan Perempuan dalam Era Global yang diselenggarakan dalam rangka Ulang Tahun Ke-25 Pusat Penelitian Kependudukan UGM, di Hotel Century Yogyakarta, 20 April 1998.

Bab 2. Makalah yang disampaikan dalam diskusi panel tentang "Wanita Muslim: Dulu, Kini, dan Esok" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Kewanitaan, Keluarga, dan Pembangunan, Lembaga Penelitian Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 20 Mei 1995.

Bab 3. Dimuat dalam Eko Prasetyo & Suparman Marzuki (ed.), *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan,* PKBI Yogyakarta, 1997.

Bab 4. Pernah diterbitkan dalam buku Agus Dwiyanto et al. (ed.), *Penduduk dan Pembangunan,* PT. Aditya Media, Yogyakarta, 1996.

Bab 5. Artikel yang dimuat dalam Jurnal *Populasi,* Volume 6, No. 2, 1995.

Bab 6. Makalah dalam Training of Trainers "Pelatihan Kesadaran Gender dan Penguatan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam", yang diselenggarakan oleh PSW IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 19-24 Juli 1999.

Bab 7. Pernah diterbitkan dalam *Prisma, No* 6, 1995.

Bab 8. Pernah diterbitkan sebagai laporan penelitian oleh Pusat Penelitian Kependudukan UGM, tahun 1991.

Bab 9. Pernah dimuat dalam Jurnal *Populasi*, Volume 1, No. 1, 1990.

Bab 10. Artikel dalam buku Ken Suratiyah et al. (ed.), *Dilema Wanita,* Yogyakarta: Aditya Media, 1995.

Bab 11. Artikel yang disusun ulang berdasarkan beberapa bahan yang pernah diterbitkan dalam *Bernas* dan *Kedaulatan Rakyat.*

Tentang Penulis

Irwan Abdullah, lahir di Aceh Utara, 37 tahun silam, adalah dosen Antropologi Fakultas Sastra, dan koordinator penelitian pada Pusat Penelitian Kependudukan (PPK) UGM yang memiliki perhatian besar pada kajian dan penelitian gender. Setelah menyelesaikan program Ph.D-nya di bidang Antropologi dari *University of Amsterdam,* Negeri Belanda pada tahun 1994, sentuhannya terhadap masalah gender dalam berbagai perspektif semakin mendalam, dan menyebabkannya dikenal sebagai pakar di bidang studi gender.

Di samping beberapa penelitian lapangan yang telah melambungkan namanya di belantara intelektual Indonesia, ia juga menulis beberapa karya yang telah diterbit-kan, di antaranya, *Reproduksi Ketimpangan Gender* (1995), *Dilema Wanita* (1996), *Sangkan Paran Gender* (1997), *Antropologi di Persimpangan Jalan* (1998), *Dari Bounded System ke Borderless Society* (1999), dan *Teori dan Praktik Komunalisme di Jawa* (2000).

Jabatan penting lainnya yang masih dipegang hingga kini adalah; Anggota Dewan Pakar Dikti Departemen Pendidikan Nasional, Anggota Komite Nasional MOST-UNESCO, Ketua Asosiasi Antropologi Indonesia (AAI) Cabang Yogyakarta-Jawa Tengah, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Sosial Kesehatan Indonesia (AISKI), Sekretaris Umum Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPPIS) Yogyakarta, dan Pengurus Forum Diskusi Bulaksumur ●